



Katalog: 4601003

STATISTIK POLITIK

2016



BADAN PUSAT STATISTIK

STATISTIK POLITIK

2016



STATISTIK POLITIK

2016

ISBN: 2303-2448

Nomor Publikasi: 04330.1602

Katalog: 4601003

Ukuran Buku: 16,25 cm x 24,38 cm

Jumlah Halaman: xviii + 180 halaman

Naskah:

Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan

Gambar Kulit:

Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik

Dicetak oleh: -

.....

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Ringkasan Eksekutif

Sub Direktorat Statistik Politik dan Keamanan, Badan Pusat Statistik.
Statistik Politik Tahun 2016.

Demokratisasi Indonesia ditandai dengan berbagai perubahan sistem dan budaya politik. Paling dominan adalah tuntutan adanya distribusi (pemencaran) *power* yang sebelumnya tersentral pada Presiden, yang dilakukan pada dua level, vertikal dan horizontal. Pemencaran vertikal dilakukan dengan pemberlakuan Otonomi Daerah yang membuat berbagai wewenang yang selama ini menjadi otoritas Pemerintah Pusat dikelola secara otonom oleh Pemerintah Daerah. Sampai dengan tahun 2016 telah terdapat 34 provinsi, 410 kabupaten dan 98 kota yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Pemencaran horizontal dilakukan dengan memperkuat lembaga-lembaga negara di luar Presiden dan kabinet. Dengan terdistribusinya kekuasaan maka Presiden dan eksekutif memungkinkan untuk dikontrol dalam mengelola pemerintahan. Selain dari lembaga Negara, kontrol dari masyarakat, organisasi masyarakat, hingga pers juga semakin leluasa. Partisipasi masyarakat dalam bentuk kontrol terhadap kebijakan pemerintah, menunjukkan kepedulian dan pemahaman yang baik terhadap hak-hak masyarakat dalam politik.

Pemerintah juga dituntut netral dalam Pemilu, yang merupakan mekanisme paling akuntabel untuk melakukan sirkulasi kepemimpinan politik secara damai. Pemilu Indonesia sebagai salah satu yang terbesar di dunia, dilakukan dengan sistem daftar terbuka. Artinya, setiap pemilih bisa memilih *figure* calon legislatif yang diajukan oleh partai politik. Demikian juga dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah juga dilakukan dengan langsung.

Selain semakin terbuka, Pemilu di Indonesia juga ditandai dengan makin kuatnya *affirmative action* terhadap perempuan. Bukan hanya di daftar calon legislatif

yang mensyaratkan kuota minimal tertentu untuk perempuan, namun juga untuk kepengurusan partai politik. Dengan upaya tersebut, start perempuan yang sebelumnya tertinggal dalam politik dapat diperpendek jaraknya.

Sekalipun demokrasi sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan politik Indonesia, namun tetap butuh terus ditingkatkan. Untuk itu dirancang Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), yang memungkinkan untuk mengukur dinamika demokrasi di setiap provinsi. Ukuran tersebut dapat digunakan sebagai dasar pembangunan politik dengan lebih tepat karena berbasis kasus-kasus riil.

<http://www.bps.go.id>

Kata Pengantar

Dinamika politik Tahun 2016 cenderung berkurang dibanding sebelumnya. Lewat dua tahun dari pemilihan legislatif dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, momen suksesi politik terakhir terjadi pada 9 Desember 2015. Hanya saja menjelang Pilkada Serentak Februari 2017, mulai terlihat geliatnya sejak akhir tahun 2016. Ini adalah momen Pilkada serentak kedua yang akan dilaksanakan.


Buku ini memotret peristiwa-peristiwa tersebut melalui hasil-hasil Pemilu dan Pilkada. Selain itu, dinamika juga akan terefleksikan melalui pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang kami kerjakan secara tahunan. Karena normalnya, kualitas pelaksanaan Pemilu dan Pilkada akan berpengaruh pada IDI di sebuah provinsi.

Kami juga terus memberikan perhatian pada partisipasi masyarakat dalam politik, sebagaimana kami tampilkan melalui data-data tentang pers atau gugatan masyarakat terhadap Undang-Undang. Selain itu, kami juga menganggap penting adanya representasi perempuan di ruang politik. Sebagai contoh, selalu kami tampilkan rekapitulasi calon legislatif dan yang terpilih duduk di DPR/DPRD. Sekalipun tidak banyak banyak berubah dibanding hasil Pemilu, namun jumlahnya bias berubah karena pergantian antar waktu.

Sebagian data kami kompilasi dari publikasi resmi berbagai lembaga, juga data yang kami kumpulkan dari daerah. Data-data lain sebagian juga diambil dari beberapa publikasi BPS yang telah ada seperti Potensi Desa, IPM, Sensus Penduduk, Statistik Keuangan Daerah, dan lain-lain.

Akhirnya, semoga buku ini dapat membantu untuk melakukan evaluasi maupun analisis politik pada masa mendatang baik untuk politik Indonesia yang semakin baik dan menyejahterakan.

Jakarta, Desember 2016
Kepala Badan Pusat Statistik
Republik Indonesia



Dr. Suhariyanto

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	iv
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	x
Daftar Grafik	xvii
Daftar Gambar	xviii
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Tujuan	4
1.3. Ruang Lingkup	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
Bab 2 Metodologi	7
2.1. Sumber Data	9
2.2. Metode PengumpulanData	10
2.3. Konsep dan Definisi	10
Bab 3 Pemerintahan	17
3.1. Sistem Pemerintahan	19
3.2. Pemerintah Pusat	20
3.2.1 Penduduk, Wilayah dan Hubungan Internasional	22
3.3. Pemerintah Daerah	31
3.4. Aparatur Negara	41
3.5. Tata Kelola Pemerintahan	48
Bab 4 Lembaga Demokrasi	58
4.1. Lembaga Demokrasi.....	60

4.2. Partai Politik	61
4.3. DPR dan DPD	65
4.3.1. Dewan Perwakilan Rakyat	65
4.3.2. Dewan Perwakilan Daerah	72
4.4. Kekuasaan Kehakiman	74
4.5. Organisasi Masyarakat	83
4.6. Media Massa	85
Bab 5 Pemilihan Umum	100
5.1. Pemilihan Umum	102
5.2. Pemilu Legislatif 2014	103
5.3. Sistem dan Peserta Pemilu	118
5.4. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	128
5.5. Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	131
5.6. Pemilihan Kepala Daerah	137
Bab 6 Demokrasi dan Keragaman Indonesia	144
6.1. Demokrasi	146
6.2. Keragaman Indonesia	165
Daftar Pustaka	172

Daftar Tabel

	Halaman
Tabel 3.1 Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Menurut Masa Pemerintahan.....	21
Tabel 3.2 Wilayah Administrasi dan Luas Wilayah	25
Tabel 3.3 Daftar Nama dan Asal Negara Sekjen ASEAN 1978-2016	26
Tabel 3.4 Jumlah dan Lokasi Kegiatan ASEAN Tahun 2012	26
Tabel 3.5 Kedutaan dan Konsulat Asing di Indonesia.....	27
Tabel 3.6 Jumlah Perwakilan Indonesia di Luar Negeri	27
Tabel 3.7 Pejabat Perbantuan pada Perwakilan RI di Luar Negeri.....	28
Tabel 3.8 Pertemuan Presiden RI dengan Pejabat Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan di Dalam Negeri Tahun 2014	29
Tabel 3.9 Pertemuan Presiden RI dengan Pejabat Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan di Luar Negeri Tahun 2014.....	29
Tabel 3.10 Pertemuan Wakil Presiden RI dengan Mitra Negara Sahabat dan Lembaga Internasional di Dalam Negeri Tahun 2014	30
Tabel 3.11 Pertemuan Menteri Luar Negeri dengan Menteri Luar Negeri dan Pejabat Setingkat Menteri Negara Sahabat di Dalam Negeri 2014	30
Tabel 3.12 Pertemuan Menteri Luar Negeri dengan Menteri Luar Negeri dan Pejabat Setingkat Menteri Negara Sahabat di Luar Negeri 2014	31
Tabel 3.13 Jumlah Kabupaten dan Kota menurut Provinsi Tahun 2013-2016.	35

Tabel 3.14 Realisasi Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2014 (juta rupiah).....	36
Tabel 3.15 Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Menurut Jenis Penerimaan Tahun Tahun 2012-2015 (juta rupiah)	37
Tabel 3.16 Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2011-2014 (milyar rupiah)	38
Tabel 3.17 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2011-2014 (milyar rupiah)	39
Tabel 3.18 Perda/Perkada Kabupaten/Kota yang Dicaput/Direvisi Oleh Menteri Dalam Negeri Atau Gubernur Tahun 2016	40
Tabel 3.19 Jumlah PNS Menurut Jabatan Struktural dan Fungsional Tahun 2016.....	42
Tabel 3.20 Jumlah PNS Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2016.....	43
Tabel 3.21 Jumlah PNS Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2016.....	43
Tabel 3.22 Jumlah Kepala Desa/Kelurahan Menurut Jenis Kelamin.....	44
Tabel 3.23 Jumlah Desa Menurut Kelompok Umur Kepala Desa Tahun 2014	45
Tabel 3.24 Jumlah Kepala Desa/Kelurahan Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2014.....	46
Tabel 3.25 Jumlah Sekertaris Desa/Kelurahan Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2014.....	47
Tabel 3.26 Jumlah Pengaduan Masyarakat tentang Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Provinsi Tahun 2009-2014.....	50
Tabel 3.27 Jumlah Laporan Gratifikasi yang Diterima KPK Tahun 2011-2014	51

Tabel 3.28 Jumlah Laporan Gratifikasi yang Diterima KPK Berdasarkan Lembaga Tahun 2011-2014	52
Tabel 3.29 Jumlah Tindak Pidana Korupsi yang Ditangani KPK Berdasarkan Tingkat Jabatan Tahun 2005-2014	53
Tabel 3.30 Jumlah Tindak Pidana Korupsi yang Ditangani KPK Berdasarkan Instansi Tahun 2004-2012	53
Tabel 3.31 Rekapitulasi Data Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Seluruh Indonesia Tahun 2013.....	54
Tabel 3.32 Indeks Pembangunan Manusia (Metode Baru) 2010-2015.....	55
Tabel 3.33 Ranking Indeks Pembangunan Manusia Provinsi 2010-2015.....	56
Tabel 4.1 Pembubaran Partai Politik di Indonesia.....	63
Tabel 4.2 Jumlah Partai Politik yang Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Berdasarkan Status Partai dan Tahun Pelaksanaan Pemilu Tahun 1999-2014.....	64
Tabel 4.3 Dana Kampanye Partai Politik Pada Pemilu 2014	64
Tabel 4.4 Jumlah Anggota DPR Perempuan Pada Setiap Pemilu	67
Tabel 4.5 Anggota DPR Terpilih Pada Setiap Fraksi Periode 2014-2019 Berdasarkan Jenis Kelamin	68
Tabel 4.6 Jumlah Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), Tahun 1999-2015	68
Tabel 4.7 Jumlah Undang-Undang Paling Banyak Diuji di MK Hingga Tahun 2014.....	69
Tabel 4.8 Penggunaan Hak Angket DPR Sejak Tahun 1999.....	70
Tabel 4.9 Penggunaan Hak Interpelasi DPR Sejak Tahun 1999.....	71
Tabel 4.10 Jumlah Anggota DPD Periode 2009-2014 dan 2014-2019 menurut Daerah Pemilihan dan Jenis Kelamin	73
Tabel 4.11 Jumlah Perkara yang Diterima Mahkamah Agung Tahun 2013-2014.....	76

Tabel 4.12 Produktifitas MA dalam Memutus Perkara Selama Tahun 2014 ...	76
Tabel 4.13 Jumlah Perkara Kasasi yang Ditangani Mahkamah Agung RI selama Tahun 2014	77
Tabel 4.14 Kualifikasi Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Tahun 2014	77
Tabel 4.15 Klasifikasi Perkara Kasasi Pidana Umum yang Terima Mahkamah Agung RI Tahun 2013-2014	78
Tabel 4.16 Uji Materil ke Mahkamah Agung RI Tahun 2014	79
Tabel 4.17 Pemeriksaan Hakim, Pelapor dan Saksi oleh Komisi Yudisial 2005-2014	80
Tabel 4.18 Usul Penjatuhan Sanksi Kepada Hakim Tahun 2005-2014	80
Tabel 4.19 Rekapitulasi Perkara Masuk Mahkamah Konstitusi	81
Tabel 4.20 Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang	81
Tabel 4.21 Rekapitulasi Perkara Sengketa Kewenangan Antar Lembaga	82
Tabel 4.22 Rekapitulasi Perkara Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah.....	82
Tabel 4.23 Jumlah Permohonan Yayasan Tahun 2013	84
Tabel 4.24 Jumlah Permohonan Perkumpulan 2013	85
Tabel 4.25 Kebebasan Pers Asia Pasifik 2010-2016	88
Tabel 4.26 Rekapitulasi Pendataan Pers Media Cetak Tahun 2014-2015	89
Tabel 4.27 Media Televisi 2013-2015	90
Tabel 4.28 Media Siber 2013-2015	91
Tabel 4.29 Media Radio	92
Tabel 4.30 Jumlah Wartawan Tersertifikasi Tahun 2013	93
Tabel 4.31 Pengaduan Pada Dewan Pers	93
Tabel 4.32 Jenis Pengaduan Tahun 2010	94
Tabel 4.33 Jenis Pengaduan Tahun 2011	95
Tabel 4.34 Jenis Pengaduan ke Dewan Pers	96

Tabel 4.35 Pengaduan Langsung Berdasar Latar Belakang Pihak Teradu Tahun 2010	97
Tabel 4.36 Pengaduan Langsung Berdasar Latar Belakang Pihak Teradu Tahun 2011	97
Tabel 4.37 Proses Pengaduan ke Dewan Pers Berdasarkan Pengadu Tahun 2012	98
Tabel 4.38 Banyaknya Desa Menurut Ketersediaan Program TV yang Dapat Diterima Tahun 2014.....	99
Tabel 5.1 Jumlah TPS dan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2014	106
Tabel 5.2 Perolehan Suara Pileg 2014.....	107
Tabel 5.3 Distribusi Perolehan Kursi Pemilu Legislatif 2014	110
Tabel 5.4 Daftar Calon Tetap DPR RI Untuk Pemilu 2014 Berdasarkan Provinsi	120
Tabel 5.5 Jumlah Caleg DPR RI pada Pemilu 2014 menurut Provinsi dan Jenis Kelamin	122
Tabel 5.6 Jumlah Caleg DPR RI pada Pemilu 2014 menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin	123
Tabel 5.7 Jumlah Caleg DPR RI pada Pemilu 2014 menurut Partai Politik dan Kelompok Umur	123
Tabel 5.8 Jumlah Caleg DPR RI pada Pemilu 2014 menurut Provinsi dan Kelompok Umur	124
Tabel 5.9 Jumlah Caleg DPR RI Untuk Pemilu 2014 Menurut Provinsi dan Pendidikan.....	125
Tabel 5.10 Jumlah Caleg DPR RI pada Pemilu 2014 menurut Partai Politik dan Pendidikan	126
Tabel 5.11 Jumlah Caleg DPR RI pada Pemilu 2014 menurut Partai Politik, Tempat Lahir dan Tempat Tinggal	126
Tabel 5.12 Jumlah Caleg pada Pemilu 2014 menurut Provinsi,	

Tempat Lahir dan Tempat Tinggal	127
Tabel 5.13 Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014	129
Tabel 5.14 Daerah Pemilihan Pemilu 2014	132
Tabel 5.15 Komposisi DPRD Provinsi Berdasarkan Jenis Kelamin	
Tahun 2011	133
Tabel 5.16 Komposisi DPRD Provinsi Berdasarkan Jenis Kelamin	
Tahun 2012	134
Tabel 5.17 Komposisi DPRD Provinsi Berdasarkan Jenis Kelamin	
Tahun 2013	135
Tabel 5.18 Jumlah Anggota DPRD Kabupaten/Kota Perempuan	
Tahun 2013	136
Tabel 5.19 Waktu Pelaksanaan dan Banyaknya Pasangan Calon pada	
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	138
Tabel 5.20 Jumlah Pemilih Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih pada	
Pemilihan Kepala Daerah Tingkat Provinsi	139
Tabel 5.21 Perolehan Suara dan Partai Pendukung Kepala Daerah Terpilih ..	140
Tabel 5.22 Kepala Daerah Hasil Pilkada menurut Jenis Kelamin, Tahun	
Pelantikan dan Jabatan Sebelum Menjadi Gubernur Terpilih	141
Tabel 5.23 Jenis Kelamin Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Kota dan	
Kepala Daerah Terpilih Melalui Jalur Perseorangan	142
Tabel 6.1 Status Demokrasi Negara-Negara Dunia Tahun 1984-2016	148
Tabel 6.2 Indeks Demokrasi Dunia berdasarkan Rezim	149
Tabel 6.3 Peringkat Demokrasi Indonesia Tahun 2007 – 2014 Versi	
<i>The Economist</i>	149
Tabel 6.4 IDI menurut Provinsi Tahun 2009-2015	150
Tabel 6.5 Indeks Demokrasi Indonesia menurut Peringkat dan Aspek	
Tahun 2009	151

Tabel 6.6	Indeks Demokrasi Indonesia menurut Peringkat dan Aspek Tahun 2010	152
Tabel 6.7	Indeks Demokrasi Indonesia menurut Peringkat dan Aspek Tahun 2011	153
Tabel 6.8	Indeks Demokrasi Indonesia menurut Peringkat dan Aspek Tahun 2012	154
Tabel 6.9	Indeks Demokrasi Indonesia menurut Peringkat dan Aspek Tahun 2013	155
Tabel 6.10	Indeks Demokrasi Indonesia menurut Peringkat dan Aspek Tahun 2014	156
Tabel 6.11	Indeks Demokrasi Indonesia menurut Peringkat dan Aspek Tahun 2015	157
Tabel 6.12	Indeks Aspek IDI Provinsi menurut Peringkat Tahun 2009	158
Tabel 6.13	Indeks Aspek IDI Provinsi menurut Peringkat Tahun 2010	159
Tabel 6.14	Indeks Aspek IDI Provinsi menurut Peringkat Tahun 2011	160
Tabel 6.15	Indeks Aspek IDI Provinsi menurut Peringkat Tahun 2012	161
Tabel 6.16	Indeks Aspek IDI Provinsi menurut Peringkat Tahun 2013	162
Tabel 6.17	Indeks Aspek IDI Provinsi menurut Peringkat Tahun 2014	163
Tabel 6.18	Indeks Aspek IDI Provinsi menurut Peringkat Tahun 2015	164
Tabel 6.19	Jumlah Penduduk menurut Suku Bangsa	167
Tabel 6.20	Jumlah Penduduk Menurut Suku dan Jenis Kelamin	168
Tabel 6.21	Banyaknya Desa Menurut Keragaman Agama dan Suku	169
Tabel 6.22	Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut	170
Tabel 6.23	Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Agama yang Dianut	171

Daftar Grafik

	Halaman
Grafik 3.1 Komposisi Kabinet Indonesia Berdasarkan Latar Belakang dan Jenis Kelamin	22
Grafik 4.1 Jumlah Partai Politik Nasional Peserta Pemilu 1955 – 2014	63
Grafik 4.2 Komposisi Anggota DPR Berdasarkan Status Keanggotaan	67
Grafik 4.3 Status Kebebasan Pers Indonesia Tahun 1997-2016.....	87
Grafik 5.1 Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Legislatif Tahun 1955-2014	104
Grafik 5.2 Jumlah Dapil dan Alokasi DPR RI pada Pemilu 1999-2014	118

Daftar Gambar

Halaman

Gambar 5.1	Pemenang Pemilu Legislatif Tahun 2014 Berdasarkan Provinsi.....	111
Gambar 5.2	Pemenang Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Pulau Sumatera ...	112
Gambar 5.3	Pemenang Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Pulau Jawa	113
Gambar 5.4	Pemenang Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Pulau Bali dan Nusa Tenggara.....	114
Gambar 5.5	Pemenang Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Pulau Kalimantan.	115
Gambar 5.6	Pemenang Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Pulau Sulawesi	116
Gambar 5.7	Pemenang Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kepulauan Maluku dan Papua.. ..	117
Gambar 5.8	Suara Terbanyak Setiap Provinsi Pada Pilpres Tahun 2014.....	130

<http://www.bps.go.id>

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Momentum demokratisasi pada tahun 1998 ditangkap dengan berbagai bentuk perubahan dalam *real* politik Indonesia. Paling dominan adalah tuntutan adanya distribusi (pemencaran) *power* yang sebelumnya tersentral pada Presiden. Pemencaran dilakukan pada dua level, horizontal dan vertikal. Untuk mendukung hal tersebut, diterbitkan berbagai regulasi melalui undang-undang maupun amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi hingga empat kali.

Pemencaran horizontal dilakukan dengan memperkuat wewenang lembaga-lembaga negara diluar eksekutif kinerja pemerintah memiliki kontrol. Disamping itu, pemencaran vertikal dilakukan dengan pemberlakuan Otonomi Daerah yang mengalihkan berbagai wewenang yang selama ini menjadi otoritas Pemerintah Pusat yang kemudian dikelola secara otonom oleh pemerintah daerah.

Berbagai perubahan tersebut membuat sistem politik Indonesia mengalami banyak perubahan. Beragam segregasi kepentingan dalam masyarakat diberi ruang untuk diartikulasikan melalui berbagai saluran, salah satunya melalui jalur formal dengan membentuk partai politik. Pendirian partai politik baru diberi ruang sehingga membuat jumlah partai politik yang sejak lima periode Pemilu sebelumnya konstan berjumlah tiga, melonjak menjadi 48 partai politik pada Pemilu Tahun 1999, kemudian berkurang hingga separuhnya menjadi 24 partai politik pada Pemilu 2004. Jumlah ini naik lagi menjadi 38 partai politik pada Pemilu 2009, dan kemudian turun lagi menjadi 12 partai politik pada Pemilu 2014.

Diawali pada Pemilu 2009 terdapat kebutuhan untuk membatasi jumlah Partai Politik di DPR RI dengan memberlakukan *Parliamentary Treshold* (PT). Ketentuan PT membatasi hanya partai dengan perolehan suara nasional minimal sebesar 2,5% pada Pemilu Tahun 2009 yang bisa memperoleh kursi di DPR RI. Jika perolehan suara partai politik kurang dari angka PT maka perolehan suara partai tersebut tidak akan dihitung sebagai pembagi dalam penghitungan BPP (bilangan pembagi pemilih). Pada Pemilu 2014 angka PT meningkat menjadi 3,5%.

Aspek penting lain adalah perubahan kultur politik yang semakin terbuka. Pers menjadi lebih leluasa melakukan kritik atas kebijakan-kebijakan Pemerintah. Demikian juga dengan dibukanya ruang partisipasi yang lebih luas bagi *civil society*. Organisasi-organisasi masyarakat bermunculan sebagai representasi kepentingan masyarakat yang beragam. Kebebasan untuk mengekspresikan diri, berpendapat, dan berpolitik dijamin oleh berbagai aturan. Salah satu gejala yang juga marak muncul adalah adanya tuntutan peningkatan representasi perempuan dalam politik. Perempuan telah berpuluh tahun mengalami domestifikasi peran, sehingga merasa perlu melakukan percepatan untuk mencapai kesetaraan baik dari aspek jumlah maupun peran dalam jabatan-jabatan publik. Pada Pemilu tahun 2009 dan 2014, ketentuan kuota minimal 30% perempuan dalam daftar calon tetap (DCT) dengan sistem *zipper* (minimal terdapat satu orang perempuan dalam tiga calon) telah masuk dalam Undang-Undang Pemilihan Umum.

Demokratisasi telah membuat politik di Indonesia semakin dinamis. Subyek perhatian politik bukan lagi monopoli pemerintah pusat, namun juga lembaga-lembaga negara, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, bahkan perorangan. Berbagai hal tersebut menarik untuk dicatat sebagai bagian penting untuk memberikan gambaran tentang perkembangan demokrasi di Indonesia. Melalui publikasi Statistik Politik 2016 ini, berbagai fenomena politik yang terjadi hingga Tahun 2016 dicatat, didokumentasi dan ditampilkan secara berkala sebagai lanjutan dari penerbitan tahun sebelumnya.

1.2. Tujuan

Tujuan penulisan publikasi Statistik Politik 2016 ini adalah untuk menghimpun dan menampilkan data statistik politik Indonesia secara berkala yang dapat dibandingkan antar waktu dan daerah.

1.3. Ruang Lingkup

Statistik Politik 2016 mencakup data-data yang terkait dengan politik dan pemerintahan di Indonesia, baik di tingkat pusat, daerah, hingga luar negeri.

1.4. Sistematika Penulisan

Publikasi ini terdiri dari enam bab. Pada Bab 1 Pendahuluan, menyajikan latar belakang, tujuan penyusunan publikasi, ruang lingkup dan sistematika penulisan. Bab 2 tentang metodologi membahas sumber data, metode pengumpulan data, serta konsep dan definisi. Bab 3 tentang pemerintahan, yang membahas sistem pemerintahan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparatur negara, serta tata kelola pemerintahan.

Bab 4 membahas Lembaga Demokrasi yang membahas partai politik, MPR, DPR, dan DPD, kekuasaan kehakiman, organisasi masyarakat, serta media massa. Bab 5 tentang Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, yang terdiri dari bahasan tentang Pemilu 2014, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan kepala daerah, serta penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum. Bab 6 tentang Demokrasi dan Keragaman Indonesia, mengulas tentang berbagai pengukuran demokrasi di dunia dan Indonesia, serta keragaman suku dan agama di Indonesia.

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bps.go.id>

METODOLOGI

2

<http://www.bps.go.id>

Bab kedua membahas mengenai sumber data dan metode pengumpulan data. Selain itu, bab ini membahas konsep dan definisi yang digunakan dalam publikasi ini. Mengingat bahasan mengenai politik cukup luas, maka perlu adanya pembatasan pembahasan. Konsep dan definisi diperlukan untuk memberikan pengertian yang sama dalam memaknai data yang disajikan dalam publikasi ini.

2.1. Sumber Data

Data yang digunakan dalam publikasi Statistik Politik 2016 ini bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) dan hasil kompilasi dari berbagai instansi terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah. Data BPS yang digunakan dalam publikasi ini adalah data hasil Sensus Penduduk (SP) 2010 yaitu data tentang Penduduk menurut Suku Bangsa dan Penduduk menurut Agama. Data BPS lain juga ditemui pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), Potensi Desa 2014 serta Statistik Keuangan Daerah 2008 - 2015.

Publikasi ini juga mengambil data dari instansi lain di tingkat pusat diantaranya dari Komisi Pemilihan Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Sekretariat DPR RI, Badan Kepegawaian Negara, Dewan Pers, Komisi Kepolisian nasional, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan media massa baik cetak maupun elektronik.

Di tingkat daerah, sumber data diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum Daerah, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, pemerintah daerah, dan Sekretariat DPRD. Data di tingkat daerah dikumpulkan sampai tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pada tingkat provinsi pengumpulan dilakukan oleh BPS provinsi, dan pada tingkat kabupaten/kota pengumpulan dilakukan oleh BPS Kabupaten/Kota.

2.2. Metode Pengumpulan Data

Data untuk menyusun Statistik Politik 2016 ini dikumpulkan melalui kompilasi data dari hasil registrasi/catatan instansi terkait. Untuk keseragaman format data antar daerah, pengumpulan data menggunakan dua jenis instrumen pengumpulan data yang telah disusun di BPS Pusat dengan maksud untuk memudahkan petugas mengumpulkan data. Dua instrumen yang telah disusun berupa rancangan (*dummy*) tabel dan kuesioner. Dari kedua jenis instrumen tersebut, BPS daerah diberikan kebebasan untuk memilih instrumen yang dianggap paling sesuai untuk pengumpulan data. Dalam proses pengumpulan data di daerah, kenyataan di lapangan menemukan bahwa permasalahan bukan hanya terletak pada perbedaan format data yang tersedia di instansi sumber data, bahkan juga termasuk ketersediaan data. Kondisi tersebut menjadi penyebab beberapa data dari daerah tidak bisa disajikan dalam publikasi ini. Untuk mengatasi kekurangan ini kami melakukan kompilasi data-data dari lembaga negara yang berada di pusat.

2.3. Konsep dan Definisi

Mengingat luasnya definisi yang digunakan dalam publikasi Statistik Politik 2016, diperlukan pembatasan konsep-konsep yang digunakan. Batasan ini akan membantu pemahaman pembaca akan konsep dan data-data yang ditampilkan dalam publikasi ini.

Affirmative Action adalah kebijakan yang memberikan keistimewaan (kepada kelompok tertentu) untuk sementara, demi mencapai tujuan tertentu. Implementasi *affirmative action* dalam Pemilu 2009 dan 2014 diatur dalam Undang-Undang Pemilu dimana sekurang-kurangnya 30 persen calon legislatif dalam daftar calon tetap (DCT) adalah perempuan, serta diantara 3 (tiga) calon dalam DCT minimal terdapat satu orang perempuan. Selain itu, didalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, selain syarat pendirian partai politik,

pengurus dewan pimpinan pusat partai politik juga harus terdapat minimal 30% perempuan.

ASEAN adalah organisasi regional yang beranggotakan 10 negara yang berada di Asia Tenggara, diantaranya; Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Myanmar, Vietnam, Laos, Filipina, dan Kamboja.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan, badan ini disebut Panitia Pengawas Pemilu.

Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) adalah harga suara sebuah kursi di satu daerah pemilihan yang berasal dari jumlah suara sah pada suatu daerah pemilihan (Dapil) dibagi jumlah kursi yang diperebutkan.

Calon Independen/Calon Perseorangan adalah seorang yang menjadi kandidat dalam Pemilu Kepala daerah (Pilkada) tanpa melalui partai politik. Calon independen mulai dikenal melalui UU No. 12/2008 yang merupakan perubahan atas UU No. 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Calon Legislatif (Caleg) adalah kandidat yang mencalonkan diri pada Pemilu legislatif baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Calon Presiden/Wakil Presiden adalah orang-orang yang memenuhi syarat sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden dan namanya terdaftar di Komisi Pemilihan Umum sebagai peserta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (UU No.42/2008).

Daerah Otonom, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No.32/2004).

Daerah Pemilihan (Dapil) adalah pembagian wilayah pada Pemilu legislatif. Pada setiap Dapil dialokasikan sejumlah kursi tertentu yang akan diperebutkan oleh peserta Pemilu.

Daftar Calon Tetap (DCT) adalah daftar kandidat anggota legislatif yang akan dipilih pada Pemilu legislatif tingkat pusat, daerah, dan DPD.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No.32/2004).

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah lembaga perwakilan daerah yang dipilih melalui Pemilu yang berkedudukan sebagai anggota MPR. Anggota DPD berjumlah masing-masing empat orang pada setiap provinsi.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga yang anggotanya dipilih oleh rakyat dalam Pemilu, memiliki fungsi legislasi (membuat undang-undang), penyusunan anggaran dan pengawasan kerja pemerintah pusat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga legislatif yang mewakili rakyat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, memiliki fungsi legislasi (membuat peraturan daerah), penyusunan anggaran dan pengawasan kerja pemerintah daerah.

Electoral Threshold adalah ambang batas perolehan suara yang harus dipenuhi partai politik untuk dapat menjadi peserta pada Pemilu berikutnya.

Golongan Putih (Golput) adalah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih. Angka Golput adalah hasil pengurangan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih terhadap jumlah seluruh penduduk yang tercantum dalam daftar pemilih.

Hak Angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 27/2009).

Hak Interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (UU No. 27/2009).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah penyelenggara pemilihan umum di Indonesia yang memiliki struktur berjenjang di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah lembaga negara yang memiliki wewenang untuk melantik dan memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden serta merubah dan menetapkan Undang Undang Dasar. MPR terdiri dari DPR dan DPD yang dipilih melalui Pemilu legislatif.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No.32/2004).

Parliamentary Threshold (PT) adalah ambang batas perolehan suara partai politik untuk dapat masuk DPR. Sejauh ini Indonesia hanya memberlakukan PT untuk pemilihan DPR. Pada Pemilu 2014 PT akan diberlakukan juga hingga pemilihan DPRD provinsi dan kabupaten/kota, namun akhirnya pasal yang mengatur hal tersebut dibatalkan oleh mahkamah konstitusi. Pada Pemilu 2009 *parliamentary threshold* sebesar 2,5% dan Pemilu 2014 meningkat sebesar 3,5%.

Partai Politik adalah organisasi yang dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan politik dengan cara mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik atau perebutan kekuasaan dan jabatan publik.

Partisipasi Politik adalah keterlibatan warganegara dalam mempengaruhi kebijakan. Partisipasi politik digolongkan menjadi dua; konvensional seperti memilih dalam Pemilu atau diskusi-diskusi politik, serta; non-konvensional seperti demonstrasi dan mogok.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom (UU No.23/2014).

Pemekaran Daerah adalah pembentukan wilayah administratif pemerintahan baru dari tingkat Provinsi hingga tingkat desa.

Pemerintah Pusat adalah penyelenggara pemerintahan di tingkat pusat yang terdiri dari Presiden, kabinet, dan lembaga-lembaga pembantu Presiden.

Pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah/pernah kawin (UU No.8/2012).

Pemilihan Kepala Daerah, selanjutnya disebut Pilkada adalah pemilihan untuk memilih gubernur, bupati/walikota. Pemilihan dilakukan secara langsung dan diadakan setiap lima tahun sekali menjelang selesainya masa jabatan seorang kepala daerah.

Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No.8/2012).

Penduduk adalah warga negara Indonesia atau warga negara asing yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia.

Perjanjian Bilateral adalah perjanjian yang dilakukan antara dua negara.

Peserta Pemilu Legislatif adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD (UU No.8/2012).

Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan kandidat Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditetapkan oleh KPU.

Sengketa Hasil Pemilu adalah sengketa terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum atau Komisi Pemilihan Umum Daerah menyangkut hasil Pemilu dan Pilkada. Sejak Pemilu 2009, sengketa Pemilu diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Suku Bangsa adalah paro (suku) dari suatu bangsa yang memiliki identitas yang sama dalam bentuk kebudayaan atau bahasa serta (asal) wilayah.

Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara (UU No.8/2012).

PEMERINTAHAN

3

<http://www.ips.go.id>

3.1. Sistem Pemerintahan

Sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang luas, Indonesia memiliki tantangan yang kompleks jika pemerintahan dikelola secara terpusat. Selain itu, momentum keterbukaan politik ditandai dengan tuntutan akan partisipasi publik dalam pengelolaan pemerintahan. Indonesia memilih pemencaran kekuasaan dengan bentuk otonomi daerah yang memberikan keleluasaan lebih banyak pada pemerintah daerah, sekaligus memperpendek jarak pemerintahan dengan publik. Sebagian wewenang yang dulu berada pada pemerintah pusat, didesentralisasi ke pemerintah daerah. Hak otonomi bukan berarti pemberian kedaulatan kepada pemerintah daerah, karena dalam pelaksanaannya pengawasan kekuasaan tertinggi tetap berada pada pemerintah pusat.

Selain secara vertikal, pemencaran kekuasaan negara juga berlaku secara horizontal atau yang biasa disebut dengan pembagian fungsi. Maknanya pembagian fungsi merupakan pemencaran fungsi negara pada berbagai struktur pemerintahan yang satu dan yang lain, mempunyai hubungan sederajat, tidak saling membawahkan, tetapi berhubungan secara fungsional dalam usaha bersama mencapai tujuan negara. Pembagian fungsi lazim merujuk terminologi Montesquieu yang membagi menjadi peran lembaga negara menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oleh Surbakti (2010:220-221) penggunaan istilah ini dianggap tidak terlalu tepat, jika dibandingkan dengan terminologi Almond yang mengategorikan menjadi; pembuatan peraturan (*rule making*), penerapan peraturan (*rule application*), dan penghakiman peraturan (*rule adjudication*). Dalam konteks Indonesia sebagaimana dimaksud UID 1945 Pasal 24 ayat 2, lembaga pembuat peraturan terdiri dari DPR, MPR, dan DPD, lembaga pelaksana peraturan Presiden dan Kabinet, lembaga penghakiman peraturan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

3.2. Pemerintah Pusat

Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, dimana pada sistem ini kekuasaan Presiden sangat besar. Surbakti (*ibid*, 219) menguraikan fungsi presiden dalam pemerintahan presidensial ke dalam enam bagian. Pertama, sebagai kepala negara Presiden melaksanakan fungsi simbolis dan seremonial mewakili bangsa-negara. Kedua, sebagai kepala eksekutif dia memimpin kabinet dan birokrasi dalam melaksanakan kebijakan umum. Ketiga, sebagai kepala legislatif dia mengajukan rancangan undang-undang kepada badan perwakilan rakyat, dan berusaha meyakinkan para wakil rakyat untuk menerima rancangan kebijakannya. Keempat, sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata. Kelima, sebagai pemimpin dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri. Keenam, sebagai pemimpin partai.

Sejak Indonesia merdeka sebanyak 7 orang pernah menjabat sebagai presiden dan 11 orang pernah menjabat sebagai wakil presiden. Tabel 3.1 menyajikan pasangan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia menurut masa pemerintahan. Presiden Ir. H. Joko Widodo dan Wakil Presiden Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla dilantik pada 20 Oktober 2014, menggantikan Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Prof. Dr. Boediono yang menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Periode 2009 – 2014.

Secara *de facto* Indonesia juga pernah mempunyai pimpinan pemerintahan di masa transisi yaitu Syarifuddin Prawiranegara yang memimpin Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) dan Assaat. Kedua pemimpin tersebut merupakan pemangku jabatan Presiden Republik Indonesia ketika konsensus Konferensi Meja Bundar, menghasilkan Republik Indonesia Serikat dibawah kepemimpinan Ir. Soekarno.

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan, Presiden dan Wakil Presiden dibantu oleh menteri-menteri dalam kabinet. Menurut Undang-undang Dasar 1945, Indonesia menganut kabinet presidensial. Menteri adalah pembantu

Presiden, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sehingga tidak bertanggung jawab kepada DPR. Jumlah kementerian dan jumlah menteri bervariasi.

Pada masa pemerintahan Presiden Ir. H. Joko Widodo dan Wakil Presiden Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla terdapat 15 menteri yang berasal dari partai politik, dan 19 menteri dari luar partai politik. Berdasarkan jenis kelamin, Kabinet Kerja memiliki delapan orang menteri perempuan atau sekitar 24%. Berdasarkan jumlah maupun persentase, komposisi perempuan dalam Kabinet Kerja merupakan yang terbesar sepanjang sejarah kabinet Indonesia (Tabel 3.2).

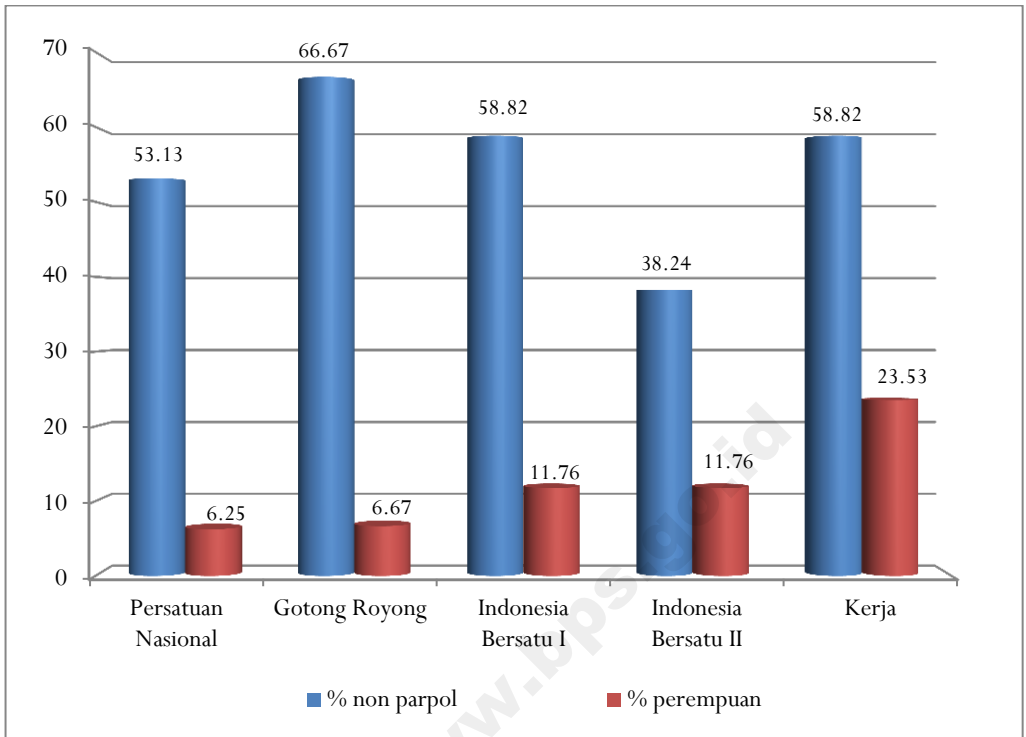
Tabel 3.1. Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Menurut Masa Pemerintahan

Presiden	Wakil Presiden	Masa Pemerintahan
(1)	(2)	(3)
Ir. Soekarno	Drs. Moehammad Hatta	18 Agustus 1945 – 19 Desember 1948
Ir. Soekarno	Drs. Moehammad Hatta	14 Juli 1949 – 27 Desember 1949
Ir. Soekarno	Tidak ada Wakil Presiden	27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950
Ir. Soekarno	Drs. Moehammad Hatta ¹⁾	17 Agustus 1950 – 22 Februari 1967
H.M. Soeharto	Tidak ada wakil presiden	22 Februari 1967 – 27 Maret 1968
H.M. Soeharto	Tidak ada wakil presiden	27 Maret 1968 – 24 Maret 1973
H.M. Soeharto	Sri Sultan Hamengkubuwono IX	24 Maret 1973 - 23 Maret 1978
H.M. Soeharto	H. Adam Malik Batubara	23 Maret 1978 - 11 Maret 1983
H.M. Soeharto	Jenderal (Purn) R. Umar Wirahadikusuma	11 Maret 1983 - 11 Maret 1988
H.M. Soeharto	Letjend (Purn) Soedharmono, SH	11 Maret 1988 - 11 Maret 1993
H.M. Soeharto	Jenderal (Purn) Try Sutrisno	11 Maret 1993 - 10 Maret 1998
H.M. Soeharto	Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie	10 Maret 1998 - 21 Mei 1998
Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie	Tidak ada wakil presiden	21 Mei 1998 - 20 Oktober 1999
KH. Abdurahman Wahid	Hj. Megawati Soekarnoputri	20 Oktober 1999 - 23 Juli 2001
Hj. Megawati Soekarnoputri	Dr (HC) H. Hamzah Haz	23 Juli 2001 - 20 Oktober 2004
Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono	Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla	20 Oktober 2004 - 20 Oktober 2009
Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono	Prof. Dr. Boediono	20 Oktober 2009 – 20 Oktober 2014
Ir. H. Joko Widodo	Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla	20 Oktober 2014 – Sekarang

Keterangan: 1) Menjadi wakil presiden sampai 1 Desember 1956

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

Grafik 1. Komposisi Kabinet Indonesia Berdasarkan Latar Belakang dan Jenis Kelamin



Sumber: Diolah dari berbagai sumber

3.2.1. Penduduk, Wilayah dan Hubungan Internasional

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki jumlah pulau terbanyak di dunia dengan luas wilayah yang mencapai 1.910.931,32 KM². Survei Kementerian Kelautan dan Perikanan (2010) menyebutkan jumlah pulau di Indonesia sebanyak 13.000 pulau. Di antara jumlah pulau tersebut, secara administratif terbagi menjadi 34 provinsi 416 Kabupaten serta 98 Kota (Kemendagri, 2015). Provinsi dengan wilayah terluas adalah Papua dengan luas 319.036,05 km², disusul Kalimantan Tengah dengan luas 153.564,50 Km², dan Kalimantan Barat dengan luas 147.307 Km². Sebaliknya, tiga Provinsi dengan luas wilayah paling kecil adalah DKI Jakarta dengan luas 664,01 km², DI Yogyakarta 3.133,15 km², serta Bali 5.780,06 km² (Tabel 3.2).

Sebagai negara dengan luas wilayah dan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara, Indonesia memiliki peran yang besar, oleh Chandra (2009: 234 dalam Wibowo & Hadi [ed], 2009) Indonesia bahkan disebut sebagai pemimpin alami ASEAN (The Association of Southeast Asian Nations). Pandangan tersebut didasarkan pada peran Indonesia sebagai salah satu inisiator utama terbentuknya organisasi ASEAN dan merupakan kekuatan politik penting di Asia Tenggara.

Selain menjadi tempat sekretariat ASEAN, Indonesia juga telah tiga kali pernah menjabat sebagai Sekjen ASEAN, paling banyak di antara negara-negara anggota lain. Sekalipun jabatan Umarjadi Notowijono hanya 4 bulan, negara-negara lain seperti Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura, baru dua kali menjabat sebagai Sekjen ASEAN. Brunei Darussalam hanya satu kali, sementara Myanmar dan Laos bahkan belum pernah menjabat. Vietnam memiliki kesempatan pertama menjadi Sekjen ASEAN semenjak 1 Januari 2013. Le Luong Minh yang merupakan mantan Deputy Menteri Luar Negeri Vietnam, menggantikan Surin Pitsuwan dari Thailand yang habis masa jabatannya pada 31 Desember 2012 (Tabel 3.3).

Sepanjang tahun 2012 – 2013 ASEAN melakukan banyak kegiatan yang sebagian besar dilaksanakan di negara-negara ASEAN. Berdasarkan ASEAN Annual Report 2012 - 2015 agenda kegiatan ASEAN tahun 2015 dilakukan sebanyak 176 pertemuan (Hingga Mei 2015). Pada Tahun 2016 kegiatan paling banyak dilakukan di Laos, yaitu sebanyak 86 kali *meeting*, sementara yang paling sedikit di Vietnam yaitu sebanyak 1 kali *meeting*. Data lengkap untuk kalender kegiatan ASEAN tahun 2012 - 2016 ditampilkan pada Tabel 3.4.

Persahabatan antara dua negara ditandai dengan adanya kedutaan besar. Indonesia memiliki 95 kedutaan besar di luar negeri. Di Indonesia terdapat 94 kedutaan besar negara sahabat, dengan komposisi yang sebagian besar adalah negara-negara di Asia. Jumlah kedutaan besar Indonesia di luar negeri dengan jumlah kedutaan besar negara sahabat yang ada di Indonesia relatif seimbang, jika dibandingkan dengan jumlah konsulat jenderal Indonesia di luar negeri yang

berjumlah 34 sedangkan konsulat jenderal negara sahabat di Indonesia berjumlah 15 negara (Tabel 3.5). Hubungan Internasional Indonesia yang sebagian besar terjadi dengan negara-negara di Asia juga tampak pada jumlah perwakilan Indonesia di luar negeri (Tabel 3.6), dimana 81 (55%) diantaranya terdapat di Asia. Dari seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri, paling banyak merupakan Atase Pertahanan (33 perwakilan) dan Atase Perdagangan (23 perwakilan) sebagaimana ditampilkan pada Tabel 3.7.

Kunjungan Diplomatik Indonesia ke luar negeri lebih banyak dilakukan Presiden yang sepanjang tahun 2015 tercatat sebanyak 22 kali (Tabel 3.8), jika dibandingkan dengan Wakil Presiden (Tabel 3.10), atau menteri luar negeri yang sebanyak 19 kali (Tabel 3.12). Terkait dengan kunjungan diplomatik, sepanjang 2015 menteri luar negeri paling banyak menerima 41 kunjungan (Tabel 3.11), dan Presiden 20 kunjungan (Tabel 3.8).

Tabel 3.2 Wilayah Administratif dan Luas Wilayah

Provinsi	Kabu- paten	Kota	Keca- matan	Kelu- rahan	Desa	Luas Wilayah (km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	18	5	289	0	6.474	57.956,00
Sumatera Utara	25	8	436	691	5.389	72.981,23
Sumatera Barat	12	7	179	259	880	42.012,89
Riau	10	2	163	243	1.592	87.023,66
Jambi	9	2	138	163	1.398	50.058,16
Sumatera Selatan	13	4	231	377	2.817	91.592,43
Bengkulu	9	1	126	172	1.341	19.919,33
Lampung	13	2	225	205	2.435	34.623,80
Kep Babel	6	1	47	78	309	16.424,06
Kepulauan Riau	5	2	66	141	275	8.201,72
DKI Jakarta	1	5	44	267	0	664,01
Jawa Barat	18	9	626	641	5.319	35.377,76
Jawa Tengah	29	6	573	750	7.809	32.800,69
DIY	4	1	78	46	392	3.133,15
Jawa Timur	29	9	664	776	7.723	47.799,75
Banten	4	4	155	313	1.238	9.662,92
Bali	8	1	57	80	636	5.780,06
NTB	8	2	116	142	995	18.572,32
NTT	21	1	306	318	2.950	48.718,10
Kalimantan Barat	12	2	174	89	1.908	147.307,00
Kalimantan Tengah	13	1	136	138	1.434	153.564,50
Kalimantan Selatan	11	2	152	143	1.864	38.744,23
Kalimantan Timur	7	3	103	196	833	129.066,64
Kalimantan Utara	4	1	50	35	447	75.467,70
Sulawesi Utara	11	4	167	332	1.490	13.851,64
Sulawesi Tengah	12	1	174	168	1.839	61.841,29
Sulawesi Selatan	21	3	306	785	2.253	46.717,48
Sulawesi Tenggara	15	2	209	377	1.820	38.067,70
Gorontalo	5	1	77	72	657	11.257,07
Sulawesi Barat	6	0	69	71	576	16.787,18
Maluku	9	2	118	33	1.191	46.914,03
Maluku Utara	8	2	113	117	1.063	31.982,50
Papua	28	1	524	107	5.118	319.036,05
Papua Barat	12	1	203	87	1.628	99.671,63
Total	416	98	7.160	8.430	74.754	1.913.578.68

Sumber: Kemendagri (2016)

Tabel 3.3 Daftar Nama dan Asal Negara Sekjen ASEAN 1978 – 2016

Nama Sekjen	Negara Asal	Masa Jabatan
(1)	(2)	(3)
Hartono Rekso Dharsono	Indonesia	7 Juni 1976 - 18 Februari 1978
Umarjadi Notowijono	Indonesia	19 Februari - 30 Juni 1978
Datuk Ali Bin Abdullah	Malaysia	10 Juli 1978 - 30 Juni 1980
Narciso G. Reyes	Filipina	1 Juli 1980 - 1 Juli 1982
Chan Kai Yau	Singapura	18 Juli 1982 - 15 Juli 1984
Phan Wannamethee	Thailand	16 Juli 1984 - 15 Juli 1986
Roderick Yong	Brunei Darussalam	16 Juli 1986 - 16 Juli 1989
Rusli Noor	Indonesia	17 Juli 1989 - 1 Januari 1993
Datuk Ajit Singh	Malaysia	1 Januari 1993 - 31 Desember 1997
Rodolfo C. Severino	Filipina	1 Januari 1998 - 31 Desember 2002
Ong Keng Yong	Singapura	1 Januari 2003 - 31 Desember 2007
Surin Pitsuwan	Thailand	1 Januari 2008 - 31 Desember 2012
Le Luong Minh	Vietnam	1 Januari 2013 - Sekarang

Sumber: ASEAN Annual Report (2014)

Tabel 3.4 Jumlah dan Lokasi Kegiatan ASEAN Tahun 2012 – 2016

Negara	2012	2013	2014	2015*	2016**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kamboja	72	18	16	7	16
Brunei	11	153	27	4	21
Indonesia	33	122	93	31	65
Vietnam	10	25	34	4	1
Malaysia	18	55	28	69	29
Philippine	10	28	30	13	29
Singapore	14	22	27	5	33
Thailand	21	49	35	15	35
Myanmar	5	21	135	7	10
Laos	10	29	27	5	86
Non - Asean	206	62	57	16	38
Total	410	584	509	176	363

* Sesuai Kalender ASEAN, hingga 31 Mei 2015

** Sumber: Asean National Calendar 2016

Tabel 3.5 Kedutaan dan Konsulat Asing di Indonesia

Benua/Kawasan	Kedutaan Besar	Konsulat Jenderal	Konsulat	Consular office / Consular agency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Afrika	11	0	0	0
Amerika	14	1	1	1
Asia	32	12	5	1
Australia	1	1	0	0
Eropa	34	1	1	0
Pasifik	2	0	0	0
Total	94	15	7	2

Sumber: Kementerian Luar Negeri (2015)

Tabel 3.6 Jumlah Perwakilan Indonesia Di Luar Negeri

Benua / Kawasan	Kedutaan Besar	Konsulat Jenderal	Perutusan Tetap RI
(1)	(2)	(3)	(4)
Afrika	16	1	0
Amerika	13	7	1
Asia	34	22	1
Australia dan Oseania	4	0	0
Eropa	28	4	1
Jumlah	95	34	3

Sumber: Diolah Dari Kementerian Luar Negeri (2015)

Tabel 3.7 Pejabat Perbantuan pada Perwakilan RI di Luar Negeri

Bidang	Asia	Afrika	Amerika	Eropa	Australia dan Oseania
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Atase Pertahanan	18	2	2	9	2
Atase Udara	2	0	1	0	0
Atase Laut	3	0	1	2	1
Atase Perdagangan	9	1	2	10	1
Atase Imigrasi	6	0	0	2	0
Atase Pendidikan	9	1	1	4	1
Atase Kejaksaan	1	0	0	0	0
Atase Polri	6	0	1	1	1
Atase Militer	3	0	0	2	1
Atase Perhubungan	3	0	2	2	0
Atase Tenaga Kerja	4	0	0	0	0
Atase Keuangan	2	0	0	1	0
Atase Perindustrian	1	0	0	1	0
Atase Pertanian	1	0	1	2	0
Atase Kehutanan	1	0	0	0	0
Atase Ilmu Pengetahuan	0	0	0	1	0
BIN	12	1	0	4	1
Jumlah	81	5	11	41	8

Sumber: Diolah dari Kementerian Luar Negeri (2015)

**Tabel 3.8 Pertemuan Presiden RI dengan Pejabat Setingkat Kepala Negara/
Kepala Pemerintahan di Dalam Negeri Tahun 2014**

Bulan	Amerika	Eropa	Asia	Australia	Pasifik	Afrika	Organi sasi Interna sional	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Januari	-	-	-	-	-	-	-	0
Februari	-	-	1	-	-	-	-	1
Maret	-	-	1	-	-	-	-	1
April	-	-	-	-	-	-	-	0
Mei	-	-	1	-	-	-	-	1
Juni	-	-	1	1	-	-	-	2
Juli	-	-	-	-	-	-	-	0
Agustus	-	-	-	-	1	-	3	4
September	-	1	-	-	-	-	-	1
Oktober	1	1	3	1	1	1	-	8
November	-	-	-	-	-	-	2	2
Desember	-	-	-	-	-	-	-	0
Jumlah	1	2	7	2	2	1	5	20

Sumber: Diolah dari Kementerian Luar Negeri (2015)

**Tabel 3.9 Pertemuan Presiden RI dengan Pejabat Setingkat Kepala Negara/
Kepala Pemerintahan di Luar Negeri Tahun 2014**

Bulan	Amerika	Eropa	Asia	Pasifik	Afrika	Australia	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Januari	-	-	-	-	-	-	0
Februari	-	-	-	-	-	-	0
Maret	-	-	-	-	-	-	0
April	-	-	-	-	-	-	0
Mei	-	-	1	-	-	-	1
Juni	-	-	-	3	-	-	3
Juli	-	-	-	-	-	-	0
Agustus	-	-	1	-	-	-	1
September	-	1	1	-	-	-	2
Oktober	-	-	-	-	-	-	0
November	1	5	6	1	-	1	14
Desember	-	-	1	-	-	-	1
Jumlah	1	6	10	4	0	1	22

Sumber: Diolah dari Kementerian Luar Negeri (2015)

Tabel 3.10 Pertemuan Wakil Presiden RI dengan Mitra Negara Sahabat dan Lembaga Internasional di Dalam dan Luar Negeri Tahun 2014

Bulan	Ame-rika	Eropa	Asia	Aus-tralia	Pasi-fik	Afrika	Organi-sasi Interna-sional	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Januari	-	-	-	-	-	-	-	0
Februari	-	-	-	-	-	-	-	0
Maret	-	2	-	-	-	1	-	3
April	-	-	-	-	-	-	-	0
Mei	-	-	-	-	-	-	-	0
Juni	-	-	-	-	-	-	-	0
Juli	-	-	-	-	-	-	-	0
Agustus	-	-	-	-	-	-	-	0
September	-	-	1	-	-	-	-	1
Oktober	-	2	5	-	-	-	-	7
November	-	-	-	-	-	1	-	1
Desember	-	-	-	-	-	-	-	0
Jumlah	0	4	6	0	0	2	0	12

Sumber: Diolah dari Kementerian Luar Negeri (2015)

Tabel 3.11 Pertemuan Menteri Luar Negeri dengan Menteri Luar Negeri dan Pejabat Setingkat Menteri Negara Sahabat di Dalam Negeri 2014

Bulan	Ame-rika	Eropa	Asia	Aus-tralia	Pasi-fik	Afrika	Organi-sasi Interna-sional	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Januari	-	1	-	-	3	-	-	4
Februari	1	-	5	-	-	-	-	6
Maret	-	-	4	-	-	2	-	6
April	-	-	-	-	-	-	-	0
Mei	-	1	1	-	-	-	-	2
Juni	-	-	-	-	-	-	-	0
Juli	-	-	1	-	-	-	-	1
Agustus	2	1	7	1	-	-	-	11
September	-	-	-	-	-	-	-	0
Oktober	-	-	5	-	2	-	-	7
November	-	1	2	-	-	-	-	3
Desember	-	-	1	-	-	-	-	1
Jumlah	3	4	26	1	5	2	0	41

Sumber: Diolah dari Kementerian Luar Negeri (2015)

Tabel 3.12 Pertemuan Menteri Luar Negeri dengan Menteri Luar Negeri dan Pejabat Setingkat Menteri Negara Sahabat di Luar Negeri 2014

Bulan	Amerika	Eropa	Asia	Pasifik	Afrika	Australia	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Januari	-	2	-	-	-	-	2
Februari	-	-	-	-	-	-	0
Maret	-	1	-	-	-	-	1
April	1	1	2	1	-	-	5
Mei	-	-	-	-	-	-	0
Juni	-	-	-	-	-	-	0
Juli	-	-	-	-	-	-	0
Agustus	-	-	-	-	1	-	1
September	-	-	-	-	-	1	3
Oktober	-	-	-	-	-	-	0
November	1	-	2	1	2	-	6
Desember	1	-	-	-	-	-	1
Jumlah	3	6	4	2	3	1	19

Sumber: Diolah dari Kementerian Luar Negeri (2015)

3.3. Pemerintah Daerah

Sejak era otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki peran lebih besar sebagai cabang struktural yang melaksanakan sebagian agenda-agenda yang disusun oleh pemerintah pusat. Selain karena alasan geografis, pentingnya desentralisasi juga karena didorong adanya keterbatasan birokrasi pemerintah sendiri (Toha, 2002:15). Pandangan ini senada dengan oleh Sisk (2002:28), yang menempatkan desentralisasi sebagai prinsip dimana keputusan yang menyangkut masyarakat sebisa mungkin dibuat oleh pejabat yang tingkatnya paling dekat dengan rakyat.

Desentralisasi dalam wujud otonomi daerah dianggap dapat menjawab salah satu prasyarat penting dalam demokrasi, yaitu adanya partisipasi rakyat. Sebagaimana dikemukakan Syarif Hidayat (2002 dalam Ibrahim, 2008:123), dari perspektif *state-society relation*, dapat dikatakan bahwa salah satu tujuan utama dari otonomi daerah adalah membuka akses yang lebih besar kepada masyarakat sipil

(*civil society*) untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaannya.

Luas wilayah administratif berpengaruh terhadap efektifitas desentralisasi. Wilayah yang terlalu luas akan menyulitkan pengelolaan pemerintahan daerah. Masyarakat juga akan terhambat dalam mengakses layanan publik dan berpartisipasi. Hambatan tersebut yang mungkin membuat banyak pemerintah daerah melakukan pemekaran, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Pada awal kemerdekaan, Indonesia terdiri atas 8 provinsi, yang kemudian berubah menjadi 16 wilayah pada masa Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950). Setelah kembali dalam bentuk NKRI, Indonesia terdiri dari 11 daerah provinsi. Kondisi ini terus berkembang hingga pada akhir tahun 1974, Indonesia terdiri dari 26 provinsi. Integrasi Timor-Timur ke dalam NKRI pada tahun 1975 menambah jumlah provinsi hingga menjadi 27. Kondisi ini bertahan hampir selama seperempat abad sebelum akhirnya berkurang menjadi 26 Provinsi karena Timor Timur memisahkan diri dari NKRI pada tahun 1999.

Pada penghujung tahun 1999, terbentuk Provinsi Maluku Utara yang merupakan pemekaran dari Provinsi Maluku. Dengan demikian, jumlah provinsi sampai akhir tahun 1999 tetap sebanyak 27 provinsi. Selama rentang waktu empat tahun antara tahun 2000-2004 terdapat 6 provinsi baru yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat, sehingga jumlah provinsi di Indonesia menjadi 33 provinsi. Pada tanggal 16 November 2012 disahkan undang-undang tentang pemekaran Provinsi Kalimantan Utara, yang sebelumnya merupakan wilayah Provinsi Kalimantan Timur, sehingga provinsi di Indonesia berjumlah 34.

Bukan hanya pada tingkat provinsi, jumlah kabupaten/kota terus bertambah untuk merespon otonomi daerah (Tabel 3.13). Peningkatan jumlah kabupaten/kota merupakan akibat pemekaran wilayah kabupaten/kota yang terbanyak terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara dari 10 kabupaten pada tahun

2012 menjadi 15 kabupaten pada tahun 2015. Selain menetapkan berdirinya Provinsi Kalimantan Utara, tanggal 17 November 2012 juga menjadi hari lahir bagi empat kabupaten baru, yaitu Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat.

Pada Tanggal 11 Januari 2013 disahkan Undang-Undang tentang pembentukan 7 kabupaten baru, diantaranya kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Malaka di Provinsi NTT, Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat, Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pemukal Abab Lematang Ilir (PALI) di Provinsi Sumatera Selatan, dan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara. Tambahan tersebut membuat jumlah Kabupaten yang pada tahun 2012 berjumlah 403 menjadi 410 pada tahun 2013.

Untuk mendukung otonomi daerah pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjadi dasar penting penjabaran otonomi daerah dari sisi administrasi keuangan. Regulasi tersebut digantikan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 seiring dengan perubahan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah, postur anggaran ditetapkan dalam bentuk Anggaran Penerimaan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD). Postur anggaran pemerintah daerah berdasarkan penerimaan, pengeluaran, serta jenis pengeluaran ditampilkan dalam Tabel 3.14, 3.15, 3.16, dan 3.17.

Keberhasilan dalam pengelolaan daerah sangat tergantung pada kebijakan-kebijakan yang dihasilkan pemerintah daerah. Dalam kerangka tersebut, Peraturan Daerah (Perda) merupakan konsekuensi logis dari wewenang daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Ryaas Rasyid, 2005 dalam

Ibrahim, 2008:126). Meskipun kewenangan membuat Perda ada pada masing-masing daerah, namun tetap ada batasan dalam pelaksanaannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 136 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan: "Perda sebagaimana ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi." Jika melanggar ketentuan tersebut, maka Perda dapat dibatalkan atau diminta pembatalan.

Terdapat dua jalur pengawasan Perda agar tetap sesuai dengan kepentingan umum dan/atau perundang-undangan yang lebih tinggi. Pertama, adalah pengawasan melalui jalur eksekutif (*executive review*), dimana pengawasan Perda dilakukan oleh presiden melalui menteri terkait atau gubernur. Kedua adalah pengawasan melalui jalur yudikatif (*judicial review*) yang dapat diajukan kepada Mahkamah Agung (MA) oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk menguji kesesuaian Perda terhadap perundang-undangan yang lebih tinggi (Ibrahim, 2008: 127-128). Sampai dengan tahun 2016 terdapat 1.733 Perda/Perkada kabupaten/kota yang dicabut/direvisi oleh Menteri Dalam Negeri, dan sebanyak 1.241 Perda/Perkada kabupaten/kota yang dicabut/direvisi oleh Gubernur (Tabel 3.18)

Tabel 3.13 Jumlah Kabupaten dan Kota menurut Provinsi Tahun 2013 – 2016

Provinsi	2013		2014		2015		2016	
	Kab	Kota	Kab	Kota	Kab	Kota	Kab	Kota
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	18	5	18	5	18	5	18	5
Sumatera Utara	25	8	25	8	25	8	25	8
Sumatera Barat	12	7	12	7	12	7	12	7
Riau	10	2	10	2	10	2	10	2
Jambi	9	2	9	2	9	2	9	2
Sumatera Selatan	13	4	13	4	13	4	13	4
Bengkulu	9	1	9	1	9	1	9	1
Lampung	13	2	13	2	13	2	13	2
Kep. Bangka Belitung	6	1	6	1	6	1	6	1
Kepulauan Riau	5	2	5	2	5	2	5	2
DKI Jakarta	1	5	1	5	1	5	1	5
Jawa Barat	18	9	18	9	18	9	18	9
Jawa Tengah	29	6	29	6	29	6	29	6
DI Yogyakarta	4	1	4	1	4	1	4	1
Jawa Timur	29	9	29	9	29	9	29	9
Banten	4	4	4	4	4	4	4	4
Bali	8	1	8	1	8	1	8	1
Nusa Tenggara Barat	8	2	8	2	8	2	8	2
Nusa Tenggara Timur	21	1	21	1	21	1	21	1
Kalimantan Barat	12	2	12	2	12	2	12	2
Kalimantan Tengah	13	1	13	1	13	1	13	1
Kalimantan Selatan	11	2	11	2	11	2	11	2
Kalimantan Timur	7	3	7	3	7	3	7	3
Kalimantan Utara*	4	1	4	1	4	1	4	1
Sulawesi Utara	11	4	11	4	11	4	11	4
Sulawesi Tengah	12	1	12	1	12	1	12	1
Sulawesi Selatan	21	3	21	3	21	3	21	3
Sulawesi Tenggara	12	2	15	2	15	2	15	2
Gorontalo	5	1	5	1	5	1	5	1
Sulawesi Barat	6	0	6	0	6	0	6	0
Maluku	9	2	9	2	9	2	9	2
Maluku Utara	8	2	8	2	8	2	8	2
Papua Barat	12	1	12	1	12	1	12	1
Papua	28	1	28	1	28	1	28	1
Indonesia	413	98	416	98	416	98	416	98

Sumber: Kementerian Dalam Negeri (2015)

Tabel 3.14 Realisasi Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2014 (juta rupiah)

Provinsi	Penerimaan			Pengeluaran		
	Pendapatan	Pembiayaan	Jumlah	Belanja	Pembiayaan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A c e h	11.164.408	2.203.620	13.368.028	13.368.028	0	13.368.028
Sumut	8.488.644	37.657	8.526.301	8.526.301	0	8.526.301
Sumbar	3.497.297	225.000	3.722.297	3.608.889	113.408	3.722.297
Riau	7.126.649	1.150.102	8.276.751	8.276.751	0	8.276.751
Jambi	2.981.991	283.338	3.265.329	3.265.329	0	3.265.329
Sumsel	7.136.876	280.690	7.417.566	6.548.054	869.512	7.417.566
Bengkulu	1.805.516	103.661	1.909.177	1.896.632	12.545	1.909.177
Lampung	4.298.707	25.998	4.324.705	4.318.205	6.500	4.324.705
Babel	1.755.460	260.399	2.015.859	2.015.859	0	2.015.859
Kepri	2.970.687	524.313	3.495.000	3.460.000	35.000	3.495.000
DKI Jakarta	64.715.735	7.284.400	72.000.135	64.882.747	7.117.388	72.000.135
Jawa Barat	19.907.973	1.588.817	21.496.790	21.194.365	302.425	21.496.790
Jawa Tengah	13.737.158	300.000	14.037.158	13.997.158	40.000	14.037.158
D I Y	3.100.198	280.822	3.381.020	3.330.070	50.950	3.381.020
Jawa Timur	18.799.577	813.991	19.613.568	18.796.935	816.633	19.613.568
Banten	6.878.072	759.418	7.637.490	7.349.402	288.088	7.637.490
Bali	3.958.173	751.494	4.709.667	4.489.667	220.000	4.709.667
N T B	2.863.555	10.650	2.874.205	2.834.205	40.000	2.874.205
N T T	2.720.974	97.957	2.818.931	2.738.061	80.870	2.818.931
Kalbar	3.729.897	100.000	3.829.897	3.754.897	75.000	3.829.897
Kalteng	3.041.907	234.500	3.276.407	3.218.907	57.500	3.276.407
Kalsel	4.701.326	655.000	5.356.326	5.266.326	90.000	5.356.326
Kaltim	12.130.000	1.800.000	13.930.000	13.805.000	125.000	13.930.000
Sulut	2.329.336	148.283	2.477.619	2.452.619	25.000	2.477.619
Sulteng	2.379.648	67.536	2.447.184	2.440.484	6.700	2.447.184
Sulsel	5.593.933	296.445	5.890.378	5.838.878	51.500	5.890.378
Sultra	2.055.647	180.608	2.236.255	2.186.170	50.085	2.236.255
Gorontalo	1.203.082	101.576	1.304.658	1.294.658	10.000	1.304.658
Sulbar	1.226.173	81.067	1.307.240	1.305.240	2.000	1.307.240
Maluku	1.839.703	87.016	1.926.719	1.906.633	20.086	1.926.719
Malut	1.619.653	30.000	1.649.653	1.567.153	82.500	1.649.653
Papua Barat	5.270.316	649.880	5.920.196	5.870.210	49.986	5.920.196
Papua	10.489.109	825.969	11.315.078	11.205.078	110.000	11.315.078
T o t a l	245.517.380	22.240.207	267.757.587	257.008.911	10.748.676	267.757.587

Sumber: BPS (2015)

**Tabel 3.15 Realisasi Penerimaan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia
Menurut Jenis Penerimaan Tahun 2012-2015 (milyar rupiah)**

No	Jenis Penerimaan Kind of Reciept	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(6)
A.	PENDAPATAN DAERAH	186.010,40	205.780,28	245.517,38	264.056.789.650
1	Pendapatan Asli Daerah	86.541,91	101.596,40	120.376,28	136.355.998.144
1.1	Pajak Daerah	72.996,68	86.979,67	103.490,38	120.326.064.477
1.2	Retribusi Daerah	2.645,68	1.267,84	2.714,98	1.731.839.091
1.3	Hasil Perusahaan milik daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	2.642,21	2.837,92	3.119,21	3.485.394.400
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	8.257,34	10.510,96	11.051,71	10.812.700.176
2	Dana Perimbangan	61.998,34	64.834,19	77.474,77	73.294.422.494
2.1	Bagi Hasil Pajak	21.314,54	17.781,42	26.358,76	21.500.061.188
2.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	11.969,46	14.299,51	15.154,36	13.426.024.074
2.3	Dana Alokasi Umum	27.381,82	30.977,87	34.101,38	35.971.973.787
2.4	Dana Alokasi Khusus	1.332,53	1.775,39	1.860,27	2.396.363.445
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	37.470,14	39.349,69	47.666,33	54.406.369.012
B	PEMBIAYAAN DAERAH	26.442,57	31.556,20	22.240,21	23.661.436.136
	JUMLAH	160.504,44	212.452,97	237.336,48	287.718.225.786

Sumber: BPS (2015)

Tabel 3.16 Realisasi Pendapatan Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2011 – 2014 (milyar rupiah)

Provinsi	2011	2012	2013	2014*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	7.610,32	9.180,14	10.671,83	11.164,41
Sumatera Utara	4.958,48	7.201,84	7.397,99	8.488,64
Sumatera Barat	2.071,16	2.922,58	3.147,84	3.497,30
Riau	5.440,44	6.847,32	6.994,65	7.126,65
Jambi	2.078,81	2.654,69	2.886,31	2.981,99
Sumatra Selatan	3.963,98	5.223,88	5.468,14	7.136,88
Bengkulu	1.166,98	1.562,53	1.696,37	1.805,52
Lampung	2.527,99	3.742,00	3.901,95	4.298,71
Bangka Belitung	1.193,50	1.384,94	1.529,11	1.755,46
Kepulauan Riau	1.876,88	2.473,41	2.843,72	2.970,69
DKI Jakarta	28.297,36	35.379,18	39.517,54	64.715,73
Jawa Barat	11.053,86	16.878,13	19.237,61	19.907,97
Jawa Tengah	7.547,67	11.694,48	13.343,36	13.737,16
D I Yogyakarta	1.604,91	2.171,73	2.583,06	3.100,20
Jawa Timur	11.493,38	15.543,04	17.372,77	18.799,58
Banten	3.755,61	5.413,71	6.230,23	6.878,07
Bali	2.662,08	3.633,13	4.109,38	3.958,17
Nusa Tenggara Barat	1.689,35	2.242,82	2.379,59	2.863,55
Nusa Tenggara Timur	1.324,47	2.241,54	2.393,07	2.720,97
Kalimantan Barat	2.202,22	2.932,91	3.262,31	3.729,90
Kalimantan Tengah	1.921,94	2.514,03	2.809,10	3.041,91
Kalimantan Selatan	3.148,04	4.381,61	4.350,81	4.701,33
Kalimantan Timur	9.817,10	11.886,47	11.631,70	12.130,00
Sulawesi Utara	1.365,71	1.834,91	2.062,08	2.329,34
Sulawesi Tengah	1.410,59	1.962,39	2.132,94	2.379,65
Sulawesi Selatan	3.110,57	4.433,96	4.867,59	5.593,93
Sulawesi Tenggara	1.288,98	1.811,98	1.972,56	2.055,65
Gorontalo	697,58	933,17	1.052,63	1.203,08
Sulawesi Barat	718,87	959,03	1.073,86	1.226,17
Maluku	1.138,19	1.436,65	1.545,46	1.839,70
Maluku Utara	936,79	1.196,75	1.315,90	1.619,65
Papua Barat	3.699,88	3.873,39	5.637,70	5.270,32
Papua	6.227,55	7.462,04	8.361,14	10.489,11
T o t a l	140.001,24	186.010,40	205.780,28	245.517,38

Sumber: BPS (2015)

Tabel 3.17 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2011 – 2014 (milyar rupiah)

Provinsi	2011	2012	2013	2014*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	802,84	901,72	1.325,44	1.312,37
Sumatera Utara	3.578,46	4.052,10	4.091,29	4.944,50
Sumatera Barat	1.147,30	1.225,47	1.366,18	1.568,56
Riau	2.210,13	2.588,69	4.091,29	2.840,01
Jambi	984,23	995,82	1.063,92	973,07
Sumatra Selatan	1.849,12	2.001,74	2.021,70	2.482,13
Bengkulu	440,93	483,77	525,21	532,94
Lampung	1.395,68	1.687,70	1.771,30	2.005,25
Bangka Belitung	459,21	438,37	495,80	494,20
Kepulauan Riau	620,90	723,05	907,98	875,91
DKI Jakarta	17.825,99	22.040,80	26.852,19	39.559,41
Jawa Barat	8.502,64	9.982,92	12.360,11	13.037,56
Jawa Tengah	5.564,23	6.629,31	8.212,80	8.347,87
D I Yogyakarta	867,11	1.004,06	1.216,10	1.233,74
Jawa Timur	8.898,62	9.725,63	11.596,38	12.503,56
Banten	2.895,57	3.395,88	4.118,55	4.675,13
Bali	1.723,62	2.042,09	2.529,98	2.303,81
Nusa Tenggara Barat	741,29	745,98	858,45	1.143,74
Nusa Tenggara Timur	391,83	459,66	528,83	695,42
Kalimantan Barat	1.080,46	1.164,43	1.347,40	1.656,66
Kalimantan Tengah	815,24	945,36	1.093,82	1.244,42
Kalimantan Selatan	1.868,60	2.517,52	2.502,28	2.975,59
Kalimantan Timur	4.501,21	5.409,95	5.885,26	5.519,83
Sulawesi Utara	535,09	633,65	789,63	944,59
Sulawesi Tengah	519,97	605,82	662,23	769,71
Sulawesi Selatan	1.959,52	2.198,78	2.560,05	3.107,04
Sulawesi Tenggara	346,17	439,18	514,86	529,18
Gorontalo	158,08	180,04	214,68	274,28
Sulawesi Barat	114,31	140,40	154,13	215,35
Maluku	221,88	267,50	304,36	439,59
Maluku Utara	84,81	115,91	165,89	204,90
Papua Barat	152,16	175,45	236,28	203,78
Papua	363,10	623,16	597,71	762,15
T o t a l	73.620,31	86.541,91	102.962,06	120.376,28

Sumber: BPS (2015)

Tabel 3.18 Perda/Perkada Kabupaten/Kota Yang Dicabut/Direvisi Oleh Menteri Dalam Negeri Atau Gubernur Tahun 2016

Provinsi	Dibatalkan Oleh Menteri Dalam Negeri	Dibatalkan Oleh Gubernur
(1)	(2)	(3)
Aceh	65	0
Sumatera Utara	132	0
Riau	52	31
Kepulauan Riau	27	25
Sumatera Barat	59	77
Sumatera Selatan	59	20
Kep. Bangka Belitung	42	41
Jambi	42	42
Bengkulu	32	20
Lampung	39	77
Jawa Barat	135	29
Banten	35	41
Kalimantan Selatan	66	70
Kalimantan Tengah	72	0
Kalimantan Barat	68	34
Kalimantan Timur	65	0
Kalimantan Utara	3	16
DKI Jakarta	2	0
D. I. Yogyakarta	42	26
Jawa Tengah	122	83
Jawa Timur	141	93
Sulawesi Utara	10	33
Sulawesi Selatan	120	21
Sulawesi Tengah	27	21
Sulawesi Tenggara	48	45
Gorontalo	4	7
Papua	33	33
Bali	22	70
Nusa Tenggara Barat	52	62
Nusa Tenggara Timur	44	68
Maluku Utara	19	45
Maluku	24	83
Papua Barat	18	28
Sulawesi Barat	12	0
Total	1.733	1.241

Sumber: Kementerian Dalam Negeri (2016)

3.4. Aparatur Negara

Usaha untuk meningkatkan kinerja aparatur negara, dilakukan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN & RB) dengan penyempurnaan dan pengembangan jabatan fungsional, pengembangan sistem penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil (PNS), serta pengembangan pola karir dalam jabatan struktural (Renstra KEMENPAN & RB 2010-2014:8). Langkah memperbanyak tenaga fungsional dan pengembangan sistem penilaian prestasi kerja dapat membantu membangun budaya organisasi yang lebih sehat. Dibandingkan dengan jabatan struktural, jumlah fungsional lebih banyak. Berbeda dengan tahun sebelumnya dimana jabatan fungsional umum memiliki jumlah yang lebih banyak, pada tahun 2016 fungsional tertentu sudah menjadi 50,90%, lebih banyak dari fungsional umum yang sebesar 39,33%. Berdasarkan jenis kelamin komposisi pegawai negeri sipil terdiri dari 51,2 persen laki-laki dan 48,8 persen perempuan. Proporsi jabatan struktural dan fungsional PNS Tahun 2013 ditampilkan pada Tabel 3.19.

Penataan dan distribusi sumber daya manusia aparatur negara juga mendapat perhatian yang besar. Pada 24 Agustus 2011 ditandatangani surat keputusan bersama (SKB) antara Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara untuk moratorium penerimaan PNS yang berlaku dari tanggal 1 September 2011 hingga 31 Desember 2012. Rekrutmen PNS baru diproyeksikan melalui analisis kebutuhan jabatan yang ketat serta berbasis kompetensi yang dibutuhkan organisasi. Beberapa kementerian juga mendorong pilihan pensiun dini untuk meningkatkan produktivitas. Pegawai Negeri terdiri dari tiga elemen, PNS, TNI, dan Polri. Distribusi usia PNS ditampilkan pada Tabel 3.20, dan distribusi pendidikan PNS ditampilkan pada Tabel 3.21. Jumlah personel dan kepangkatan Polri ditampilkan pada Tabel 3.22.

Tidak semua penyelenggara fungsi pemerintahan merupakan pegawai negeri sebagaimana dijumpai pada jabatan kepala desa. Berbeda dengan lurah yang

diangkat bupati/walikota, kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat dengan jabatan periodik selama lima tahun. Dewasa ini jabatan kepala desa/kelurahan bukan lagi menjadi dominasi laki-laki, tetapi juga perempuan. Kepala desa/kelurahan perempuan terbanyak terdapat di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah 780 orang (Tabel 3.22). Tabel 3.23, 3.24, dan 3.25 menyajikan karakteristik kepala desa/kelurahan dan sekretaris desa/kelurahan berdasarkan usia dan pendidikan.

Tabel 3.19 Jumlah PNS Menurut Proporsi Jabatan Struktural dan Fungsional Tahun 2016

Jabatan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah
	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Fungsional Umum	1.092.317	24,07	692.523	15,26	1.784.840
Fungsional Tertentu	918.251	20,23	1.391.782	30,67	2.310.033
Struktural	311.381	6,80	131.900	2,96	443.281
Eselon I	1.344	0,30	497	16,41	1.841
Eselon II	23.913	5,39	4.831	12,84	28.744
Eselon III	77.542	17,49	20.275	19,58	97.817
Eselon IV	208.582	4,60	106.297	32,38	314.879
Total	2.321.949	51,17	2.216.205	48,83	4.538.154

Sumber: Diolah dari Badan Kepegawaian Negara (2016)

Tabel 3.20 Jumlah PNS menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2016

Kelompok Umur	Pria	Persen	Wanita	Persen	Jumlah	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
18-20	1.176	0,03	703	0,02	1.879	0,04
21-25	20.753	0,46	17.485	0,39	38.238	0,84
26-30	93.818	2,07	136.166	3,00	229.984	5,07
31-35	257.871	5,68	336.951	7,43	594.822	13,11
36-40	303.391	6,69	341.349	7,52	644.740	14,21
41-45	315.039	6,94	308.911	6,81	623.950	13,75
46-50	445.602	9,82	404.531	8,91	850.133	18,73
51-55	512.525	11,29	411.387	9,07	923.912	20,36
56-60	333.613	7,35	236.192	5,20	569.805	12,56
61-65	33.724	0,74	24.614	0,54	58.338	1,29
65+	1.622	0,04	531	0,01	2.153	0,05
Total	2.319.134	51,11	2.218.820	48,89	4.537.954	100

Sumber: Badan Kepegawaian Negara (2016)

Tabel 3.21 Jumlah PNS menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2016

Tingkat Pendidikan	Pria	Persen	Wanita	Persen	Jumlah	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SD	46.676	1,03	3.401	0,07	50.077	1,10
SLTP	69.832	1,54	10.164	0,22	79.996	1,76
SLTA	691.008	15,23	460.519	10,15	1.151.527	25,37
Diploma	321.171	7,08	530.895	11,70	852.066	18,78
S1	1.005.444	22,16	1.103.874	24,32	2.109.318	46,48
S2	174.346	3,84	106.199	2,34	280.545	6,18
S3	10.857	0,24	3.768	0,08	14.625	0,32
Total	2.319.334	51,11	2.135.433	48,89	4.538.154	100,00

Sumber: Badan Kepegawaian Negara (2016)

Tabel 3.22 Jumlah Kepala Desa/Kelurahan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2014

Provinsi	Kepala Desa/ Lurah			Sekretaris Desa/ Kelurahan		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	6.212	32	6.244	5.456	101	5.557
Sumatera Utara	5.458	319	5.777	4.640	971	5.611
Sumatera Barat	1.045	66	1.111	688	317	1.005
Riau	1.635	43	1.678	1.524	124	1.648
Jambi	1.467	47	1.514	1.260	92	1.352
Sumatera Selatan	2.854	182	3.036	2.541	309	2.850
Bengkulu	1.413	69	1.482	1.274	130	1.404
Lampung	2.422	142	2.564	2.098	131	2.229
Bangka Belitung	338	19	357	235	80	315
Kepulauan Riau	372	24	396	224	37	261
DKI Jakarta	207	60	267	204	56	260
Jawa Barat	5.390	367	5.757	4.753	382	5.135
Jawa Tengah	7.604	703	8.307	5.951	781	6.732
DI Yogyakarta	376	36	412	331	56	387
Jawa Timur	7.343	780	8.123	6.011	572	6.583
Banten	1.221	57	1.278	1.416	83	1.499
Bali	671	14	685	623	60	683
Nusa Tenggara Barat	1.117	14	1.131	966	37	1.003
Nusa Tenggara Timur	2.975	127	3.102	2.342	242	2.584
Kalimantan Barat	1.976	62	2.038	1.578	152	1.730
Kalimantan Tengah	1.452	71	1.523	1.287	108	1.395
Kalimantan Selatan	1.894	70	1.964	1.485	134	1.619
Kalimantan Timur	952	39	991	808	110	918
kalimantan Utara	457	12	469	413	29	442
Sulawesi Utara	1.511	313	1.824	1.283	416	1.699
Sulawesi Tengah	1.835	84	1.919	1.718	151	1.869
Sulawesi Selatan	2.687	307	2.994	2.012	598	2.610
Sulawesi Tenggara	1.898	149	2.047	1.793	262	2.055
Gorontalo	629	86	715	356	273	629
Sulawesi Barat	609	17	626	510	59	569
Maluku	842	39	881	906	71	977
Maluku Utara	1.131	34	1.165	1.012	85	1.097
Papua Barat	1.517	26	1.543	1.405	68	1.473
Papua	4.741	75	4.816	4.521	79	4.600
INDONESIA	74.251	4.485	78.736	63.624	7.156	70.780

Sumber: Potensi Desa, BPS (2014)

Tabel 3.23 Jumlah Desa Menurut Kelompok Umur Kepala Desa Tahun 2014

Provinsi	Kepala Desa/ Lurah						Sekretaris Desa/ Kelurahan					
	≤24	25-34	35-44	45-54	≥55	Jumlah	≤24	25-34	35-44	45-54	≥55	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	4	605	2459	2363	813	6244	23	852	2400	1960	322	5557
Sumut	4	671	2445	2246	411	5777	87	1245	2382	1682	215	5611
Sumbar	0	80	314	466	251	1111	6	147	339	438	75	1005
Riau	0	241	682	600	155	1678	24	405	688	467	64	1648
Jambi	1	162	701	571	79	1514	25	296	589	405	37	1352
Sumsel	3	348	1414	1071	200	3036	36	552	1164	950	148	2850
Bengkulu	0	191	712	505	74	1482	16	240	642	435	71	1404
Lampung	2	212	1117	1042	191	2564	22	318	897	835	157	2229
Babel	1	58	146	127	25	357	3	61	142	94	15	315
Kepri	0	61	158	149	28	396	6	68	112	71	4	261
DKI Jakarta	0	13	88	154	12	267	0	25	54	167	14	260
Jawa Barat	1	362	1904	2485	1005	5757	28	502	1832	2335	438	5135
Jawa Tengah	4	784	2847	3478	1194	8307	3	207	1751	3694	1077	6732
D I Y	0	21	110	184	97	412	0	9	86	215	77	387
Jawa Timur	1	768	3201	3469	684	8123	9	421	2044	3391	718	6583
Banten	0	95	500	572	111	1278	11	222	598	595	73	1499
Bali	0	52	228	331	74	685	0	29	178	427	49	683
N T B	2	116	438	473	102	1131	2	103	350	499	49	1003
N T T	0	260	1039	1386	417	3102	9	209	969	1251	146	2584
Kalbar	3	297	993	671	74	2038	25	352	692	586	75	1730
Kalteng	2	199	662	585	75	1523	34	219	557	495	90	1395
Kalsel	4	227	858	731	144	1964	28	257	704	562	68	1619
Kaltim	2	104	346	439	100	991	9	163	385	314	47	918
Kaltara	0	68	185	154	62	469	6	78	217	124	17	442
Sulut	1	126	631	758	308	1824	12	246	713	610	118	1699
Sulteng	2	143	743	779	252	1919	20	273	861	642	73	1869
Sulsel	0	282	1155	1243	314	2994	17	424	1134	930	105	2610
Sutra	2	196	865	789	195	2047	36	343	905	689	82	2055
Gorontalo	0	80	273	254	108	715	16	150	258	187	18	629
Sulbar	0	69	258	224	75	626	3	105	285	164	12	569
Maluku	1	61	263	321	235	881	14	159	407	291	106	977
Maluku Utara	1	120	474	411	159	1165	1	160	535	341	60	1097
Papua Barat	8	180	524	535	296	1543	37	377	657	335	67	1473
Papua	27	553	2108	1620	508	4816	110	1284	2144	914	148	4600
INDONESIA	76	7805	30841	31186	8828	78736	678	10501	27671	27095	4835	70780

Sumber: Potensi Desa, BPS (2014)

Tabel. 3.24 Jumlah Kepala Desa/Kelurahan Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2014

Provinsi	Tidak Pernah Sekolah	Tidak Tamat SD	Tamat Sekolah				Perguruan Tinggi	Jumlah
			SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMU/ Sederajat	Akademik		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	17	64	146	1.468	3.878	132	539	6.244
Sumut	7	23	60	769	3.824	154	940	5.777
Sumbar	0	1	0	46	672	71	321	1.111
Riau	3	2	12	185	1.041	50	385	1.678
Jambi	0	1	7	191	1.013	58	244	1.514
Sumsel	5	5	6	473	1.980	63	504	3.036
Bengkulu	6	1	2	198	1.051	36	188	1.482
Lampung	0	0	2	303	1.816	63	380	2.564
Babel	1	0	0	38	247	12	59	357
Kepri	0	1	4	49	202	17	123	396
DKI Jakarta	0	0	0	0	0	1	266	267
Jawa Barat	7	3	6	820	3.268	203	1450	5.757
Jawa Tengah	3	0	9	1333	4.493	470	1999	8.307
D I Y	0	0	0	22	188	33	169	412
Jawa Timur	0	0	1	801	4.641	197	2483	8.123
Banten	4	1	2	160	666	20	425	1.278
Bali	0	0	0	20	342	30	293	685
N T B	1	1	2	53	632	50	392	1.131
N T T	5	19	49	486	2.004	111	428	3.102
Kalbar	5	7	15	297	1.447	49	218	2.038
Kalteng	2	3	29	304	967	38	180	1.523
Kalsel	3	6	23	401	1.223	46	262	1.964
Kaltim	4	11	21	144	511	29	271	991
Kaltara	3	20	49	116	223	10	48	469
Sulut	3	9	13	196	1.109	66	428	1.824
Sulteng	1	5	4	211	1.356	37	305	1.919
Sulsel	3	0	1	92	1.372	107	1419	2.994
Sutra	3	5	4	107	1.327	52	549	2.047
Gorontalo	0	0	1	62	508	14	130	715
Sulbar	0	0	2	46	371	20	187	626
Maluku	3	18	35	185	478	28	134	881
Maluku Utara	4	10	32	209	748	19	143	1.165
Papua Barat	94	219	373	372	364	8	113	1.543
Papua	642	544	1.183	1.083	1.175	26	163	4.816
INDONESIA	829	979	2.093	11.240	45.137	2.320	16.138	78.736

Sumber: Potensi Desa, BPS (2014)

Tabel. 3.25 Jumlah Sekretaris Desa/Kelurahan Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2014

Provinsi	Tidak Pernah Sekolah	Tidak Tamat SD	Tamat Sekolah				Perguruan Tinggi	Jumlah
			SD/ Sede-rajat	SMP/ Sede-rajat	SMU/ Sede-rajat	Aka- demi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	18	56	113	582	3.889	182	717	5.557
Sumut	11	57	109	460	4.017	160	797	5.611
Sumbar	3	0	1	18	626	68	289	1.005
Riau	1	6	17	102	1.086	81	355	1.648
Jambi	0	0	7	67	861	78	339	1.352
Sumsel	8	16	32	223	1.928	68	575	2.850
Bengkulu	5	8	13	112	993	32	241	1.404
Lampung	0	1	23	169	1.500	103	433	2.229
Babel	1	1	1	7	224	25	56	315
Kepri	1	1	0	18	138	17	86	261
DKI Jakarta	0	0	0	0	10	3	247	260
Jawa Barat	6	10	25	269	2.989	200	1.636	5.135
Jawa Tengah	2	7	63	448	3.987	320	1.905	6.732
D I Y	0	0	1	12	218	34	122	387
Jawa Timur	1	3	17	311	3.612	160	2.479	6.583
Banten	7	3	4	68	824	39	554	1.499
Bali	0	0	2	12	412	18	239	683
N T B	0	0	2	26	591	41	343	1.003
N T T	4	7	35	242	1.922	84	290	2.584
Kalbar	7	22	32	170	1.289	45	165	1.730
Kalteng	2	16	45	180	953	42	157	1.395
Kalsel	3	16	53	213	1.053	42	239	1.619
Kaltim	4	11	21	60	559	29	234	918
Kaltara	4	20	47	72	234	11	54	442
Sulut	3	9	11	91	1.091	57	437	1.699
Sulteng	0	2	10	67	1.372	35	383	1.869
Sulsel	11	3	7	43	1.199	95	1.252	2.610
Sutra	2	6	8	60	1.366	45	568	2.055
Gorontalo	0	0	2	31	431	12	153	629
Sulbar	1	0	2	18	374	18	156	569
Maluku	0	14	36	120	694	22	91	977
Maluku Utara	2	11	21	110	833	17	103	1.097
Papua Barat	8	65	147	290	800	21	142	1.473
Papua	155	272	858	1.193	1.942	42	138	4.600
INDONESIA	270	643	1.765	5.864	44.017	2.246	15.975	70.780

Sumber: Potensi Desa, BPS (2014)

3.5. Tata Kelola Pemerintahan

Dalam konfigurasi politik yang demokratis, pemerintah dituntut untuk melaksanakan kehendak-kehendak rakyat dengan cara merumuskan kebijakan yang demokratis dan bekerja secara proporsional (Ibrahim, 2009:8). Indonesia telah menempuh berbagai langkah untuk mewujudkan aparatur negara yang bersih dan berwibawa. Dari aspek regulasi didukung dengan pengesahan Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara yang berisi pengaturan agar struktur lembaga dapat efektif dan efisien. Demikian juga dengan disahkannya Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, serta Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pada bagian lain tuntutan akan pelayanan birokrasi yang semakin baik terus menjadi tantangan bagi pemerintah. Gairah tersebut paling kurang bisa dilihat dari laporan masyarakat tentang tindak pidana korupsi kepada KPK pada 2014 sebanyak 9.432 laporan yang berasal dari seluruh provinsi (Tabel 3.26). Laporan paling banyak berasal dari Provinsi DKI Jakarta dengan 1.157 laporan, dan Sumatera Utara dengan 815 laporan.

Laporan tentang potensi tindak pidana korupsi juga dilakukan oleh pejabat negara, dengan melaporkan gratifikasi yang mereka terima. Pada tahun 2014 mayoritas laporan berasal dari Provinsi DKI Jakarta dengan 4.025 laporan, dan Provinsi Jawa Barat dengan 1.266 laporan. Diluar provinsi tersebut jumlah laporan gratifikasi jumlahnya kecil, bahkan di sebelas provinsi tidak pernah ada laporan gratifikasi diterima KPK (Tabel 3.27). Diantara angka tersebut pelapor paling banyak berasal dari sektor BUMN/BUMD dengan 795 laporan dan Kementerian dengan 554 laporan (Tabel 3.28).

Berdasarkan jabatan pelaku, pada tahun 2014, korupsi paling banyak dilakukan oleh pihak swasta dengan 15 kasus dan Walikota/ Bupati dengan 12 kasus (Tabel 3.29). Sementara berdasarkan lembaga, jumlah terbanyak kasus

korupsi yang ditangani KPK adalah kementerian/lembaga dengan 26 kasus, kemudian Pemkab/Pemkot dengan 19 kasus (tabel 3.30)

Berdasarkan data Kejaksaan Agung, sepanjang tahun 2013 terdapat 1.923 kasus korupsi yang masuk tahap penuntutan di semua provinsi dengan jumlah penyelamatan kerugian negara sebesar Rp 350.911.800 dan USD 500.000 (Tabel 3.31). Dari jumlah tersebut, jumlah penuntutan terbanyak ada di Provinsi Jawa Tengah dengan 154 kasus. Jumlah penyelamatan kerugian terbanyak di Provinsi DKI Jakarta dengan Rp. 111.658.408.353.

Ukuran lain yang bisa digunakan untuk melihat keberhasilan pemerintah daerah adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang disusun oleh BPS. IPM diukur dari tiga indikator yaitu angka harapan hidup, persentase melek aksara orang dewasa dikombinasikan dengan angka partisipasi (kotor) sekolah bagi anak, serta *Gross Domestic Product* (GDP). Dalam konteks otonomi daerah, IPM dapat menjadi takaran keberhasilan pemerintahan daerah. Lebih lagi sejak kepala daerah dipilih secara langsung, komitmen-komitmen politik kepala daerah dapat diukur dengan membandingkan capaian IPM. Secara umum dampak otonomi daerah positif terhadap perkembangan IPM di tingkat provinsi. Hampir semua daerah mengalami kenaikan indeks setiap tahunnya (Tabel 3.32). Kondisi tersebut juga berkontribusi langsung terhadap IPM nasional yang juga mengalami kenaikan setiap tahun.

Pada tahun 2014 peringkat teratas IPM diraih oleh Provinsi DKI Jakarta (1), D.I Yogyakarta (2), Kalimantan Timur (3), Kepulauan Riau (4), Bali (5) dan Riau (6). Sebaliknya, Provinsi Papua (34), Papua Barat (33), Sulawesi Barat (32), NTT (31) dan NTB (30) adalah lima provinsi dengan IPM berada di peringkat paling bawah (Tabel 3.33).

Tabel 3.26 Jumlah Pengaduan Masyarakat tentang Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Provinsi Tahun 2009 – 2015

iProvinsi	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	140	100	90	87	136	353	120
Sumatera Utara	634	617	550	536	728	815	505
Riau	254	181	173	174	231	272	167
Kepulauan Riau	77	96	64	62	56	82	59
Sumatera Barat	136	135	102	142	125	125	84
Sumatera Selatan	344	262	262	308	327	439	357
Bangka Belitung	29	37	46	25	39	55	58
Jambi	176	141	144	161	132	153	128
Bengkulu	64	97	113	132	124	83	55
Lampung	145	121	143	101	150	163	117
Jawa barat	545	477	570	560	678	773	464
Banten	127	115	136	125	139	166	125
Kalimantan Selatan	131	110	69	76	103	124	100
Kalimantan Tengah	107	97	111	105	143	164	103
Kalimantan Barat	119	80	97	103	117	158	51
Kalimantan Timur	190	153	168	157	182	238	177
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	20	22
DKI Jakarta	1.422	1.295	1.196	1.164	1.269	1.157	790
D.I. Yogyakarta	62	57	91	83	83	138	86
Jawa Tengah	496	444	361	379	437	445	269
Jawa Timur	874	603	526	633	673	775	532
Sulawesi Utara	116	69	83	98	95	112	64
Sulawesi Selatan	179	214	196	166	164	209	153
Sulawesi Tengah	51	51	40	41	48	84	49
Sulawesi Tenggara	73	39	70	71	71	127	61
Gorontalo	55	41	42	44	23	48	21
Papua	101	77	85	75	89	118	67
Bali	82	77	88	73	76	101	69
Nusa Tenggara Barat	139	96	90	90	99	113	78
Nusa Tenggara Timur	110	115	112	103	91	181	103
Maluku Utara	39	46	68	53	27	27	20
Maluku	63	86	83	85	93	89	52
Papua Barat	28	54	56	45	35	38	32
Sulawesi Barat	37	45	24	43	18	17	84
Luar Negeri	8	6	4	3	-	16	6
Tidak Spesifik	93	31	239	241	-	1.454	541
Jumlah	7.246	6.265	6.292	6.344	6.801	9.432	5.694

Sumber: Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi 2015

**Tabel 3.27 Jumlah Laporan Gratifikasi Diterima KPK Tahun
2011-2015**

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	4	0	1	0	10
Sumatera Utara	11	8	3	9	14
Riau	3	0	0	15	3
Kepulauan Riau	1	1	5	6	5
Sumatera Barat	3	3	15	5	7
Sumatera Selatan	2	1	2	3	15
Kep. Bangka Belitung	2	0	0	2	5
Jambi	0	2	1	13	7
Bengkulu	4	0	0	6	2
Lampung	8	2	7	10	24
Jawa Barat	238	346	291	391	277
Banten	3	1	1	53	54
Kalimantan Selatan	0	0	3	5	10
Kalimantan Tengah	3	0	1	7	5
Kalimantan Barat	6	0	2	9	5
Kalimantan Timur	6	9	7	12	30
Kalimantan Utara	0	0	1	3	0
DKI Jakarta	1.006	729	970	1.320	670
D. I. Yogyakarta	5	0	15	15	121
Jawa Tengah	25	8	25	186	100
Jawa Timur	9	36	29	50	72
Sulawesi Utara	1	1	0	2	13
Sulawesi Selatan	22	2	2	22	40
Sulawesi Tengah	0	0	0	2	0
Sulawesi Tenggara	1	4	1	1	2
Gorontalo	2	0	2	1	4
Papua	2	0	0	16	2
Bali	3	3	6	30	38
Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	8
Nusa Tenggara Timur	2	0	0	12	11
Maluku Utara	1	0	0	2	1
Maluku	0	0	0	1	3
Papua Barat	0	0	0	0	0
Sulawesi Barat	0	1	1	3	1
Luar Negeri	-	-	-	12	14
Total	1.373	1.157	1.391	2.224	1.573

Sumber: Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi 2011 - 2014

**Tabel 3.28 Jumlah Laporan Gratifikasi yang Diterima KPK
Berdasarkan Lembaga Tahun 2012 – 2015**

Bidang	Instansi	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Legislatif	MPR / DPR	18	20	6	6
	DPRD	3	1	7	19
Eksekutif	DPD	1	0	2	0
	Kepresidenan	0	0	0	0
	Kementerian Sekretaris Negara	0	0	58	0
	Kementerian	0	182	554	446
	Kementerian Koordinator	4	3	2	4
	Departemen	74	0	0	0
	Kementerian Negara	0	3	4	4
	Setingkat kementerian	9	11	17	11
	LPNK	10	34	40	35
	Lembaga ekstrastruktural	44	32	17	2
	Pemda	75	98	276	156
	Yudikatif		3	5	381
Lembaga independen		23	21	65	69
BUMN / BUMD		894	981	795	805
Total		1.158	1.391	2.224	1.573

Sumber: Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi 2012 - 2015

Tabel 3.29 Jumlah Tindak Pidana Korupsi yang Ditangani KPK Berdasarkan Tingkat Jabatan Tahun 2006-2015

Jabatan	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
DPR dan DPRD	0	2	7	8	27	5	16	8	4	19
Kementerian / Lembaga	1	0	1	1	2	0	1	4	9	3
Duta Besar	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0
Komisioner	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Gubernur	2	0	2	2	1	0	0	2	2	4
Wali Kota/Bupati	3	7	5	5	4	4	4	3	12	4
Eselon I, II, III	15	10	22	14	12	15	8	7	2	7
Penegak Hukum	0	0	0	0	1	2	2	4	2*	3
Swasta	5	3	12	11	8	10	16	24	15	18
Lain-lain	1	2	4	4	9	3	3	7	8	5
Jumlah	29	27	55	45	65	39	50	59	52	63

*Pada 2014 hanya hakim

Sumber: Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi 2015

Tabel 3.30 Jumlah Tindak Pidana Korupsi Yang Ditangani KPK Berdasarkan Instansi Tahun 2006-2015

Instansi	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
DPR RI	0	0	7	10	7	2	6	2	2	3
Kementerian/ Lembaga	10	12	13	13	16	23	18	46	26	21
BUMN/BUMD	0	0	2	5	7	3	1	0	0	5
Komisi	4	2	2	0	2	1	0	0	0	0
Pemerintah Provinsi	9	2	5	4	0	3	13	4	11	18
Pemkab/Pemkot	4	8	18	5	8	7	10	18	19	10
Jumlah	27	24	47	37	40	39	48	70	58	57

Sumber: Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi 2015

**Tabel 3.31 Rekapitulasi Data Perkara Tindak Pidana Korupsi di
Kejaksaan Seluruh Indonesia Tahun 2013**

Satuan Kerja	Penye- lidikan	Penyi- dikan	Penuntutan		Penyelamatan Keuangan Negara
			Penyidikan Kejaksaan	Penyidikan Polri	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kejagung	95	85	59	31	Rp. 52.190.200.000,- dan USD 500.000
NAD	32	35	18	22	Rp. 2.926.988.356,-
Sumatera Utara	210	101	59	46	Rp. 2.802.884.000,-
Sumatera Barat	37	48	44	11	Rp. 482.309.747,-
Riau	39	28	52	48	Rp. 4.295.459.451,-
Jambi	38	64	27	16	Rp. 182.334.200,-
Sumatera Selatan	82	34	32	35	Rp. 2.879.096.689,-
Bengkulu	34	35	28	21	Rp. 2.410.941.188,-
Lampung	49	25	55	29	Rp. 5.298.197.821,-
DKI Jakarta	36	25	55	43	Rp. 111.685.408.353,-
Jawa Barat	99	82	90	38	Rp. 13.454.139.118,-
Jawa Tengah	111	132	106	48	Rp. 36.276.922.866,-
DI Yogyakarta	18	20	38	13	Rp. 2.111.394.590,-
Jawa Timur	128	119	56	35	Rp. 4.894.918.536,-
Bali	34	24	15	6	Rp. 1.000.000.000,-
NTB	28	28	23	20	Rp. 110.669.984,-
NTT	31	73	46	22	Rp. 2.026.841.410,-
Kalimantan Barat	49	25	19	10	Rp. 2.311.076.613,-
Kalimantan Tengah	32	42	22	34	Rp. 1.445.722.246,-
Kalimantan Selatan	27	56	28	25	Rp. 3.474.713.036,-
Kalimantan Timur	43	58	29	24	Rp. 5.707.851.700,-
Sulawesi Utara	33	36	19	19	Rp. 1.393.259.845,-
Sulawesi Tengah	43	55	38	20	Rp. 2.051.886.024,-
Sulawesi Tenggara	53	29	30	23	Rp. 5.455.641.200,-
Sulawesi Selatan	165	128	71	52	Rp. 99.873.093.162,-
Maluku	28	33	28	9	Rp. 2.085.919.819,-
Papua	22	13	59	0	Rp. 22.000.000.000,-
Banten	26	31	24	27	Rp. 1.161.421.210,-
Bangka Belitung	20	35	13	19	Rp. 863.497.228,-
Gorontalo	18	18	23	12	Rp. 6.063.353.668,-
Maluku Utara	16	38	20	4	Rp. 3.610.874.545,-
Kepulauan Riau	20	31	17	8	Rp. 574.983.610,-
Total	1.601	1.646	1.184	739	RP. 350.911.800.215,- dan USD 500.000

Sumber: Laporan Tahunan Kejaksaan RI (2013)

Tabel 3.32 Indeks Pembangunan Manusia (Metode Baru) 2010 – 2015

Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	-2	-3	-4	-5	-6	-7
Aceh	67.09	67.45	67.81	68.30	68.81	69.45
Sumut	67.09	67.34	67.74	68.36	68.87	69.51
Sumbar	67.25	67.81	68.36	68.91	69.36	69.98
Riau	68.65	68.90	69.15	69.91	70.33	70.84
Jambi	65.39	66.14	66.94	67.76	68.24	68.89
Sumsel	64.44	65.12	65.79	66.16	66.75	67.46
Bengkulu	65.35	65.96	66.61	67.50	68.06	68.59
Lampung	63.71	64.20	64.87	65.73	66.42	66.95
Babel	66.02	66.59	67.21	67.92	68.27	69.05
Kepri	71.13	71.61	72.36	73.02	73.40	73.75
DKI Jakarta	76.31	76.98	77.53	78.08	78.39	78.99
Jawa Barat	66.15	66.67	67.32	68.25	68.80	69.50
Jawa Tengah	66.08	66.64	67.21	68.02	68.78	69.49
D I Y	75.37	75.93	76.15	76.44	76.81	77.59
Jawa Timur	65.36	66.06	66.74	67.55	68.14	68.95
Banten	67.54	68.22	68.92	69.47	69.89	70.27
Bali	70.10	70.87	71.62	72.09	72.48	73.27
N T B	61.16	62.14	62.98	63.76	64.31	65.19
N T T	59.21	60.24	60.81	61.68	62.26	62.67
Kalbar	61.97	62.35	63.41	64.30	64.89	65.59
Kalteng	65.96	66.38	66.66	67.41	67.77	68.53
Kalsel	65.20	65.89	66.68	67.17	67.63	68.38
Kaltim	71.31	72.02	72.62	73.21	73.82	74.17
Kaltara	-	-	-	67.99	68.64	68.76
Sulut	67.83	68.31	69.04	69.49	69.96	70.39
Sulteng	63.29	64.27	65	65.79	66.43	66.76
Sulse	66.00	66.65	67.26	67.92	68.49	69.15
Sutra	65.99	66.52	67.07	67.55	68.07	68.75
Gorontalo	62.65	63.48	64.16	64.70	65.17	65.86
Sulbar	59.74	60.63	61.01	61.53	62.24	62.96
Maluku	64.27	64.75	65.43	66.09	66.74	67.05
Maluku Utara	62.79	63.19	63.93	64.78	65.18	65.91
Papua Barat	59.60	59.90	60.30	60.91	61.28	61.73
Papua	54.45	55.01	55.55	56.25	56.75	57.25
Indonesia	66.53	67.09	67.70	68.31	68.90	69.55

Sumber: BPS (2016)

Tabel 3.33 Ranking Indeks Pembangunan Manusia Provinsi 2010 – 2015

Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	10	10	10	11	11	13
Sumut	11	11	11	10	10	10
Sumbar	9	9	9	9	9	9
Riau	6	6	6	6	6	6
Jambi	18	18	17	17	17	17
Sumsel	22	22	22	23	23	23
Bengkulu	20	20	21	20	20	20
Lampung	24	25	24	26	26	25
Babel	14	15	14	15	16	15
Kepri	4	4	4	4	4	4
DKI Jakarta	1	1	1	1	1	1
Jawa Barat	12	12	12	12	12	11
Jawa Tengah	13	14	15	13	13	12
D I Y	2	2	2	2	2	2
Jawa Timur	19	19	18	18	18	16
Banten	8	8	8	8	8	8
Bali	5	5	5	5	5	5
N T B	29	29	28	30	30	30
N T T	32	31	30	31	31	32
Kalbar	28	28	27	29	29	29
Kalteng	17	17	20	21	21	21
Kalsel	21	21	19	22	22	22
Kaltim	3	3	3	3	3	3
Kaltara	34	34	33	14	14	18
Sulut	7	7	7	7	7	7
Sulteng	25	24	34	25	25	26
Sulse	15	13	13	16	15	14
Sutra	16	16	16	19	19	19
Gorontalo	27	26	25	28	28	28
Sulbar	30	30	29	32	32	31
Maluku	23	23	23	24	24	24
Maluku Utara	26	27	26	27	27	27
Papua Barat	31	32	31	33	33	33
Papua	33	33	32	34	34	34

Sumber: BPS (2016)

**LEMBAGA
DEMOKRASI**

4

<http://www.bpp.go.id>

4.1 Lembaga Demokrasi

Demokrasi memungkinkan perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antar individu, kelompok, individu dengan kelompok, individu dengan pemerintah, kelompok dengan pemerintah, bahkan antar lembaga-lembaga pemerintah. Dalam demokrasi terdapat distribusi kekuasaan yang tidak terpusat hanya pada pemerintah, sehingga memungkinkan persaingan dan saling kontrol antara satu kelompok dengan kelompok lain, antara lembaga pemerintah yang satu dengan lembaga pemerintah yang lain (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), dan antara kelompok sosial dan lembaga pemerintah (Surbakti, 2008: 290-291).

Dalam konsepsi tersebut peran politis rakyat di luar pemerintah dijamin dan merupakan bagian penting dalam esensi demokrasi. Demokrasi bahkan disimpulkan dengan konsep "rakyat memerintah sendiri," artinya para warga negara tidak hanya menerima atau menolak hasil-hasil keputusan pemilihan umum, melainkan juga melakukan kontrol atas keputusan-keputusan pemerintahan yang terbentuk dari pemilihan umum tersebut. Penilaian terhadap proses demokrasi menjadi kebutuhan dan tidak bisa dilihat hanya sekedar dari keikutsertaan dalam pemilihan umum. Proses antar pemilihan umum yang satu dengan yang lain juga dilihat sebagai proses-proses demokratis, karena di antara kedua pemilihan umum dapat terjadi berbagai hal yang menghasilkan kesenjangan antara keputusan-keputusan pemilihan umum dengan keputusan konkret pemerintah. Pada proses tersebut warga negara memiliki kemungkinan untuk mengungkapkan pendapat-pendapat mereka secara publik dan mempersoalkan segala tema yang relevan untuk masyarakat supaya suara-suara yang sensitif terhadap masalah ini dikelola oleh sistem politik yang ada (Hardiman, 2009: 127-133).

Pada titik ini peran lembaga-lembaga yang merepresentasi kepentingan politik beragam kelompok menjadi salah satu kunci keberhasilan demokrasi. Lembaga tersebut bisa merupakan lembaga yang berada di dalam pemerintahan melalui jalur-jalur politik formal. Pada kondisi jalur politik formal terhambat,

aspirasi bisa disampaikan melalui perantara lembaga di luar pemerintahan. Warga akan menyampaikan atau mengartikulasikan kepentingan mereka kepada badan-badan politik dan pemerintahan melalui kelompok-kelompok yang mereka bentuk bersama orang-orang lain yang memiliki kepentingan yang sama (Almond, 1974 dalam Mas'ood & MacAndrews, 2008: 65). Kelompok atau lembaga-lembaga itu yang akan berperan menjembatani kepentingan warga atau kelompoknya dengan pemerintah melalui berbagai mekanisme.

4.2. Partai Politik

Demokrasi berdiri berdasarkan logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintahan memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Persetujuan memerlukan perwakilan yang hanya dapat diperoleh melalui pemilihan umum. Gagasan tersebut yang menjadi fondasi bagi perkembangan demokrasi. Dalam demokrasi perwakilan, fungsi pemerintahan dialihkan dari warga negara kepada organ-organ negara (Dahl, 1999 dalam Safa'at, 2011: 6-7). Organ-organ negara tersebut diperoleh melalui hasil-hasil pemilihan umum yang diikuti partai politik, sehingga peran partai politik sangat krusial. Partai politik menjadi pangkal dari sebuah pemerintahan dan kebijakan-kebijakan yang akan dihasilkan di masa depan. Oleh Carl Friedrich partai politik didefinisikan sebagai kelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin materiil dan idil kepada para anggotanya (Surbakti, 2010:148).

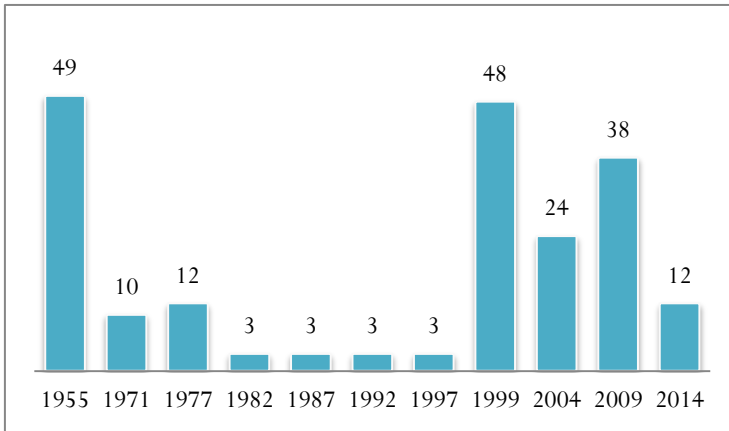
Partai politik memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang disebutkan Almond dan Powell sebagai; rekrutmen politik, sosialisasi politik, serta artikulasi dan agregasi kepentingan (Safa'at, 2011: 66). Terkait dengan itu jumlah partai politik dalam sebuah negara akan sangat berpengaruh pada peran parpol di sebuah negara. Dilihat dari jumlahnya, sistem kepartaian dapat digolongkan dalam tiga bentuk, sistem partai tunggal, dua partai dan bersaing, dan sistem banyak partai. Indonesia sendiri memiliki sistem kepartaian banyak partai. Sistem ini dicirikan

dengan sistem yang terdiri atas lebih dari dua partai yang dominan. Sistem ini merupakan produk dari struktur masyarakat yang majemuk, baik secara kultural maupun secara sosial ekonomi. Setiap golongan dalam masyarakat cenderung memelihara keterikatan dengan asal-usul budayanya dan memperjuangkan kepentingan melalui wadah politik tersendiri (Surbakti, 2010: 161). Sistem multipartai biasanya diperkuat dengan sistem perwakilan berimbang (*proportional representation*) yang memberikan kesempatan luas bagi partai-partai kecil (Safa'at, 2011: 62).

Dalam sejarahnya, Indonesia memiliki jumlah partai yang beragam dalam setiap Pemilu. Pada Pemilu tahun 1955 jumlah partai politik sebanyak 49, tahun 1971 sebanyak 10, tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 masing-masing 3 partai politik, tahun 1999 sebanyak 48, tahun 2004 sebanyak 24, dan tahun 2009 sebanyak 38 partai politik dan menjadi 12 partai politik pada tahun 2014 (Grafik 4.1). Dalam rentang itu juga terdapat sejumlah pembubaran, fusi, atau pembekuan partai politik (Tabel 4.1).

Pada Pemilu pertama di era reformasi tahun 1999, partai politik yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM sebanyak 148 partai akan tetapi hanya 48 di antaranya yang menjadi peserta Pemilu. Pada Tahun 2004, jumlah partai yang terdaftar meningkat menjadi 261 partai dan hanya 24 partai yang menjadi peserta Pemilu. Pada Pemilu 2009 Departemen Hukum dan HAM mendaftarkan sebanyak 64 partai politik namun demikian hanya 38 di antaranya yang dinyatakan lolos verifikasi KPU sehingga berhak menjadi peserta Pemilu. Pemilu Tahun 2014 diikuti oleh 12 partai politik nasional yang lolos sebagai peserta pemilu, menyisihkan 18 partai politik yang tidak memenuhi persyaratan dan 16 partai politik yang tidak lolos verifikasi KPU (Tabel 4.2). Dana kampanye partai politik pada Pemilu Tahun 2014 ditampilkan pada Tabel 4.3.

Grafik 4.1 Jumlah Partai Politik Nasional Peserta Pemilu 1955 – 2014



Sumber: Diolah dari KPU (2014)

Tabel 4.1 Pembubaran Partai Politik di Indonesia

Klasifikasi	Bentuk dan Praktek	Rujukan Hukum
(1)	(2)	(3)
Tidak diakui nya parpol yang telah ada	PSII Abikusno, PRN Bebas, PRI PRN Djody	Penpres No 7 1959 Keppres No. 129 Tahun 1961
Pembubaran sebagai konsekuensi kebijakan fusi parpol	Fusi PNI, IPKI, Murba, Parkindo, dan Partai Katolik menjadi Partai Indonesia Perjuangan Fusi Partai NU, Parmusi, PSII, dan Perti menjadi Partai Persatuan Pembangunan	Tap MPRS No XXII/1966/ dan Tap MPR No IV/1973, diwujudkan dengan UU No 3 Tahun 1975 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya
Perintah membubarkan diri	Pembubaran Masyumi Pembubaran PSI	Keppres No.200/1960 Keppres No. 201 1960
Pembubaran oleh Pemerintah	Pembubaran PKI	Keppres No 1/3/1966.
Pembubaran berdasarkan putusan pengadilan	Gugatan pembubaran Partai Golkar di MA	Perkara 01.G/WPP/2000 dan 02.G/WPP/2001 ditolak
Pembekuan Partai Politik	Partai Murba Partindo Partai Golkar	Keppres No 21/1965 Keppres No 57/1968 Maklumat Presiden 23 Juli 2001

Sumber: Diolah dari Safa'at (2011:323-324)

Tabel 4.2 Jumlah Partai Politik yang Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Berdasarkan Status Partai Pada Pemilu Tahun 1999 - 2014

Status Partai	1999	2004	2009	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Peserta Pemilu	48	24	38	12
2. Tidak Lolos Verifikasi KPU	93	26	13	16
3. Dibatalkan sebagai Badan Hukum	-	153	-	-
4. Tidak Memenuhi Persyaratan	7	58	13	18

Sumber: Diolah dari Kemenkumham (2010) dan KPU (2012)

Tabel 4.3 Dana Kampanye Partai Politik Pada Pemilu 2014

Partai Politik	Bentuk Sumbangan Dana Kampanye			Total
	Uang (RP)	Barang (RP)	Jasa (RP)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nasdem	550.000.000	40.636.935.500	-	41.186.935.500
PKB	4.657.018.958	-	49.547.919.278	54.204.938.236
PKS	13.752.168.530	-	18.729.219.896	32.481.388.426
PDIP	27.795.250.373	-	103.047.185.747	130.842.436.120
Golkar	2.002.000.000	-	73.035.763.861	75.037.763.861
Gerindra	-	-	184.580.579.070	184.580.579.070
Demokrat	235.000.000	85.955.550.957	52.900.583.487	139.091.134.444
PAN	7.464.082.202	-	78.878.886.355	86.342.968.557
PPP	1.818.868.741	-	43.239.662.490	45.058.531.231
Hanura	5.296.000.000	10.842.193.000	120.715.944.926	136.372.137.926
PBB	50.000.000	496.675.000	29.107.872.785	29.654.547.785
PKPI	4.000.000.000	-	15.682.719.813	19.682.719.813

Sumber: Diolah dari KPU (2014)

4.3. DPR dan DPD

Sejak perubahan ke-4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 2 (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui Pemilu. Lembaga ini berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden dan hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Jumlah anggota MPR periode 2004-2009 sebanyak 678 orang yang terdiri atas 550 anggota DPR dan 128 anggota DPD. Sejak periode 2009 – 2014 jumlah anggota DPR sebanyak 560 dan jumlah anggota DPD sebanyak 132, sehingga jumlah anggota MPR seluruhnya sebanyak 692 orang.

4.3.1 Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Pada era Orde Baru keanggotaan DPR terdapat dua kategori. Pertama adalah anggota DPR hasil Pemilu yang dicalonkan oleh partai politik peserta Pemilu, dan kedua adalah anggota DPR yang diangkat, berasal dari TNI/Polri dan utusan golongan.

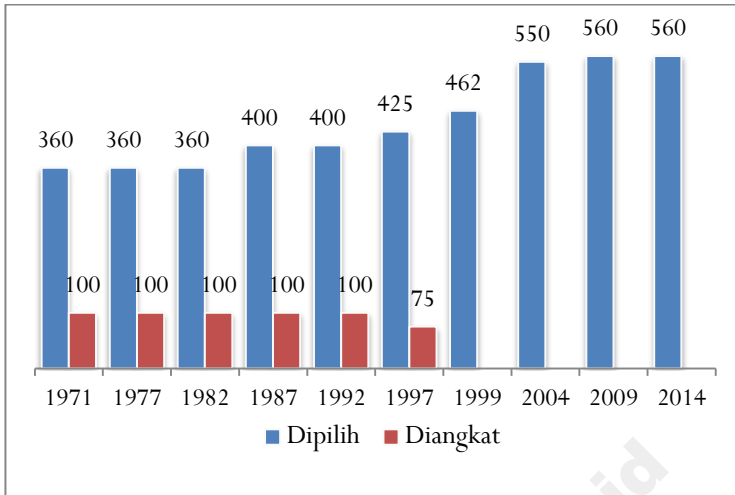
Jumlah anggota DPR hasil Pemilu 1971, 1977 dan 1982 adalah 460 orang dengan komposisi 360 dipilih dalam Pemilu dan 100 diangkat. Mulai Pemilu 1987 jumlah anggota DPR meningkat menjadi 500 orang dengan komposisi 400 dipilih dalam Pemilu dan 100 orang diangkat. Komposisi jumlah DPR yang diangkat pada era reformasi berangsur dikurangi. Jumlah DPR periode 1999-2004 adalah 500 orang dengan komposisi 462 dipilih dan 38 anggota lainnya berasal dari anggota TNI/Polri. DPR hasil Pemilu 2004 berbeda dengan sebelumnya, jumlah anggota DPR menjadi 550 dan keseluruhannya hasil Pemilu. Sejak periode 2009-2014 jumlah DPR sebanyak 560 anggota, dan belum dirubah pada Pemilu tahun 2014 (Grafik 4.2).

Komposisi perempuan setiap fraksi di DPR dan jumlah perempuan pada setiap periode DPR terus berubah setiap periode. Hasil pemilu 2014 terpilih sebanyak 97 orang perempuan atau sekitar 17,3% dari 560 anggota DPR. Jumlah ini sedikit turun dari periode sebelumnya dimana terdapat 99 perempuan atau sekitar 17,7% (Tabel 4.4). Berdasarkan fraksi, jumlah perempuan paling banyak dimiliki FPDI-P dengan 21 perempuan, sebaliknya paling sedikit FPKS dengan 1 perempuan. Sekalipun demikian PPP memiliki persentase anggota DPR perempuan paling banyak dengan 25,64% (Tabel 4.5).

Secara normatif DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi merupakan wujud dari kekuasaan pembentuk undang-undang, anggaran untuk membahas dan memberi persetujuan atau tidak memberi persetujuan terhadap RUU APBN yang diajukan Presiden, serta fungsi pengawasan dilakukan melalui pengawasan dari pelaksanaan undang-undang dan APBN. Pada Tabel 4.6 ditampilkan jumlah Undang-Undang dan PERPPU ditetapkan pada periode 1998-2014. Pada Tabel 4.7, ditampilkan jumlah Undang-Undang yang paling banyak diuji di Mahkamah Konstitusi hingga tahun 2014.

Dalam menjalankan fungsinya, DPR memiliki hak-hak yang dapat digunakan kepada pemerintah seperti hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Rekapitulasi penggunaan hak angket dan interpelasi sejak tahun 1999 ditampilkan pada Tabel 4.8 dan 4.9

Grafik 4.2 Komposisi Anggota DPR Berdasarkan Status Keanggotaan



Sumber: Diolah dari modul KPU (2014)

Tabel 4.4 Jumlah Anggota DPR Perempuan Pada Setiap Pemilu

Periode	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)
1950-1955 (DPR Sementara)	8	3,8
1955-1960	17	6,3
1956-1959 (Konstituante)	25	5,1
1971-1977	36	7,8
1977-1982	29	6,3
1982-1987	39	8,5
1987-1992	65	13,0
1992-1997	62	12,5
1997-1999	54	10,8
1999-2004	46	9,0
2004-2009	65	11,6
2009-2014	99	17,7
2014-2019	97	17,3

Sumber: Miriam Budiharjo (2008), dan KPU

Tabel 4.5 Anggota DPR Terpilih Pada Setiap Fraksi Periode 2014-2019 Berdasarkan Jenis Kelamin

Partai	Jumlah Kursi	Jenis Kelamin			
		Laki-Laki	%	Perempuan	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nasdem	35	31	88,57	4	11,43
PKB	47	37	78,72	10	21,28
PKS	40	39	97,50	1	2,50
PDIP	109	88	80,73	21	19,27
Golkar	91	75	82,42	16	17,58
Gerindra	73	62	84,93	11	15,07
Demokrat	61	48	78,69	13	21,31
PAN	49	40	81,63	9	18,37
PPP	39	29	74,36	10	25,64
Hanura	16	14	87,50	2	12,50
Total	560	463	82,68	97	17,32

Sumber: KPU

Tabel 4.6 Jumlah Undang-Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu), Tahun 1999 - 2015

Tahun	Jumlah	
	UU	Perppu
(1)	(2)	(3)
1999	56	1
2000	38	3
2001	22	-
2002	32	2
2003	41	-
2004	41	2
2005	14	3
2006	23	2
2007	48	2
2008	56	5
2009	52	4
2010	13	-
2011	24	-
2012	24	-
2013	24	1
2014	23	-
2015	14	1

Sumber: Diolah dari Kemendagri (2015)

Tabel 4.7 Jumlah Undang-Undang Paling Banyak Diuji di MK Hingga Tahun 2014

Undang-Undang (1)	Frekuensi Diuji (2)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	41
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah	38
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	29
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	26
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	25
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	20
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	20
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	18
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	16
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	15
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	14
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik	13
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Tentang Sistem Pendidikan Nasional	12
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	12
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	11
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	10
UU Nomor 1 tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	10
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	9
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	9

Sumber: diolah dari Laporan tahunan Mahkamah Konstitusi (2015)

Tabel 4.8 Penggunaan Hak Angket DPR Sejak Tahun 1999

Presiden	Waktu	Materi	Status
(1)	(2)	(3)	(4)
Abdurrahman Wahid	Agustus 2000	Dana Yanatera Bulog dan Sultan Brunei	Diterima
	Agustus 2000	Dana Nonbujeter Bulog	Ditolak Paripurna
Megawati Soekarnoputri	Januari 2002	Dana Nonbujeter Bulog	Ditolak Paripurna
	Januari 2003	Divestasi PT.Indosat	Berhenti
Susilo Bambang Yudhoyono	Maret 2005	Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM (I)	Ditolak Paripurna
	Maret 2005	Penjualan Tanker Pertamina	Diterima
	Mei 2005	Kredit Macet Bank Mandiri	Ditolak Paripurna
			Ditolak Paripurna
	Mei 2005	lelang gula ilegal	Ditolak Paripurna
			Ditolak Paripurna
	Januari 2006	Impor Beras	Ditolak Paripurna
	Maret 2006	Penunjukan Exxon-Mobil Ltd sebagai pimpinan operator lapangan minyak blok Cepu.	Ditolak Paripurna
	Desember 2007	Penyelenggaraan Ibadah Haji	Diterima
	Maret 2008	Penyelesaian Kasus Kredit Likuiditas BLBI	Berhenti
	Juni 2008	Transfer pricing PT Adaro Indonesia	Ditolak Paripurna
	Juni 2008	Hak angket atas Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM (II)	Diterima
	Oktober 2008	Keppres mengenai pelantikan pasangan Thaib Armaiyn-Abdul Gani Kasuba sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara	Berhenti
	April 2009	Pelanggaran hak konstitusional warga negara untuk memilih dalam pemilu legislatif	Diterima
Desember 2009	Bail Out Bank Century	Diterima	
Februari 2011	Mafia Pajak	Ditolak Paripurna	

Sumber: diolah dari Syamsuddin Haris, "Format Baru Relasi Presiden-DPR dalam Demokrasi Presidensial di Indonesia Pasca-Amandemen, Konstitusi (2004-2008)," disertasi, Jakarta: Universitas Indonesia, 2008 dan Laporan Lima Tahun DPR-RI 2004-2009

Tabel 4.9 Penggunaan Hak Interpelasi DPR Sejak Tahun 1999

Presiden	Waktu	Materi	Status
(1)	(2)	(3)	(4)
Abdurrahman Wahid	November 1999	Pembubaran Departemen Sosial dan Departemen Penerangan	Diterima
	Juli 2000	Pencopotan Jusuf Kala dan Laksamana Sukardi	Diterima
Megawati Soekarnoputri	Mei 2002	Bantuan Presiden untuk pembangunan asrama	Diterima
	Juni 2002	Kunjungan Presiden Megawati ke Timor Leste menghadiri undangan Presiden Xanana Gusmao	Berhenti
	Juni 2003	Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan	Diterima
Susilo Bambang Yudhoyono	November 2005	Penarikan surat Presiden Megawati soal Pemberhentian dan Penggantian Panglima TNI	Ditolak Paripurna
	Januari 2005	SK Wapres No.1/2004 tentang Pembentukan Timnas Penanganan Bencana Aceh.	Berhenti
	Februari 2005	Surat arahan Wapres untuk para menteri tentang himbauan untuk tidak menganggap penting rapat kerja dengan DPR.	Berhenti
	Agustus 2005	MoU Helsinki tentang Penyelesaian Kasus Aceh	Berhenti
	Juni 2005	Masalah busung lapar dan wabah polio	Diterima
	September 2005	Tentang Rapat kabinet melalui video conference	Berhenti
	Oktober 2005	Kenaikan harga BBM	Ditolak Paripurna
	Januari 2006	Impor beras (I)	Ditolak Paripurna
	Oktober 2006	Impor beras (II)	Ditolak Paripurna
	Maret 2007	Persetujuan Pemerintah atas resolusi Dewan Keamanan PBB No.1747	Diterima
	Juni 2007	Penyelesaian kasus lumpur Lapindo Brantas.	Berhenti
	Desember 2007	Penyelesaian kasus KLBI/BLBI	Diterima
	Mei 2008	Kenaikan harga-harga kebutuhan pokok	Diterima
	Juni 2008	Kenaikan harga BBM	Ditolak Paripurna

Sumber: P3DI DPR; dan Syamsuddin Haris, "Format Baru Relasi Presiden-DPR dalam Demokrasi Presidensial di Indonesia Pasca-Amandemen Konstitusi (2004-2008)", Disertasi, Jakarta: Universitas Indonesia, 2008, hlm.10, diolah.

4.3.2 Dewan Perwakilan Daerah

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga bagian dari MPR yang berasal dari wakil-wakil daerah yang berasal dari semua provinsi. Keberadaan lembaga ini sejak diundangkan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 22 C dan 22 D. Anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan 4 orang dan dipilih melalui Pemilu legislatif. Untuk provinsi baru yang dibentuk setelah pelaksanaan Pemilu, ditetapkan tidak ada penambahan jumlah anggota DPD dari provinsi yang bersangkutan. Dengan demikian jumlah anggota DPD hasil Pemilu 2004 adalah sebanyak 128 orang. Provinsi Sulawesi Barat belum memiliki anggota DPD karena provinsi tersebut terbentuk setelah pelaksanaan Pemilu yaitu berdasarkan UU No. 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat yang diundangkan pada tanggal 5 Oktober 2004.

Pada Pemilu Tahun 2009 jumlah anggota DPD dari setiap daerah pemilihan tetap sebanyak 4 orang. Dengan masuknya wakil dari Provinsi Sulawesi Barat, maka jumlah anggota DPD pada periode tahun 2009 – 2014 sebanyak 132 orang. Pada tahun 2014, jumlah DPD tetap 132 karena Provinsi Kalimantan Utara baru memiliki wakil DPD pada Pemilu 2019. Diantara jumlah tersebut, jumlah perempuan menurun satu orang menjadi 34 jika dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya.

Pada periode 2009 – 2014 terdapat 9 provinsi yang tidak memiliki anggota DPD perempuan, sementara pada 2014 – 2019 meningkat jumlahnya menjadi 11 provinsi. Pada periode 2009 – 2014 di Provinsi Kalimantan barat seluruh anggota DPD adalah perempuan, sementara di Provinsi Jawa Tengah terdapat 3 orang (75%). Pada periode 2014 – 2019, tidak ada provinsi yang keseluruhan anggota DPD nya perempuan. Paling banyak anggota DPD perempuan berjumlah tiga orang, masing-masing terdapat di Provinsi Gorontalo, Sumatera Selatan, dan Riau (Tabel 4.10).

Tabel 4.10 Jumlah Anggota DPD Periode 2009-2014 dan 2014 – 2019 menurut Daerah Pemilihan dan Jenis Kelamin

Daerah Pemilihan	2009 - 2014		2014 - 2019	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	4	0	4	0
Sumatera Utara	3	1	3	1
Sumatera Barat	3	1	3	1
Riau	2	2	1	3
Jambi	2	2	2	2
Sumatera Selatan	2	2	1	3
Bengkulu	3	1	2	2
Lampung	4	0	4	0
Kep. Bangka Belitung	3	1	4	0
Kepulauan Riau	3	1	4	0
DKI Jakarta	4	0	3	1
Jawa Barat	3	1	3	1
Jawa Tengah	1	3	3	1
DI Yogyakarta	3	1	3	1
Jawa Timur	3	1	3	1
Banten	4	0	3	1
Bali	4	0	4	0
Nusa Tenggara Barat	3	1	2	2
Nusa Tenggara Timur	2	2	4	0
Kalimantan Barat	0	4	2	2
Kalimantan Tengah	3	1	3	1
Kalimantan Selatan	4	0	3	1
Kalimantan Timur	4	0	4	0
Sulawesi Utara	3	1	2	2
Sulawesi Tengah	3	1	3	1
Sulawesi Selatan	4	0	4	0
Sulawesi Tenggara	4	0	3	1
Gorontalo	2	2	1	3
Sulawesi Barat	3	1	4	0
Maluku	2	2	2	2
Maluku Utara	3	1	3	1
Papua Barat	3	1	4	0
Papua	3	1	4	0
Indonesia	97	35	98	34

Sumber: Diolah dari KPU

4.4 Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman memiliki peran penting untuk melakukan pengawasan terhadap Pemerintah dalam melaksanakan Undang-Undang. Kekuasaan kehakiman yang akan menjamin amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum. Selain Mahkamah Agung (MA), dalam Pasal 24 hasil perubahan ketiga UUD RI 1945, dimasukkan pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman baru yang kedudukannya sederajat dengan lembaga kekuasaan kehakiman lainnya. MK memiliki wewenang dan kewajiban; Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; Memutus pembubaran partai politik; Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Kepastian dan kesetaraan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar merupakan prasyarat penting dari terwujudnya demokrasi. Hukum akan menjamin penguasa tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya, karena penguasa juga tunduk terhadap aturan hukum. Dengan kekuasaan hukum yang profesional, seluruh rakyat memiliki akses yang sama terhadap keadilan. Selama ini akses terhadap keadilan merupakan masalah bagi banyak pengadilan di seluruh dunia, khususnya bagi kelompok miskin dan marginal (Laptah MA 2010: 39). Demikian juga yang terdapat di Indonesia, sehingga dibentuk Komisi Yudisial yang melakukan pengawasan terhadap integritas hakim dalam memutus perkara.

Dilihat dari jumlah perkara yang masuk, pada tahun 2014 MA menerima sebanyak 1.251 perkara, lebih banyak daripada yang diterima tahun 2013 sebanyak

12.337 perkara (Tabel 4.11). Produktivitas MA dalam memutus perkara selama Tahun 2014 sebanyak 76,62%, meningkat dari tahun 2013 yang sebanyak 71,42% (Tabel 4.12). Pada perkara kasasi, Tahun 2014 berkurang sebanyak -29,06% dibanding Tahun 2013 (Tabel 4.13). Diantara 11.182 perkara kasasi yang masuk ke MA tahun 2014, sebanyak 1.868 perkara dikabulkan dan sisanya ditolak, tidak dapat diterima, atau dicabut (Tabel 4.14).

Berdasarkan klasifikasi pidana umum yang diterima MA, paling banyak (18,69%) merupakan kasus penganiayaan (Tabel 4.15). MA juga memiliki kewenangan untuk menerima uji materiil peraturan yang berada dibawah Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan peraturan lain yang lebih tinggi. Sepanjang tahun 2014, terdapat 83 permohonan uji materiil paling banyak berupa Peraturan Menteri sebanyak 26 kali (Tabel 4.16)

Berdasarkan amanat UUD 1945 Pasal 24B ayat (4) pemerintah mengesahkan UU No 22/2004 Tentang Komisi Yudisial (KY). Komisi ini yang bertugas melakukan pencalonan hakim agung dan melakukan pengawasan terhadap hakim. Untuk fungsinya yang terakhir, sejak tahun 2005 hingga April 2014 telah 2.531 hakim diperiksa oleh KY (Tabel 4.17). Diantara jumlah tersebut, 18 hakim pernah diusulkan untuk diberikan sanksi terberat yaitu pemberhentian dalam rentang 2005 - 2011. Setelah revisi UU KY tahun 2011, kategori usulan sanksi berubah menjadi ringan, sedang, dan berat. Sepanjang tahun 2012 – April 2014, telah 20 hakim diusulkan untuk memperoleh sanksi berat (Tabel 4.18).

Tabel 4.11 Jumlah Perkara yang Diterima Mahkamah Agung 2013 – 2014

Jenis Perkara	2013					2014					%
	Kasasi	PK	Grasi	HUM	Jumlah	Kasasi	PK	Grasi	HUM	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Perdata	3.280	660	0	0	3.940	3.200	707	0	0	3.907	-0,84
Perdata Khusus	658	156	0	0	814	769	135	0	0	904	11,06
Pidana Umum	1.672	107	10	0	1.789	1.680	95	18	0	1.793	0,22
Pidana Khusus	2.558	230	25	0	2.813	2.456	265	42	0	2.763	-1,78
Perdata Agama	817	83	0	0	900	725	95	0	0	820	-8,89
Pidana Militer	250	10	1	0	261	352	17	1	0	370	41,76
TUN	564	1.180	0	76	1.820	568	1303	0	83	1954	7,36
Jumlah	9.799	2.426	36	76	12.337	9.750	2.617	61	83	1.2511	1,41

Sumber : Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2015

Tabel 4.12 Produktivitas Mahkamah Agung RI Memutus Perkara Selama Tahun 2014

Jenis Perkara	Sisa 2013	Masuk	Jumlah Beban	Putus	Sisa	% Putus	% Sisa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Perdata	3.112	3.907	7.019	4.787	2.232	68,20	31,80
Perdata Khusus	234	904	1.138	864	274	75,92	24,08
Pidana Umum	945	1.793	2.738	2.152	586	78,60	21,40
Pidana Khusus	1.265	2.763	4.028	3.184	844	79,05	20,95
Perdata Agama	195	820	1.015	997	18	98,23	1,77
Pidana Militer	48	370	418	380	38	90,91	9,09
TUN	616	1.954	2.570	2.137	433	83,15	16,85
Jumlah 2014	6.415	12.511	18.926	14.501	4.425	76,62	23,38
Jumlah 2013	10.112	12.337	22.449	16.034	6.415	71,42	28,58

Sumber: Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2015

Tabel 4.13 Jumlah Perkara Kasasi yang Ditangani Mahkamah Agung RI selama Tahun 2014

Jenis Perkara	Sisa	Masuk	Jml beban	Putus	Sisa	% Putus	% Sisa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Perdata	2.667	3.200	5.867	4.009	1.858	68,33	31,67
Perdata Khusus	172	769	941	716	225	76,09	23,91
Pidana	855	1.680	2.535	1.974	561	77,87	22,13
Pidana Khusus	987	2.456	3.443	2.725	718	79,15	20,85
Perdata Agama	131	725	856	844	12	98,60	1,40
Pidana Militer	44	352	396	365	31	92,17	7,83
TUN	72	568	640	549	91	85,78	14,22
Jumlah 2014	4.928	9.750	14.678	11.182	3.496	76,18	23,82
Jumlah 2013	7.784	9.799	17.583	12.655	4.928	71,97	28,03
% 2013-2014	-36,69	-0,50	-16,52	-11,64	-29,06	4,21	-4,21

Sumber: Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2015

Tabel 4.14 Kualifikasi Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Tahun 2014

Jenis Permohonan	Jml Putus	AMAR PUTUSAN					
		Kabul	Tolak	Tidak Dpt Diterima	Cabut	Put. Sela	Gugur
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Perdata	4.009	459	3.457	75	18	-	-
Perdata Khusus	716	178	503	34	1	-	-
Pidana	1.974	270	1.580	120	3	-	1
Pidana Khusus	2.725	735	1.921	64	5	-	-
Perdata Agama	844	110	673	52	9	-	-
Pidana Militer	365	40	274	51	-	-	-
TUN	549	76	427	46	-	-	-
Jumlah	11.182	1.868	8.836	442	36	0	1

Sumber: Laporan Tahunan Mahkamah Agung (2015)

**Tabel 4.15 Klasifikasi Perkara Kasasi Pidana Umum yang Terima
Mahkamah Agung RI tahun 2013-2014**

Klasifikasi Perkara	Tahun 2013		Tahun 2014	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kekerasan	301	18,00	-	-
Penipuan	233	13,94	229	13,63
Penggelapan	231	13,82	223	13,27
Pencurian	130	7,78	159	9,46
Nyawa dan Tubuh Orang	112	6,70	-	-
Pengrusakan	109	6,52	96	5,71
Akta Palsu	94	5,62	-	-
Kealfaan mengakibatkan kematian/luka	-	-	57	3,39
Kealpaan	67	4,01	-	-
Pembunuhan	-	-	111	6,61
Pemalsuan	52	3,11	167	9,94
Perbuatan Tidak Menyenangkan	47	2,81	-	-
Perjudian	40	2,39	30	1,79
Perzinahan	36	2,15	-	-
Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu	34	2,03	31	1,85
Penyerobotan	34	2,03	-	-
Perampasan	23	1,38	-	-
Pemeriksaan	23	1,38	-	-
Penghinaan	22	1,32	37	2,20
Penadahan	20	1,20	21	1,25
Pemerasan dan Pengancaman	13	0,78	19	1,13
Fitnah	10	0,60	-	-
Pencemaran Nama Baik	8	0,48	-	-
Poligami liar	5	0,30	-	-
Ketertiban Umum	4	0,24	-	-
Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	-	-	53	13,5
Kejahatan Terhadap Asal Usul Perkawinan	-	-	34	2,02
Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang Lain	-	-	62	3,69
Kejahatan Terhadap Kesusilaan	-	-	24	1,43
Kejahatan Terhadap Keamanan Negara	-	-	5	0,30
Pra Peradilan	-	-	1	0,06
Penganiayaan	-	-	314	18,69
Lain-lain	24	1,44	7	0,42
Jumlah	1672	100,00	1680	100,00

Sumber: Laporan Tahunan Mahkamah Agung (2015)

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu pilar memiliki kewenangan melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, memutuskan sengketa Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden, pembubaran partai politik, serta perkara sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Pada tahun 2014 Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan pengujian Pasal 236 C UU No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terkait kewenangan MK mengadili sengketa Pemilukada. MK menilai kedua pasal itu bertentangan dengan UUD 1945 (inkonstitusional). Namun, kewenangan sengketa Pemilukada masih menjadi kewenangan MK hingga ada Undang-Undang pengganti. Rekapitulasi jumlah perkara yang diterima MK tahun 2003 – 2014 dapat dilihat pada Tabel 4.19 - 4.22.

Tabel 4.16 Uji Materiil ke Mahkamah Agung RI Tahun 2014

Klasifikasi	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)
Peraturan Pemerintah	14	16,87
Peraturan Menteri	26	31,33
Peraturan KPU	2	2,41
Peraturan Daerah	17	20,48
Peraturan Gubernur	4	4,82
Keputusan KPU	0	0,00
Keputusan Presiden	0	0,00
Keputusan Bupati	1	1,20
Peraturan Presiden	3	3,61
Peraturan Walikota	0	0,00
Keputusan Direksi	0	0,00
Direktur Jenderal	0	0,00
Keputusan Menteri	7	8,43
Keputusan Gubernur	4	4,82
Peraturan Bank Indonesia	1	1,20
Peraturan Bupati	1	1,20
Peraturan Komisi Informasi	1	1,20
Peraturan Lembaga	1	1,20
Peraturan Mahkama Konstitusi	1	1,20
Jumlah	83	100,00

Sumber: Laporan Tahunan Mahkamah Agung (2015)

Tabel 4.17 Pemeriksaan Hakim, Pelapor dan Saksi oleh Komisi Yudisial 2005 – 2014

Tahun	Terperiksa		Jumlah
	Hakim	Pelapor dan Saksi	
(1)	(2)	(3)	(4)
2005	30	6	36
2006	56	27	83
2007	10	64	74
2008	36	71	107
2009	96	137	233
2010	153	147	300
2011	77	206	283
2012	160	322	482
2013	252	432	684
2014 (April)	67	182	249
Jumlah	937	1594	2531

Sumber: Kiprah 9 Tahun Komisi Yudisial (2014)

Tabel 4.18 Usul Penjatuhan Sanksi Kepada Hakim Tahun 2005 – 2014

Jenis Sanksi	Tahun										Jumlah
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 (April)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Sebelum perubahan UU Nomor 22 tahun 2004											
Teguran Tertulis	6	5	1	0	7	45	8				72
Pemberhentian Sementara	2	5	7	1	6	16	7				44
Pemberhentian	0	0	1	1	3	12	1				18
Setelah Perubahan UU Nomor 22 Tahun 2004 (Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2011)											
Sanksi Ringan								19	59	28	106
Sanksi Sedang								3	3	6	12
Sanksi Berat								5	9	6	20
Jumlah	8	10	9	2	16	73	16	27	71	40	272

Sumber: Kiprah 9 tahun Komisi Yudisial (2014)

Tabel 4.19 Rekapitulasi Perkara Masuk Mahkamah Konstitusi

Tahun	Perkara					Jumlah Perkara
	Sengketa Antar Lembaga	Pengujian Undang-Undang	Sengketa Pemilu Legislatif	Sengketa Pilkada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
2003	0	24	-	-	24	
2004	1	27	45	-	73	
2005	1	25	-	-	26	
2006	4	27	-	-	31	
2007	2	30	-	-	32	
2008	3	36	-	27	66	
2009	0	78	71	3	152	
2010	1	81	-	230	312	
2011	6	86	-	132	224	
2012	6	118	-	112	236	
2013	3	109	-	200	312	
2014	1	140	903	13	1057	
2015	1	140	0	0	141	
Jumlah	29	921	1019	717	2686	

Sumber: Rekapitulasi Perkara Mahkamah Konstitusi (2015)

Tabel 4.20 Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang

Tahun	Sisa Yang lalu	Terima	Jumlah	Putusan				Putusan	Sisa Tahun Ini	Jumlah UU yang Diuji
				Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Tarik Kembali			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2003	0	24	24	0	0	3	1	4	20	16
2004	20	27	47	11	8	12	4	35	12	14
2005	12	25	37	10	14	4	0	28	9	12
2006	9	27	36	8	8	11	2	29	7	9
2007	7	30	37	4	11	7	5	27	10	12
2008	10	36	46	10	12	7	5	34	12	18
2009	12	78	90	15	17	12	7	51	39	27
2010	39	81	120	17	23	16	5	61	59	58
2011	59	86	145	21	29	35	9	94	51	55
2012	51	118	169	30	31	30	6	97	72	0
2013	72	109	181	22	52	23	13	110	71	64
2014	71	140	211	29	41	43	18	131	80	71
2015	80	122	202	20	31	47	13	111	91	71
Jumlah	430	825	1.255	182	260	238	81	761	-	400

Sumber: Rekapitulasi Perkara Mahkamah Konstitusi (2015)

Tabel 4.21 Rekapitulasi Perkara Sengketa Kewenangan Antar Lembaga

Tahun	Sisa Yang lalu	Terima	Jumlah	Putus				Jumlah Putusan	Sisa Tahun Ini
				Ka-bul	To-lak	Tidak Diterima	Tarik Kem-bali		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004	0	1	1	0	1	0	0	1	0
2005	0	1	1	0	0	0	0	0	1
2006	1	4	5	0	0	2	1	3	2
2007	2	2	4	0	1	1	0	2	2
2008	2	3	5	0	0	2	2	4	1
2009	1	0	1	0	0	1	0	1	0
2010	0	1	1	0	0	0	0	0	1
2011	1	6	7	0	0	4	0	4	3
2012	3	3	6	1	1	3	1	6	0
2013	0	3	3	0	0	2	0	2	1
2014	1	0	1	0	0	1	0	1	0
2015	0	1	1	0	0	0	0	0	1
Jumlah	11	25	36	1	3	16	4	24	-

Sumber: Rekapitulasi Perkara Mahkamah Konstitusi (2015)

Tabel 4.22 Rekapitulasi Perkara Perselisihan Pemilihan Umum Kepala Daerah

Tahun	Sisa Yang lalu	Teri-ma	Jum-lah	Putus					Jumlah Putusan	Sisa Tahun Ini
				Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Tarik Kembali	Gugur		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2008	0	27	27	3	12	3	0	0	18	9
2009	9	3	12	1	10	1	0	0	12	0
2010	0	230	230	26	149	45	4	0	224	6
2011	6	132	138	13	87	29	2	0	131	7
2012	7	105	112	11	57	27	8	1	104	8
2013	8	192	200	14	132	42	6	2	196	4
Jumlah	-	689	719	68	447	147	20	3	685	-

Sumber: Rekapitulasi Perkara Mahkamah Konstitusi (2014)

4.5 Organisasi Masyarakat

Kecenderungan berorganisasi menjadi salah satu kebebasan dasar manusia yang diakui secara universal sebagai bagian dari hak asasi manusia. Tanpa adanya kemerdekaan berserikat, harkat kemanusiaan dapat berkurang karena dengan sendirinya seseorang tidak dapat mengekspresikan pendapat menurut keyakinan dan hati nuraninya (Safaat, 2011:4). Organisasi masyarakat merupakan kelompok yang diorganisir untuk memperjuangkan atau merepresentasi kepentingan tertentu. Suara satu orang sangat kecil pengaruhnya, terutama di negara-negara yang penduduknya berjumlah besar. Melalui organisasi diharapkan tuntutan mereka akan lebih didengar oleh pemerintah (Budiardjo, 2008:383).

Sekalipun tidak mudah membedakan antara kelompok kepentingan yang terorganisir dengan partai politik, ada satu perbedaan yang secara umum dapat diterima. Setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah (pada waktu yang sama) tanpa berkehendak memperoleh jabatan publik. Sebaliknya partai politik benar-benar bertujuan untuk menguasai jabatan publik, yaitu jabatan politik maupun pemerintahan. Sekalipun demikian, kadang-kadang kelompok kepentingan itu berkembang menjadi partai politik, misalnya Partai Buruh Inggris berasal dari gerakan serikat buruh (Almond, 1974 dalam Mas'ood & MacAndrews, 2008:65-66).

Untuk mempermudah melakukan kontrol, pada masa Orde Baru dibentuk wadah khusus untuk perkumpulan, serikat, asosiasi yang berskala nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Masyarakat. Sentralisasi tersebut berlaku juga untuk organisasi yang telah ada sebelumnya, harus melebur dengan organisasi dengan bentukan pemerintah. Organisasi induk yang dibuat seperti PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) untuk guru, Kadin (Kamar Dagang dan Industri) untuk pengusaha, Kowani (Komite Wanita Indonesia) untuk wanita, HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) untuk petani, HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) untuk

nelayan, SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) untuk buruh, PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) untuk Wartawan, KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) untuk pemuda.

Pasca Orde Baru, kebebasan organisasi dijamin Undang-Undang. Organisasi kemasyarakatan bahkan banyak yang beraktivitas dan eksis walaupun secara legalitas tidak terdaftar di pemerintah pusat maupun daerah. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) menerima 15.778 permohonan pembentukan Yayasan pada tahun 2013 dan selesai diproses sebanyak 10.780 (Tabel 4.23). Pada tahun yang sama terdapat 871 permohonan pembentukan perkumpulan, dan selesai diproses sebanyak 341 (Tabel 4.24)..Organisasi masyarakat tersebar di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Dalam Tabel 4.25 disajikan jumlah desa yang di dalamnya terdapat organisasi non-profit pada Tahun 2011.

Tabel 4.23 Jumlah Permohonan Yayasan Tahun 2013

Bulan	Jumlah Permohonan	Jumlah Selesai
(1)	(2)	(3)
Januari	949	289
Februari	1347	751
Maret	1309	897
April	1517	1003
Mei	1567	653
Juni	1318	663
Juli	1425	906
Agustus	755	665
September	1245	960
Oktober	1196	1692
November	1230	724
Desember	1920	1577
Total	15.778	10.780

Sumber: Laporan Tahunan Kemenkumham (2014)

Tabel 4.24 Jumlah Permohonan Perkumpulan Tahun 2013

Bulan	Jumlah Permohonan	Jumlah Selesai
(1)	(2)	(3)
Januari	49	15
Februari	52	17
Maret	63	31
April	52	21
Mei	69	19
Juni	96	24
Juli	94	50
Agustus	47	17
September	82	25
Oktober	67	44
November	68	50
Desember	132	28
Total	871	341

Sumber: Laporan Tahunan Kemenkumham (2014)

4.6 Media Massa

Dalam teori demokrasi, bisa dikatakan media massa telah menjadi pilar demokrasi keempat di samping tiga pilar demokrasi lainnya yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif (Rais, 2008: 115). Istilah kebebasan pers sebenarnya nama generik untuk seluruh hak bersifat asasi warga masyarakat, berupa hak untuk memperoleh informasi (*right to know*) yang diperlukan dalam membentuk dan membangun secara bebas pemikiran dan pendapatnya di satu pihak, dan hak untuk menyatakan pikiran dan pendapat di pihak lain (*right to speech*). Makna ini berkaitan dengan tersedianya informasi secara bebas, baik informasi sosial maupun estetis di tengah masyarakat (Siregar, 2006:1).

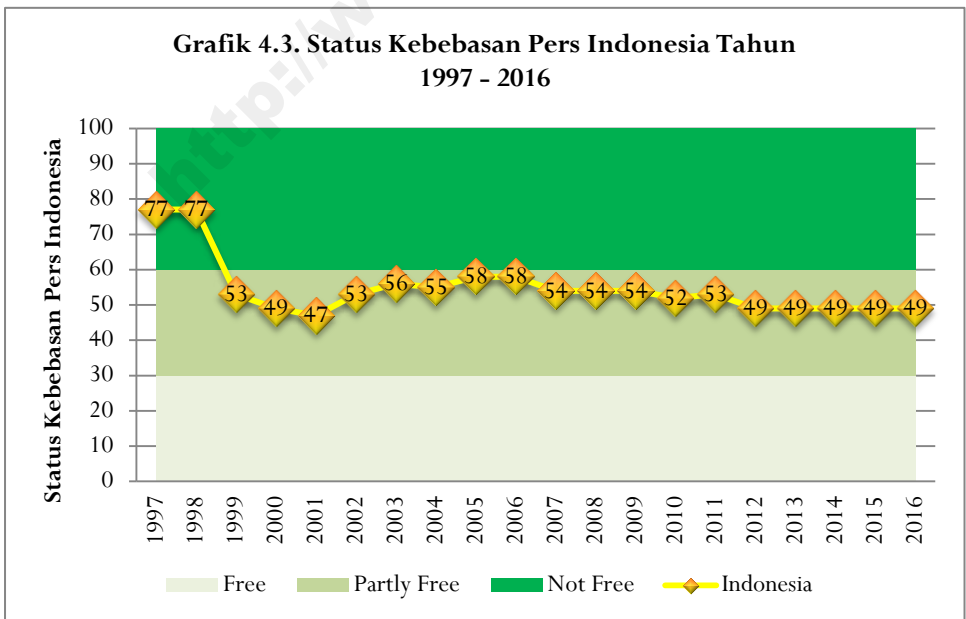
Sejumlah ahli, melihat kebebasan pers dari dua dimensi, yakni kebebasan di level struktur dan penampilan (*performance*). Pertama, kebebasan di level struktur. Di level ini, kebebasan pers dilihat dari apakah ada jaminan dan perlindungan

terhadap kebebasan pers (McQuail,2005:193-194). Ada sejumlah kondisi struktural yang penting dan harus ada sebagai jaminan atas kebebasan pers, misalnya: tidak ada sensor dan pembredelan. Adanya kebebasan untuk mempublikasikan berita, dan tidak ada kewajiban memberitakan sesuatu yang tidak diinginkan oleh redaksi media. Keputusan mengenai peristiwa apa yang diliput dan berita apa yang dipublikasikan didasarkan pada pertimbangan redaksi media. Kondisi struktural lain yang penting adalah bebas dari kontrol pemilik dan kekuatan ekonomi lainnya. Selain dari penguasa, pers bebas juga ditandai oleh bebas dari tekanan atau kontrol dari pemilik. Kedua, kebebasan di level penampilan/pelaksanaan (*performance*). Ini berkaitan dengan bagaimana pers atau media menggunakan kebebasan yang dimilikinya untuk kepentingan publik. Kebebasan yang dimiliki oleh media seharusnya bisa dimanfaatkan oleh media sebagai alat kontrol (*watchdog*) terhadap kekuasaan. Kebebasan pers itu juga seharusnya bisa dipakai untuk menyajikan berita yang berguna dan relevan bagi publik (Luwarso *et al*, 2008:7-8).

Terbitnya Undang-Undang No. 40/1999 tentang pers, menjadi pondasi penting yang memberikan jaminan pada kebebasan pers di Indonesia. Sekalipun demikian, jika dibandingkan dengan negara lain, menurut indeks kebebasan pers dari *Freedom House* pada tahun 2016 kebebasan pers Indonesia masih dikategorikan *partly free* dengan skor 49 (Tabel 4.24). Skor indeks kebebasan pers *Freedom House*, memberikan kategori *free* jika berada pada angka 0-30, *partly free* pada rentang 31-60, dan *not free* pada rentang 61-100. Jika dicermati melalui perbandingan skor Indonesia Tahun 1997 – 2016, nampak dinamika kebebasan pers Indonesia. Pengekangan pers terutama terlihat pada tahun 1997 – 1998 yang mencapai skor 77 (Grafik 4.4). Setelah itu kebebasan pers Indonesia memiliki *trend* membaik, mengalami kenaikan drastis menjadi 58 pada Tahun 1999 hingga mencapai skor 49 pada Tahun 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016. Skor serupa untuk kawasan Asia – Pasifik bisa dilihat pada Tabel 4.25.

Jumlah media massa baik yang harian, mingguan, tabloid, majalah, atau buletin dinamis setiap tahun (Tabel 4.26). Selain itu terdapat juga media massa dengan format elektronik seperti televisi (Tabel 4.27), media siber (Tabel 4.28), dan radio (Tabel 4.29)

Kebebasan pers sekalipun dilindungi, namun juga dibatasi oleh undang-undang dan kode etik jurnalistik. Wartawan memiliki peran penting untuk mengawal prinsip-prinsip jurnalisme obyektif yang dapat memberi nilai lebih bagi demokrasi. Hingga bulan Januari Tahun 2013, terdapat 2.887 wartawan yang telah tersertifikasi oleh berbagai lembaga penguji (Tabel 4.30). Berdasarkan UUU tentang Pers, pelanggaran terhadap kaidah jurnalistik harus diselesaikan melalui Dewan Pers. Pada rentang tahun 2000 – 2011 terdapat 3.225 pengaduan masuk kepada Dewan Pers (Tabel 4.31). Diantara jumlah tersebut, jenis pengaduan pada tahun 2010 – 2012 dapat dilihat pada Tabel 4.32, 4.33, dan 4.34. Dewan Pers juga mendata laporan berdasarkan latar belakang pihak yang teradu pada Tahun 2010 – 2011, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.35, dan 4.36. Selain laporan berdasarkan pengadu Tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 4.37.



Sumber: Freedom House (2016)

Tabel 4.25 Kebebasan Pers Asia Pasifik 2010 – 2016

Negara	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Afghanistan	76	NF	75	NF	74	NF	67	NF	66	NF	67	NF	62	NF
Australia	22	F	21	F	21	F	21	F	22	F	22	F	23	F
Bangladesh	56	PF	54	PF	52	PF	53	PF	54	PF	54	PF	61	NF
Bhutan	57	PF	57	PF	58	PF	58	PF	59	PF	59	PF	58	PF
Brunei	75	NF	75	NF	75	NF	75	NF	75	NF	75	NF	76	NF
Myanmar	95	NF	94	NF	85	NF	72	NF	70	NF	73	NF	73	NF
Kamboja	61	NF	63	NF	63	NF	66	NF	66	NF	69	NF	69	NF
China	84	NF	85	NF	85	NF	83	NF	84	NF	86	NF	87	NF
Timorleste	35	PF	35	PF	35	PF	35	PF	35	PF	35	PF	35	PF
Fiji	54	PF	57	PF	58	PF	56	PF	54	PF	52	PF	48	PF
Hong Kong	33	PF	32	PF	33	PF	35	PF	37	PF	41	PF	39	PF
India	33	PF	35	PF	37	PF	38	PF	39	PF	40	PF	41	PF
Indonesia	52	PF	53	PF	49	PF	49	PF	49	PF	49	PF	49	PF
Japan	21	F	21	F	22	F	24	F	25	F	25	F	26	F
Kiribati	27	F	27	F	27	F	27	F	29	F	29	F	30	F
Laos	84	NF	85	NF	84	NF	84	NF	84	NF	84	NF	84	NF
Malaysia	64	NF	64	NF	63	NF	64	NF	64	NF	65	NF	67	NF
Maldives	50	PF	50	PF	51	PF	55	PF	55	PF	55	PF	58	PF
Kep. Marshall	17	F	17	F	17	F	17	F	17	F	17	F	17	F
Micronesia	21	F	21	F	21	F	21	F	21	F	21	F	21	F
Mongolia	39	PF	39	PF	37	PF	37	PF	37	PF	37	PF	37	PF
Nauru	28	F	28	F	28	F	28	F	31	PF	32	PF	41	PF
Nepal	59	PF	59	PF	55	PF	58	PF	55	PF	55	PF	54	PF
New Zealand	14	F	15	F	17	F	16	F	18	F	19	F	20	F
North Korea	99	NF	97	NF	97	NF	96	NF	97	NF	97	NF	97	NF
Pakistan	61	NF	61	NF	63	NF	64	NF	64	NF	65	NF	64	NF
Palau	14	F	14	F	16	F	16	F	17	F	15	F	15	F
Papua Nugini	24	F	25	F	27	F	28	F	29	F	29	F	29	F
Philippines	48	PF	46	PF	42	PF	43	PF	44	PF	44	PF	44	PF
Samoa	29	F	30	F	29	F	29	F	29	F	30	F	29	F
Singapore	68	NF	68	NF	67	NF	67	NF	67	NF	67	NF	67	NF
Kep. Solomon	29	F	29	F	28	F	28	F	28	F	28	F	27	F
South Korea	30	F	32	PF	32	PF	31	PF	32	PF	33	PF	33	PF
Sri Lanka	72	NF	71	NF	72	NF	74	NF	76	NF	76	NF	64	NF
Taiwan	24	F	25	F	25	F	26	F	26	F	27	F	26	F
Thailand	58	PF	62	NF	60	PF	62	NF	64	NF	75	NF	77	NF
Tonga	32	PF	31	PF	29	F	29	F	29	F	29	F	29	F
Tuvalu	26	F	26	F	26	F	26	F	27	F	27	F	27	F
Vanuatu	23	F	25	F	26	F	25	F	25	F	25	F	25	F
Vietnam	82	NF	83	NF	84	NF	84	NF	84	NF	86	NF	85	NF

Sumber: *Freedom Of The Press, Freedom House (2016)*

Ket : N = Nilai F = Free NF = Not Free
 S = Status PF = Partly Free N/A = Not Available

**Tabel 4.26 Rekapitulasi Pendataan Pers Media Cetak
Tahun 2014-2015**

Provinsi	Media Cetak					
	Harian		Mingguan		Bulanan	
	2014	2015	2014	2015	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	3	3	2	2	0	0
Sumatera Utara	21	12	4	3	0	0
Sumatera Barat	7	7	9	15	1	0
Riau	14	10	6	7	0	0
Kepri	6	5	2	2	0	0
Jambi	8	7	0	0	0	0
Bengkulu	7	1	3	6	0	0
Sumsel	23	14	11	15	17	17
Bangka Belitung	7	7	0	0	0	0
Lampung	16	13	3	8	0	0
Banten	7	5	1	0	0	0
DKI Jakarta	32	16	65	22	33	5
Jabar	15	10	10	2	5	0
Jateng	15	4	3	0	0	0
Yogyakarta	6	2	2	2	3	2
Jatim	22	15	36	23	6	5
Bali	12	5	2	1	2	1
NTB	7	2	1	1	0	0
NTT	4	2	1	1	0	0
Kalbar	7	4	0	0	1	0
Kalsel	7	2	4	0	1	1
Kalteng	7	3	2	1	1	1
Kaltim	4	3	0	0	2	0
Sulsel	9	7	5	0	10	0
Sultra	5	2	0	0	0	0
Sulteng	6	2	0	0	0	0
Gorontalo	2	0	0	0	0	0
Sulut	10	2	0	0	0	0
Sulbar	1	2	0	0	0	0
Maluku	7	1	0	0	0	0
Maluku Utara	2	1	0	0	0	0
Papua	5	2	0	0	0	0
Papua Barat	6	5	1	1	0	0
Kaltara	1	1	0	0	0	0
Total	311	177	173	112	82	32

Sumber: Data Pers Nasional, Dewan Pers (2015)

Tabel 4.27 Media Televisi 2013-2015

Provinsi	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	5	6	8
Sumatera Utara	12	13	16
Sumatera Barat	11	13	18
Riau	10	11	16
Kepri	13	13	18
Jambi	9	9	16
Bengkulu	4	4	9
Sumsel	15	16	16
Bangka Belitung	3	3	8
Lampung	12	12	14
Banten	5	5	11
DKI Jakarta	38	40	49
Jabar	25	30	36
Jateng	14	16	27
Yogyakarta	12	12	16
Jatim	11	13	33
Bali	14	14	14
NTB	7	10	12
NTT	6	7	8
Kalbar	11	11	15
Kalsel	23	26	29
Kalteng	10	16	20
Kaltim	15	22	24
Sulsel	12	15	22
Sultra	4	5	6
Sulteng	7	11	12
Gorontalo	3	4	6
Sulut	11	13	18
Sulbar	0	1	1
Maluku	8	9	10
Maluku Utara	1	3	3
Papua	9	9	9
Papua Barat	0	2	3
Kaltara	0	0	0
Total	340	394	523

Sumber: Data Pers Nasional, Dewan Pers (2015)

Table 4.28 Media Siber 2013 – 2015

Provinsi	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	1	4	4
Sumatera Utara	11	9	2
Sumatera Barat	4	4	7
Riau	2	3	3
Kepri	3	3	0
Jambi	3	4	2
Bengkulu	2	4	0
Sumsel	6	5	3
Bangka Belitung	3	5	1
Lampung	7	10	0
Banten	3	5	0
DKI Jakarta	34	64	3
Jabar	2	5	1
Jateng	1	2	0
Yogyakarta	4	5	2
Jatim	8	15	7
Bali	5	6	0
NTB	1	1	0
NTT	11	12	0
Kalbar	1	2	0
Kalsel	4	5	1
Kalteng	1	1	0
Kaltim	3	3	0
Sulsel	4	5	0
Sultra	1	5	3
Sulteng	1	2	0
Gorontalo	1	2	0
Sulut	2	12	29
Sulbar	1	2	0
Maluku	1	1	0
Maluku Utara	1	1	0
Papua	1	3	0
Papua Barat	1	1	0
Kalut	0	0	0
Total	134	211	68

Sumber: Data Pers Nasional, Dewan Pers (2015)

Tabel 4.29 Media Radio 2014-2015

Provinsi	2014	2015
(1)	(2)	(3)
Aceh	26	22
Sumatera Utara	59	35
Sumatera Barat	35	31
Riau	29	26
Kepri	18	11
Jambi	20	10
Bengkulu	13	13
Sumsel	28	18
Bangka Belitung	21	16
Lampung	40	18
Banten	37	23
DKI Jakarta	40	8
Jabar	153	80
Jateng	176	117
Yogyakarta	38	22
Jatim	130	50
Bali	60	28
NTB	14	11
NTT	28	21
Kalbar	20	17
Kalsel	37	15
Kalteng	15	10
Kaltim	51	30
Sulsel	20	11
Sultra	18	9
Sulteng	5	1
Gorontalo	3	2
Sulut	17	13
Sulbar	2	0
Maluku	5	2
Maluku Utara	2	1
Papua	3	1
Papua Barat	3	2
Kaltara	0	0
Total	1166	674

Sumber: Data Pers Nasional, Dewan Pers (2015)

Tabel 4.30 Jumlah Wartawan Tersertifikasi Tahun 2013

Lembaga Penguji	Wartawan Muda	Wartawan Madya	Wartawan Utama	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dewan Pers	0	0	191	191
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)	805	680	504	1989
Aliansi Jurnalis Independen (AJI)	35	36	46	117
Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS)	121	163	256	540
LKBN ANTARA	0	3	47	50
Jumlah	961	882	1044	2887

Catatan: Hingga Januari 2013

Sumber: Data Pers Nasional, Dewan Pers (2013)

Tabel 4.31 Pengaduan Pada Dewan Pers

Periode	Pengaduan Langsung	Pengaduan tembusan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
2000-2002	-	-	427
2003	34	67	101
2004	59	94	153
2005	68	59	127
2006	79	128	207
2007	56	263	319
2008	99	325	424
2009	89	353	442
2010	144	370	514
2011	166	345	511
Jumlah	794	2.004	3.225

Sumber: Website Dewan Pers (November 2013)

Tabel 4.32 Jenis Pengaduan Tahun 2010

Jenis Pengaduan	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)
Mengadukan berita	83	57,64
Kekerasan terhadap wartawan	13	9,03
Mengadukan perilaku wartawan atau sikap media	11	7,64
Menghalangi wartawan	5	3,47
Pemuatan hak jawab tidak memuaskan	5	3,47
Hak jawab tidak dimuat	5	3,47
Wartawan/media digugat karena berita	3	2,08
Meminta keterangan ahli	3	2,08
Mengadukan sensor/menghalangi penyebaran media	3	2,08
Meminta mediasi	2	1,39
Digugat karena menulis surat pembaca	2	1,39
Tidak terkait pers	2	1,39
Digugat oleh narasumber karena perilaku wartawan	2	1,39
Wartawan mengadukan pemecatan	1	0,69
Narasumber digugat karena berita	1	0,69
Izin penyiaran	1	0,69
Mengadukan poling	1	0,69
Mengadukan iklan	1	0,69
T o t a l	144	100,00

Sumber: Data Pers Nasional, Dewan Pers (2013)

Tabel 4.33 Jenis Pengaduan Tahun 2011

Jenis Pengaduan	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)
Mengadukan berita	88	52,69
Kekerasan terhadap wartawan	11	6,59
Mengadukan perilaku wartawan	14	8,38
Menghalangi wartawan	5	2,99
Hak jawab tidak dimuat	4	2,40
Wartawan/media digugat karena berita	4	2,40
UU Pers tidak digunakan oleh penegak hukum	1	0,60
Sengketa hak cipta nama media	1	0,60
Mengadukan kartun	1	0,60
Digugat karena menulis surat pembaca	1	0,60
Tidak terkait pers	3	1,80
Mengadukan artikel/opini	3	1,80
Wartawan mengadukan pemecatan/pemutusan hubungan kerja	3	1,80
Mengadukan iklan	5	2,99
Mengadukan surat pembaca	2	1,20
Mengadukan foto	1	0,60
Mengadukan foto vulgar	1	0,60
Mengadukan badan hukum perusahaan pers	2	1,20
Meminta pendapat sesuai UU Pers	1	0,60
Meminta pendapat sesuai etik jurnalistik	11	6,59
Pemutusan kerjasama dengan media	1	0,60
Mengadukan putusan pengadilan	2	1,20
Mengadukan penyensoran	1	0,60
Meminta bantuan mediasi sengketa ketenagakerjaan	1	0,60
Total	167	100,00

Sumber: Data Pers Nasional, Dewan Pers (2013)

Tabel 4.34 Jenis Pengaduan ke Dewan pers Tahun 2012

Jenis Pengaduan	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)
Pengajuan Hak Jawab	215	45,17
Pengaduan tentang Berita Secara Umum	111	23,32
Permintaan Pendapat Sesuai UU Pers/Kode Etik Jurnalistik	20	4,20
Pengaduan tentang Kekerasan terhadap Wartawan	19	3,99
Pengajuan Hak Koreksi	17	3,57
Pengaduan tentang Perilaku Tindakan Wartawan	14	2,94
Mengadukan Iklan	11	2,31
Mengadukan Isi Siaran Televisi	10	2,10
Wartawan/Media Digugat ke Polisi/Pengadilan karena Berita	7	1,47
Sengketa Hak Cipta Nama Media	5	1,05
Pengaduan tentang Foto/Ilustrasi/Kartun	4	0,84
Pengaduan tentang Artikel/Opini/Surat Pembaca	2	0,42
Pengaduan tentang Badan Hukum Perusahaan Pers	2	0,42
Pengaduan Wartawan karena Mengalami Pemecatan/PHK	2	0,42
Mengadukan Penyensoran	1	0,21
Lain-lain	36	7,56
T o t a l	476	100,00

Catatan: Dalam satu pengaduan dapat mengandung lebih dari satu jenis pengaduan

Sumber: Data Pers Nasional, Dewan Pers (2013)

Tabel 4.35 Pengaduan Langsung Berdasar Latar Belakang Pihak Teradu Tahun 2010

Pihak Teradu	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)
Wartawan/Media	110	76,39
Pemerintah/pejabat pemerintah	8	5,56
Perusahaan	7	4,86
Perguruan Tinggi	2	1,39
Masyarakat	3	2,08
Tentara/TNI	2	1,39
Kepolisian	2	1,39
Parlemen	1	0,69
Lembaga Negara	1	0,69
Kedutaan Luar Negeri	1	0,69
Anggota Parlemen	1	0,69
Tidak dikenal	1	0,69
Tidak ada yang diadukan	5	3,47
J u m l a h	144	100,00

Sumber: Data Pers Nasional, Dewan Pers (2013)

Tabel 4.36 Pengaduan Langsung Berdasar Latar Belakang Pihak Teradu Tahun 2011

Pihak Teradu	Jumlah	Persentase
(1)	(2)	(3)
Wartawan/Media	129	82,69
Pemerintah/pejabat pemerintah	4	2,56
Perusahaan	3	1,92
Perguruan Tinggi/Sekolah	2	1,28
Masyarakat	2	1,28
Tentara/TNI	2	1,28
Kepolisian	2	1,28
Parlemen	1	0,64
Lembaga Negara	2	1,28
Politisi	1	0,64
Artis	2	1,28
Tidak jelas yang diadukan/tidak dikenal	5	3,21
Organisasi Pers	1	0,64
J u m l a h	156	100,00

Sumber: Data Pers Nasional, Dewan Pers (2013)

Tabel 4.37 Proses Pengaduan ke Dewan Pers Berdasarkan Pengadu Tahun 2012

Kategori Pengadu	Diwakili Kuasa Hukum		Tidak Diwakili Kuasa Hukum		Total	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Wartawan/Media Cetak	3	0,64	31	6,60	34	7,23
Wartawan/Media Elektronik	0	0,00	11	2,34	11	2,34
Wartawan/Media Online	0	0,00	5	1,06	5	1,06
Organisasi Wartawan/Pers	0	0,00	15	3,19	15	3,19
Masyarakat	14	2,98	59	12,55	73	15,53
Pejabat/Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah	10	2,13	162	34,47	172	36,60
Anggota DPR/DPD	0	0,00	2	0,43	2	0,43
Polisi/Kepolisian	2	0,43	9	1,91	11	2,34
Tentara/TNI	1	0,21	3	0,64	4	0,85
Pengusaha/Perusahaan	14	2,98	25	5,32	39	8,30
Organisasi Kemasyarakatan/LSM	2	0,43	21	4,47	23	4,89
Mahasiswa/Organisasi Kemahasiswaan	0	0,00	16	3,40	16	3,40
Perguruan Tinggi/Sekolah/Guru/Peneliti/ Akademisi	0	0,00	8	1,70	8	1,70
Lembaga Negara (KPK/KPI/KIP dll)	0	0,00	28	5,96	28	5,96
Partai Politik/Tokoh Politik	1	0,21	3	0,64	4	0,85
Pengacara	0	0,00	7	1,49	7	1,49
Artis	3	0,64	0	0,00	3	0,64
Lainnya	3	0,64	12	2,55	15	3,19
Total	53	11,28	417	88,72	470	100,00

Sumber: Data Pers Nasional, Dewan Pers (2013)

Tabel 4.38 Banyaknya Desa Menurut Ketersediaan Program TV yang Dapat Diterima Tahun 2014

Provinsi	TVRI	TV Lokal	TV Swasta	TV Luar negeri	Tidak Ada
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	6,437	5,538	6,469	6,130	6
Sumatera Utara	6,044	5,036	6,026	5,641	44
Sumatera Barat	1,141	869	1,138	1,091	1
Riau	1,790	1,340	1,801	1,664	13
Jambi	1,545	1,443	1,549	1,495	1
Sumatera Selatan	3,230	2,813	3,221	2,911	3
Bengkulu	1,528	1,183	1,522	1,461	2
Lampung	2,623	2,502	2,631	2,452	-
Kep, Bangka	381	308	381	379	-
Belitung					
Kepulauan Riau	411	364	411	408	-
DKI Jakarta	267	264	267	263	-
Jawa Barat	5,895	5,594	5,941	5,332	13
Jawa Tengah	8,524	8,373	8,572	7,361	2
DI Yogyakarta	428	431	438	380	-
Jawa Timur	8,453	8,303	8,498	7,258	1
Banten	1,540	1,324	1,532	1,101	6
Bali	707	703	700	630	9
Nusa Tenggara Barat	1,132	843	1,135	1,063	3
Nusa Tenggara Timur	3,178	2,221	3,174	3,042	59
Kalimantan Barat	2,091	2,028	2,088	1,920	8
Kalimantan Tengah	1,547	1,465	1,549	1,452	9
Kalimantan Selatan	2,003	1,785	1,971	1,885	5
Kalimantan Timur	1,006	826	1,003	948	15
Kalimantan Utara*	465	363	452	363	3
Sulawesi Utara	1,806	1,108	1,814	1,692	9
Sulawesi Tengah	1,953	1,054	1,943	1,864	9
Sulawesi Selatan	2,953	1,616	2,955	2,718	34
Sulawesi Tenggara	2,214	935	2,246	2,165	11
Gorontalo	734	464	717	700	-
Sulawesi Barat	645	189	643	621	2
Maluku	988	555	1,025	900	42
Maluku Utara	1,175	146	1,136	1,079	9
Papua Barat	1,252	1,228	1,257	1,140	301
Papua	2,198	2,152	2,180	2,055	2,654
Indonesia	78,284	65,366	78,385	71,564	3,274

Sumber: Potensi Desa, BPS (2014)

**PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN KEPALA
DAERAH**

5

<http://www.bps.go.id>

5.1. Pemilihan Umum

Keberadaan pemilihan umum (Pemilu) merupakan ciri paling mendasar dari sebuah negara demokrasi. Sekalipun bukan satu-satunya aspek dalam demokrasi, namun Pemilu merupakan satu bagian yang sangat penting. Dikatakan demikian karena Pemilu berperan sebagai mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik dan/atau mengenai sirkulasi elit secara periodik dan tertib (Surbakti *et al*, 2008:12). Mengacu pendapat tersebut, terdapat dua hal penting dalam esensi Pemilu, transfer kekuasaan secara damai serta arah kebijakan publik, atau disebut juga sebagai pelembagaan konflik dan kepentingan (M. Asfar, dalam Aribowo *et al*, 2002:8).

Pada negara yang plural seperti Indonesia, aspirasi dan kepentingan publik sangat heterogen. Kondisi geografis yang berbentuk kepulauan juga meniscayakan realitas berupa kesenjangan kualitas hidup pada daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses serta jauh dari pusat kekuasaan. Kondisi tersebut secara normatif menempatkan Pemilu sebagai mekanisme yang memberikan peluang-peluang bagi konstituen untuk mengalami percepatan perbaikan kualitas hidup. Agregasi kepentingan konstituen akan diperoleh melalui proses dan mekanisme pembuatan kebijakan publik yang diwakili oleh wakil-wakil atau pemimpin hasil dari Pemilu.

Pemilihan umum memiliki tiga variabel pokok yaitu penyuaran (*balloting*), distrik pemilihan (*electoral distric*), dan formula pemilihan (Rae, 1967 dalam Surbakti, 2010:226). Sepanjang sejarah Pemilu di Indonesia, ketiga variabel telah mengalami berbagai perubahan, termasuk pada Pemilu terakhir yang dilakukan pada tahun 2009. Secara filosofis, perubahan sistem Pemilu di Indonesia bergerak pada semangat yang semakin terbuka dan memberikan peran yang lebih besar bagi konstituen sebagai penentu kandidat terpilih. Mekanisme ini berdampak pada keniscayaan adanya orientasi akuntabilitas politik kandidat terpilih yang lebih besar kepada publik.

Pada awalnya di Indonesia hanya dikenal satu Pemilu, yaitu Pemilu legislatif yang diselenggarakan lima tahunan. Pasca amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, sejak tahun 2004 Indonesia mengenal Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pada tahun yang sama ditetapkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara langsung oleh rakyat. Dengan demikian sejak tahun 2004, di Indonesia dikenal tiga pemilihan; Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, dan Pemilihan Kepala Daerah.

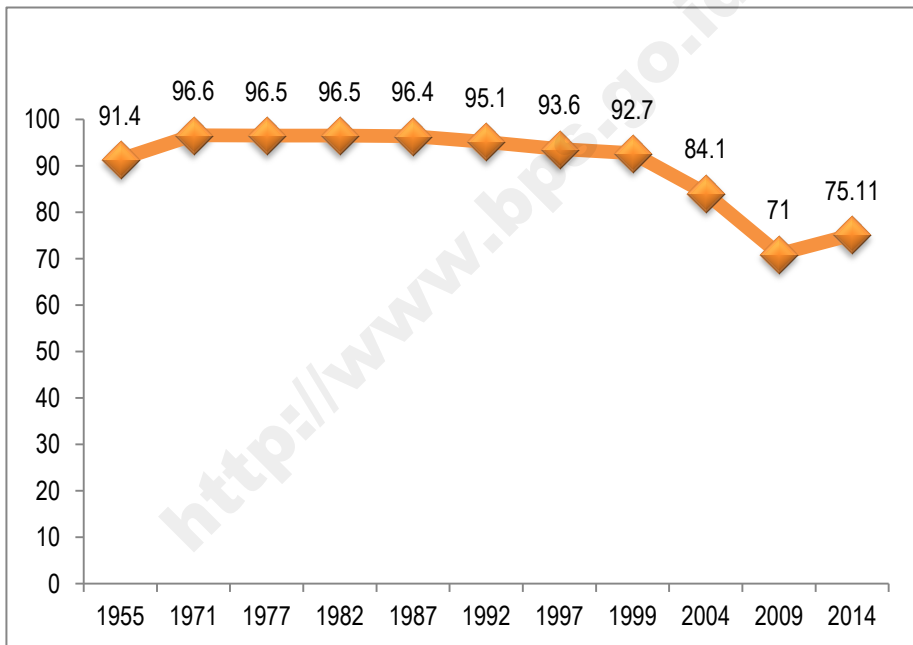
5.2 Pemilu Legislatif 2014

Selain proses pemilihan yang adil (*fairness of voting*) serta hak partai politik untuk mengorganisasi dan mengajukan kandidat, adanya hak pilih universal bagi pemilih (*universal adult suffrage*) merupakan tiga komponen penting untuk membangun sebuah sistem Pemilu yang kompetitif (Ozbudun, 1997:393-422 dalam Asfar, 2002:12). Hak pilih yang universal maknanya setiap warganegara memiliki hak yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, etnis, status sosial, kecuali mereka yang kehilangan haknya atas perintah undang-undang. Sekalipun terdapat regulasi yang menjamin hak pilih warga negara, bagian terpenting adalah bagaimana hak-hak politik tersebut dijamin dan dihormati pada pelaksanaan Pemilu. Jaminan hak pilih universal dalam regulasi maupun pelaksanaan merupakan tahapan paling awal dari terwujudnya integritas Pemilu (*electoral integrity*).

Pemilu bukan satu-satunya cara untuk menyalurkan partisipasi politik. Namun demikian, bentuk partisipasi politik yang paling mudah diukur melalui Pemilu, antara lain melalui perhitungan persentase orang yang menggunakan hak pilihnya dibanding dengan jumlah seluruh warga negara yang terdaftar sebagai pemilih. Pada negara-negara demokrasi, tingginya partisipasi politik masyarakat menunjukkan bahwa rakyat mengikuti dan memahami masalah politik dan bersedia

melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Sebaliknya, tingkat partisipasi masyarakat yang rendah dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Tingginya tingkat partisipasi juga menunjukkan bahwa pemerintahan terpilih memiliki legitimasi tinggi. Pada umumnya partisipasi yang rendah juga menunjukkan legitimasi pemerintahan yang rendah pula. Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu legislatif tahun 1955 hingga Pemilu 2009 dapat dilihat pada Grafik 5.1.

Grafik 5.1. Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Legislatif 1955 – 2014



Sumber: Diolah dari Komisi Pemilihan Umum (2014)

Pada empat periode Pemilu terakhir jumlah daftar pemilih terus mengalami peningkatan dari 116,3 juta (1999), 124,5 juta (2004), 176,4 juta (2009) dan 186 juta (2014). Berdasarkan komposisi jenis kelamin, pada Pemilu Tahun 1999 jumlah pemilih perempuan sebanyak 66,3 juta (57%) dan laki-laki 50,0 juta (43%), Tahun 2004 pemilih perempuan sebanyak 66,0 juta (53%) dan

laki-laki 58,5 juta (47%), Tahun 2009 pemilih perempuan 87,9 juta (48,8%) dan laki-laki 88,6 juta (50,2%), dan Pemilu 2014 sebanyak 93,1 juta (59,92%) dan laki-laki 93,4 juta (50,02%). Berdasarkan sebaran daftar pemilih, pada Pemilu 2014 mayoritas berada di Pulau Jawa dengan jumlah 100.197.346 daftar pemilih atau sekitar 53% dari total DPT (Tabel 5.1).

PDI-Perjuangan memperoleh suara terbanyak dengan jumlah 23.681.471, disusul Partai Golkar dengan 18.432.312 suara dan Partai Gerindra dengan 14.760.371 suara. Sementara yang paling sedikit diperoleh PKPI dengan 1.143.094 suara kemudian PBB pada urutan selanjutnya dengan 1.825.750 suara (Tabel 5.2 - 5.4). Partai yang memperoleh suara terbanyak di setiap provinsi ditampilkan pada gambar 5.1 - 5.7. Sekalipun memiliki suara, namun PKPI dan PBB tidak memperoleh kursi di DPR karena batasan *parliamentary threshold* yang ditetapkan 3,5% pada Pemilu tahun 2014. Informasi tentang perolehan dan sebaran kursi di DPR ditampilkan pada Tabel 5.5.

Tabel 5.1. Jumlah TPS dan Daftar pemilih Tetap Pemilu Tahun 2014

Provinsi	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		Total
		Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A c e h	10.843	1.642.721	1.686.617	3.329.338
Sumatera Utara	30.273	4.849.935	4.945.786	9.795.721
Sumatera Barat	12.548	1.809.705	1.834.195	3.643.900
R i a u	12.469	2.104.106	1.986.102	4.090.208
J a m b i	8.220	1.251.987	1.207.719	2.459.706
Sumatera Selatan	17.783	2.902.609	2.839.434	5.742.043
Bengkulu	4.285	697.417	669.590	1.367.007
Lampung	16.492	3.029.737	2.875.790	5.905.527
Bangka Belitung	2.741	474.259	449.551	923.810
Kepulauan Riau	3.745	657.158	625.714	1.282.872
DKI Jakarta	17.045	3.557.320	3.464.194	7.021.514
Jawa Barat	90.917	16.441.071	16.270.661	32.711.732
Jawa Tengah	77.693	13.532.804	13.687.348	27.220.152
D I Yogyakarta	8.523	1.324.452	1.407.668	2.732.120
Jawa Timur	86.385	15.013.794	15.498.034	30.511.828
Banten	20.638	4.005.263	3.881.582	7.886.845
B a l i	8.094	1.458.033	1.483.124	2.941.157
Nusa Tenggara Barat	12.020	1.688.202	1.796.637	3.484.839
Nusa Tenggara Timur	11.027	1.512.399	1.602.273	3.114.672
Kalimantan Barat	12.189	1.794.343	1.713.465	3.507.808
Kalimantan Tengah	5.947	940.720	849.045	1.789.765
Kalimantan Selatan	8.933	1.408.806	1.395.405	2.804.211
Kalimantan Timur	8.651	1.522.851	1.338.992	2.861.843
Sulawesi Utara	5.301	946.392	918.646	1.865.038
Sulawesi Tengah	6.009	973.031	936.862	1.909.893
Sulawesi Selatan	18.035	3.045.080	3.237.259	6.282.339
Sulawesi Tenggara	5.421	895.049	887.375	1.782.424
Gorontalo	2.322	400.112	402.793	802.905
Sulawesi Barat	2.820	441.585	439.036	880.621
M a l u k u	3.805	586.526	599.874	1.186.400
Maluku Utara	2.396	418.635	405.546	824.181
Papua Barat	2.707	377.259	332.566	709.825
P a p u a	9.370	1.718.292	1.485.050	3.203.373
Jumlah	545.647	93.421.653	93.153.933	186.575.617

Sumber: Diolah dari Komisi Pemilihan Umum (2014)

Tabel 5.2 Perolehan Suara Pileg 2014 (1/3)

Provinsi	Partai Nasdem	PKB	PKS	PDI-P	Jumlah Suara Sah
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
Aceh	271.574	137.656	179.808	145.700	2.316.226
Sumatera Utara	412.448	255.058	441.565	956.428	6.124.359
Sumatera Barat	214.493	88.370	205.760	184.065	2.405.339
Riau	113.854	216.842	190.003	374.487	2.669.684
Jambi	98.336	105.551	70.303	274.143	1.691.958
Sumatera Selatan	277.404	279.288	242.516	692.847	3.942.859
Bengkulu	130.759	81.522	75.826	119.296	923.755
Lampung	304.422	333.767	352.971	711.346	4.059.500
Bangka Belitung	47.763	22.662	41.897	137.085	583.447
Kepulauan Riau	95.848	28.976	66.095	132.412	822.336
DKI Jakarta	231.530	239.181	537.905	1.410.173	4.891.034
Jawa Barat	1.035.728	1.572.734	1.903.548	4.159.411	21.190.627
Jawa Tengah	1.035.126	2.305.442	1.076.508	4.295.605	17.603.459
DI Yogyakarta	107.433	129.943	147.875	570.531	2.059.453
Jawa Timur	1.495.471	3.533.902	887.111	3.580.945	19.992.320
Banten	316.865	350.146	391.847	815.517	4.841.859
Bali	60.969	39.281	37.090	872.885	2.024.250
Nusa Tenggara Barat	154.981	182.320	253.870	189.569	2.412.489
Nusa Tenggara Timur	270.964	130.925	61.999	403.821	2.355.161
Kalimantan Barat	168.741	117.937	102.146	817.770	2.478.262
Kalimantan Tengah	85.960	67.753	49.522	350.701	1.139.544
Kalimantan Selatan	102.431	202.893	152.108	192.364	1.837.931
Kalimantan Timur	117.117	84.147	144.705	312.574	1.798.439
Sulawesi Utara	69.628	23.930	41.434	449.675	1.409.946
Sulawesi Tengah	171.289	71.783	83.990	143.106	1.424.748
Sulawesi Selatan	316.421	168.830	338.966	313.515	4.404.165
Sulawesi Tenggara	90.363	58.772	60.177	97.056	1.180.733
Gorontalo	20.930	13.285	26.499	40.606	636.654
Sulawesi Barat	33.587	50.166	21.261	41.678	659.966
Maluku	107.443	113.294	49.528	192.731	927.338
Maluku Utara	65.357	22.655	71.757	122.504	627.645
Papua	298.176	251.772	159.653	491.591	2.963.280
Papua Barat	27.401	18.174	13.961	89.334	573.725
Total	8.350.812	11.298.957	8.480.204	23.681.471	124.972.491

Sumber: Diolah dari Komisi Pemilihan Umum (2014)

Tabel 5.2 Perolehan Suara Pileg 2014 (2/3)

Provinsi	Partai Golkar	Partai Gerindra	Partai Demokrat	PAN	Jumlah Suara Sah
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
Aceh	232.500	366.385	352.009	241.196	2.316.226
Sumatera Utara	1.004.498	816.642	728.699	500.672	6.124.359
Sumatera Barat	403.249	348.280	302.231	226.648	2.405.339
Riau	544.986	260.074	261.204	266.730	2.669.684
Jambi	288.724	193.970	235.471	179.438	1.691.958
Sumatera Selatan	660.932	505.386	396.365	333.450	3.942.859
Bengkulu	92.612	108.507	74.443	92.680	923.755
Lampung	464.318	538.643	470.792	421.464	4.059.500
Bangka Belitung	71.063	37.250	62.718	46.306	583.447
Kepulauan Riau	95.354	91.942	81.150	119.044	822.336
DKI Jakarta	434.428	610.780	351.993	211.540	4.891.034
Jawa Barat	3.540.629	2.378.762	1.931.014	1.391.480	21.190.627
Jawa Tengah	2.497.282	2.023.080	1.120.719	1.208.202	17.603.459
DI Yogyakarta	200.474	244.144	146.688	355.787	2.059.453
Jawa Timur	2.142.221	2.356.570	2.148.053	1.258.905	19.992.320
Banten	650.492	641.510	502.954	348.628	4.841.859
Bali	329.620	219.521	311.246	23.628	2.024.250
Nusa Tenggara Barat	333.282	263.621	318.713	196.074	2.412.489
Nusa Tenggara Timur	452.196	233.929	316.010	205.905	2.355.161
Kalimantan Barat	348.986	236.281	196.890	196.212	2.478.262
Kalimantan Tengah	141.095	120.019	75.467	84.259	1.139.544
Kalimantan Selatan	486.314	172.398	101.071	73.068	1.837.931
Kalimantan Timur	362.238	222.472	159.977	96.998	1.798.439
Sulawesi Utara	217.265	146.007	163.775	150.989	1.409.946
Sulawesi Tengah	274.610	182.217	174.006	97.049	1.424.748
Sulawesi Selatan	884.841	660.262	489.905	406.880	4.404.165
Sulawesi Tenggara	178.294	123.957	126.764	271.231	1.180.733
Gorontalo	310.790	49.342	47.662	41.222	636.654
Sulawesi Barat	123.048	98.461	119.801	93.977	659.966
Maluku	162.549	130.794	66.517	26.473	927.338
Maluku Utara	85.413	45.594	50.587	77.099	627.645
Papua	257.767	303.396	700.150	193.145	2.963.280
Papua Barat	160.242	30.175	143.869	45.242	573.725
Total	18.432.312	14.760.371	12.728.913	9.481.621	124.972.491

Sumber: Diolah dari Komisi Pemilihan Umum (2014)

Tabel 5.2 Perolehan Suara Pileg 2014 (3/3)

Provinsi	PPP	Partai Hanura	PBB	PKPI	Jumlah Suara Sah
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
Aceh	200.731	88.182	67.506	32.979	2.316.226
Sumatera Utara	314.944	465.139	129.700	98.566	6.124.359
Sumatera Barat	206.296	136.148	65.693	24.106	2.405.339
Riau	187.201	112.706	62.269	27.328	2.669.684
Jambi	104.628	85.439	39.203	16.752	1.691.958
Sumatera Selatan	168.762	216.553	124.136	45.220	3.942.859
Bengkulu	61.856	49.668	17.663	18.923	923.755
Lampung	148.105	232.196	45.482	35.994	4.059.500
Bangka Belitung	52.370	31.748	24.519	8.066	583.447
Kepulauan Riau	37.760	50.736	11.913	11.106	822.336
DKI Jakarta	497.852	286.752	51.558	27.342	4.891.034
Jawa Barat	1.631.804	1.157.286	368.483	119.748	21.190.627
Jawa Tengah	1.151.773	730.752	99.132	59.838	17.603.459
DI Yogyakarta	94.435	42.782	14.162	5.199	2.059.453
Jawa Timur	1.305.335	1.035.223	166.684	81.900	19.992.320
Banten	410.960	274.292	89.210	49.438	4.841.859
Bali	15.047	77.247	3.731	33.985	2.024.250
Nusa Tenggara Barat	172.421	222.410	83.768	41.460	2.412.489
Nusa Tenggara Timur	30.275	148.255	40.909	59.973	2.355.161
Kalimantan Barat	136.564	86.741	30.813	39.181	2.478.262
Kalimantan Tengah	79.756	50.941	15.431	18.640	1.139.544
Kalimantan Selatan	215.082	95.110	30.734	14.358	1.837.931
Kalimantan Timur	131.381	98.587	40.586	27.657	1.798.439
Sulawesi Utara	31.601	91.875	8.652	15.115	1.409.946
Sulawesi Tengah	52.099	123.646	26.087	24.866	1.424.748
Sulawesi Selatan	387.784	286.724	57.660	92.377	4.404.165
Sulawesi Tenggara	99.140	40.315	26.699	7.965	1.180.733
Gorontalo	31.114	36.640	16.172	2.392	636.654
Sulawesi Barat	35.619	22.253	6.292	13.823	659.966
Maluku	27.702	27.120	8.646	14.541	927.338
Maluku Utara	20.000	23.345	30.180	13.154	627.645
Papua	105.766	135.257	16.265	50.342	2.963.280
Papua Barat	11.325	17.430	5.812	10.760	573.725
Total	8.157.488	6.579.498	1.825.750	1.143.094	124.972.491

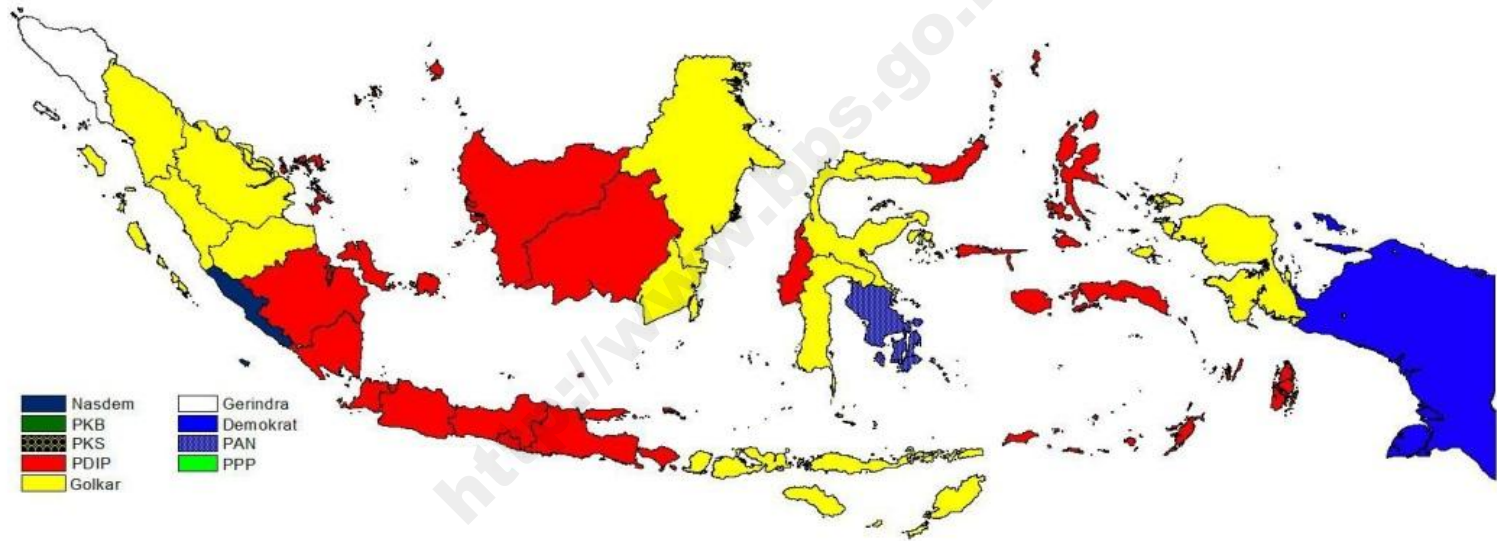
Sumber: Diolah dari Komisi Pemilihan Umum (2014)

Tabel 5.3 Distribusi Perolehan Kursi Pemilu Legislatif 2014

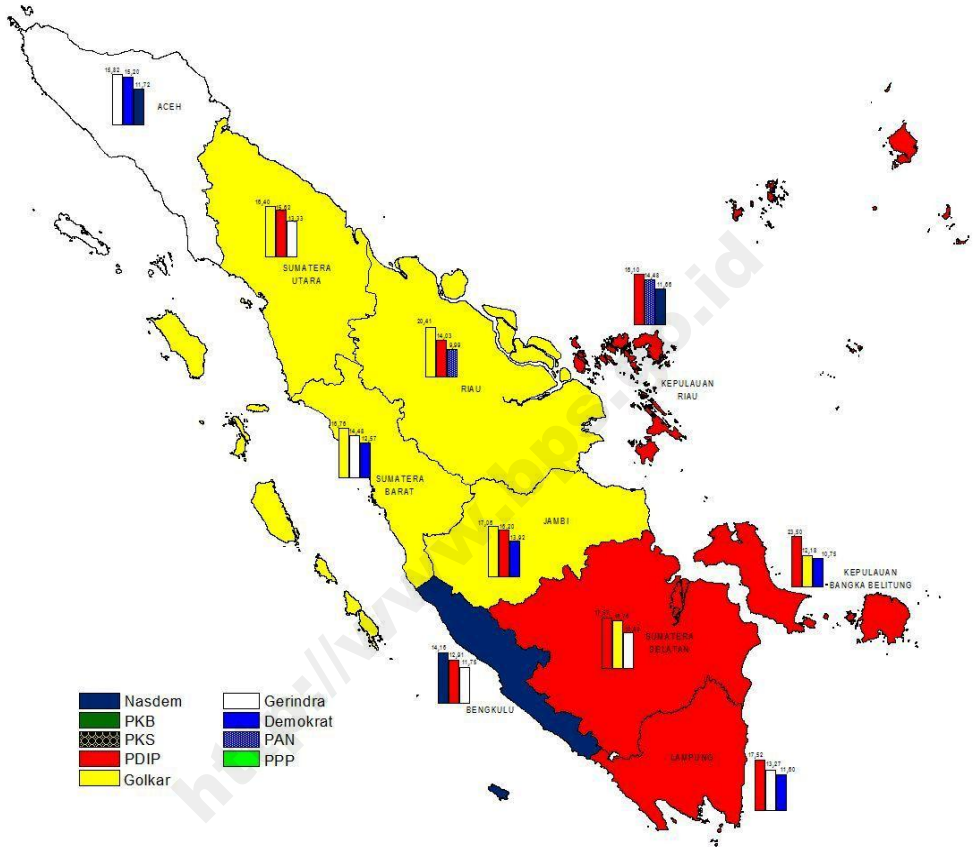
Provinsi	Alokasi Kursi	Partai Nasdem	PKB	PKS	PDI -P	Partai Golkar	Partai Gerindra	Partai Demokrat	PAN	PPP	Partai Hanura
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	13	2	1	1	1	2	2	2	1	1	0
Sumut	30	3	1	3	4	4	4	3	3	2	3
Sumbar	14	1	0	2	2	2	2	2	1	2	0
Riau	11	0	1	1	2	2	2	2	1	0	0
Jambi	7	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0
Sumsel	17	1	1	2	3	3	2	2	2	0	1
Bengkulu	4	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0
Lampung	18	1	2	2	4	2	2	2	2	0	1
Babel	3	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
Kepri	3	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
Jakarta	21	1	0	3	6	3	3	2	0	3	0
Jabar	91	1	7	11	18	17	10	9	7	7	4
Jateng	77	5	10	4	18	11	10	4	8	7	0
DIY	8	0	1	1	2	1	1	1	1	0	0
Jatim	87	7	15	2	17	11	11	11	7	4	2
Banten	22	1	1	2	4	3	3	2	2	3	1
Bali	9	0	0	0	4	2	1	2	0	0	0
NTB	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
NTT	13	2	0	0	2	3	2	2	1	0	1
Kalbar	10	1	1	0	3	1	1	1	1	1	0
Kalteng	6	1	0	0	2	1	1	0	1	0	0
Kalsel	11	0	2	1	1	3	2	0	0	2	0
Kaltim	8	1	0	1	1	2	1	1	0	1	0
Sulut	6	0	0	0	2	1	1	1	1	0	0
Sulteng	6	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1
Sulsel	24	2	0	2	2	5	3	3	3	3	1
Sultra	5	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0
Gorontalo	3	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0
Sulbar	3	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0
Maluku	4	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0
Malut	3	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0
Papua Brt	10	1	1	1	2	1	1	2	1	0	0
Papua	3	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
Jumlah	560	35	47	40	109	91	73	61	49	39	16

Sumber: Diolah dari Komisi Pemilihan Umum (2014)

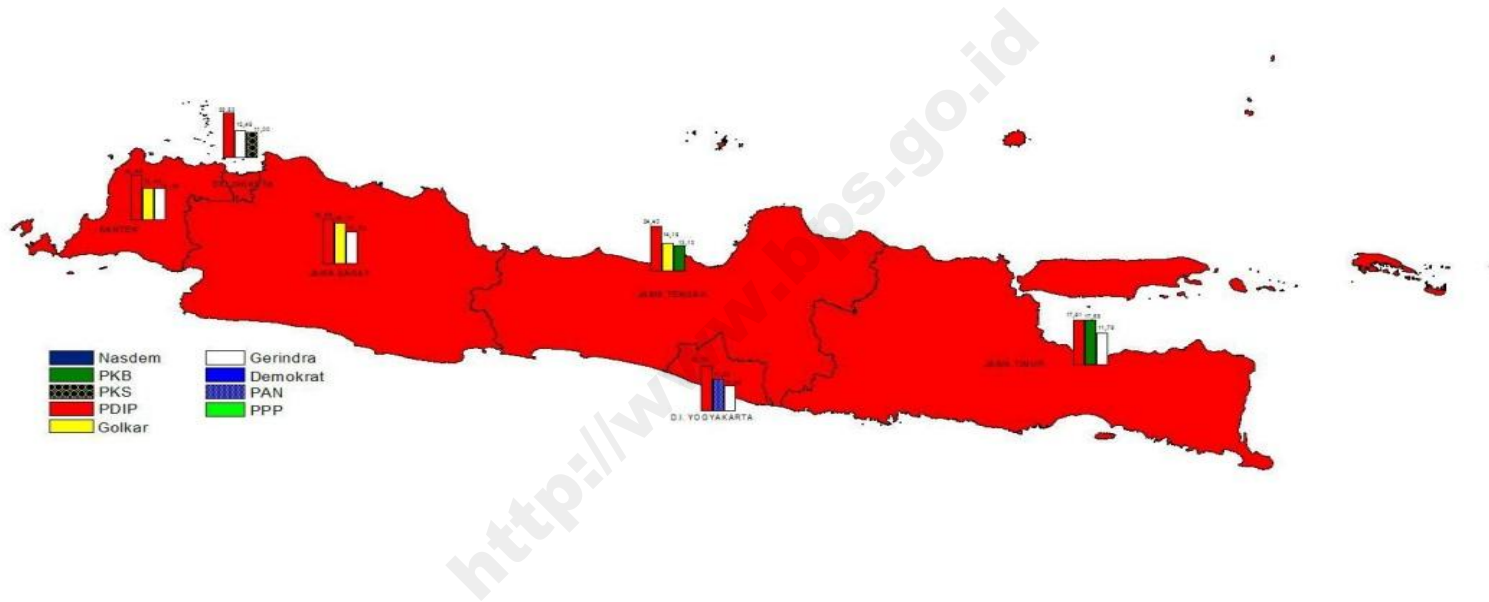
Gambar 5.1 Pemenang Pemilu Legislatif Tahun 2014 Berdasarkan Provinsi



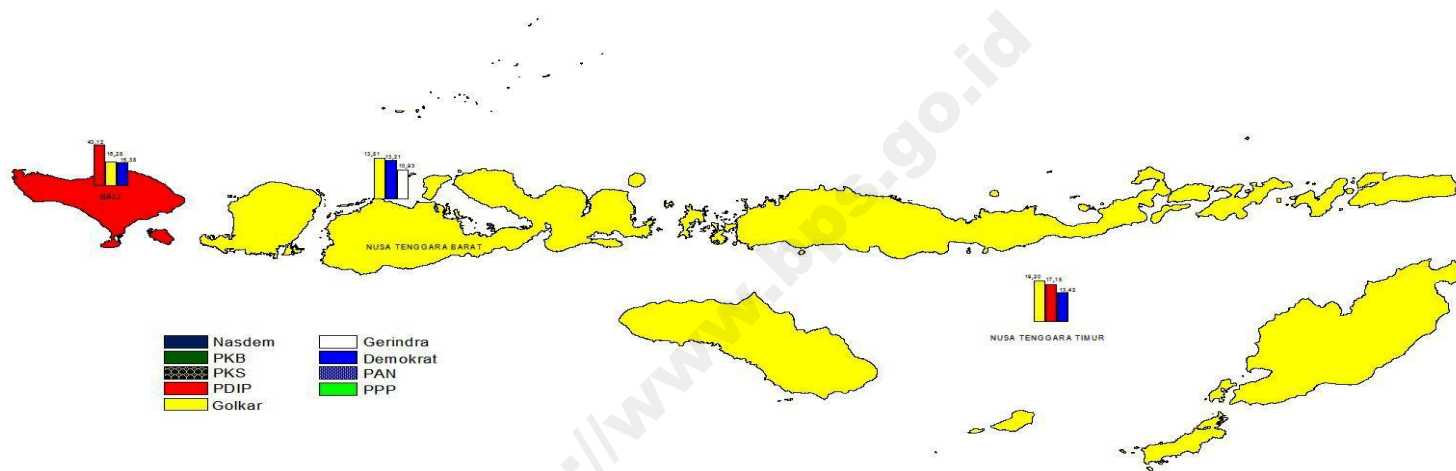
Gambar 5.2 Pemenang pemilu Legislatif Tahun 2014 di Pulau Sumatera



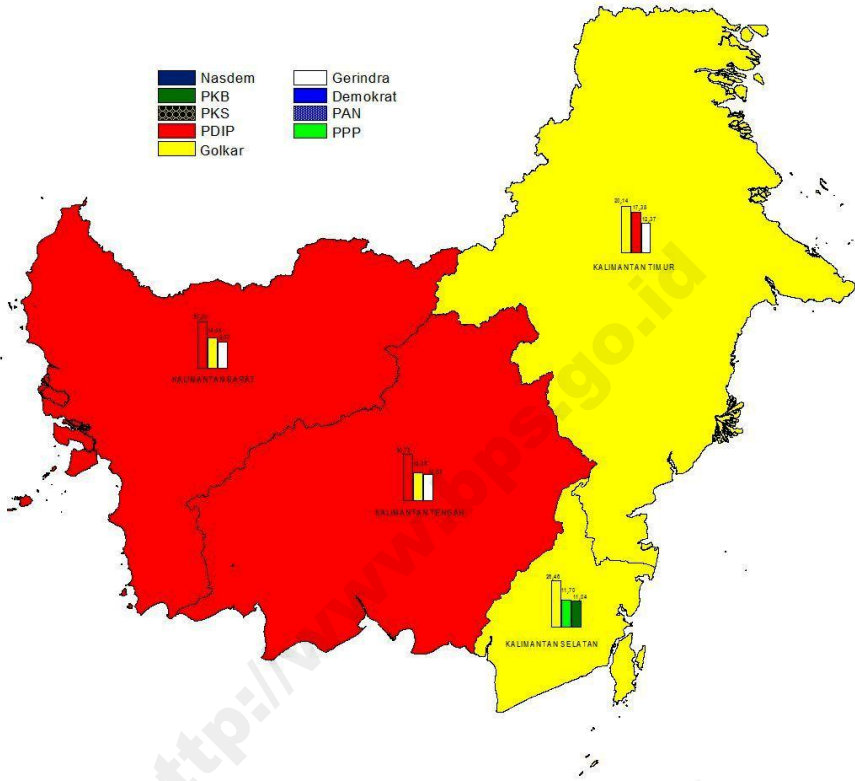
Gambar 5.3 Pemenang Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Pulau Jawa



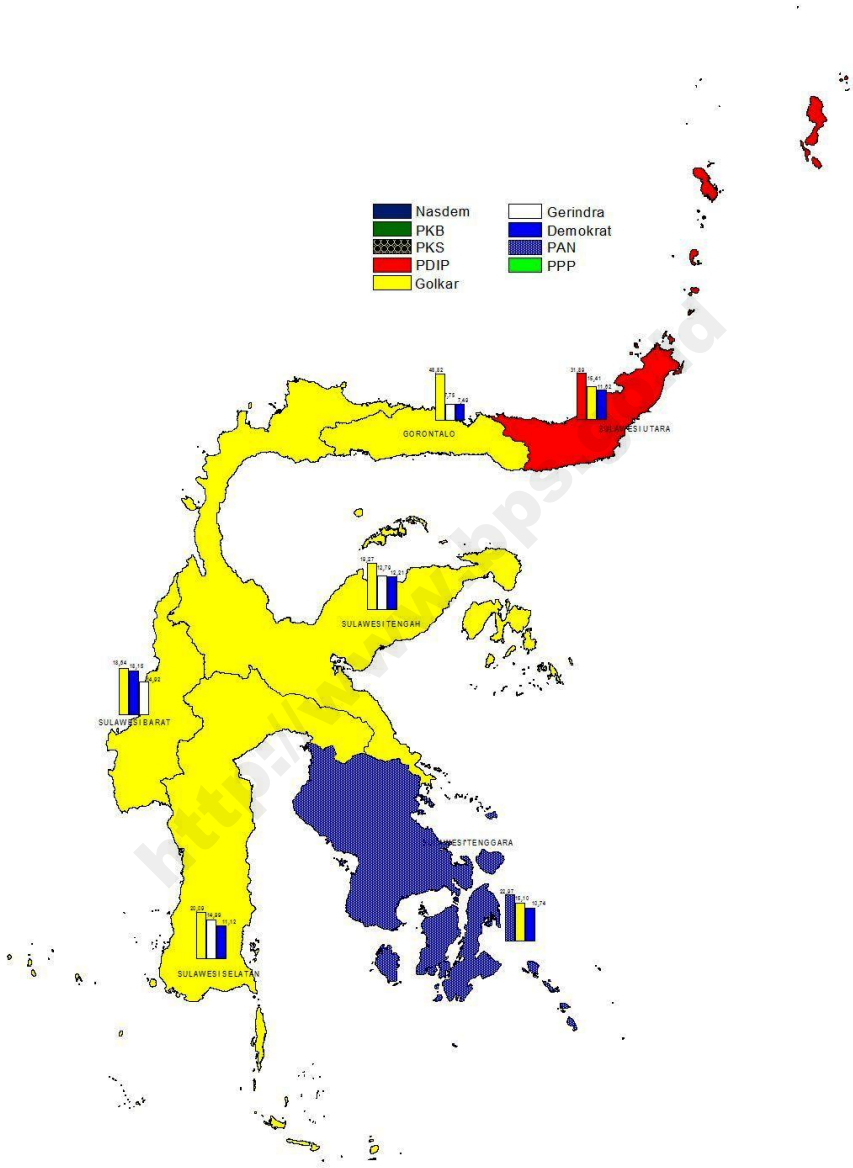
Gambar 5.4 Pemenang Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Pulau Bali dan Nusa Tenggara



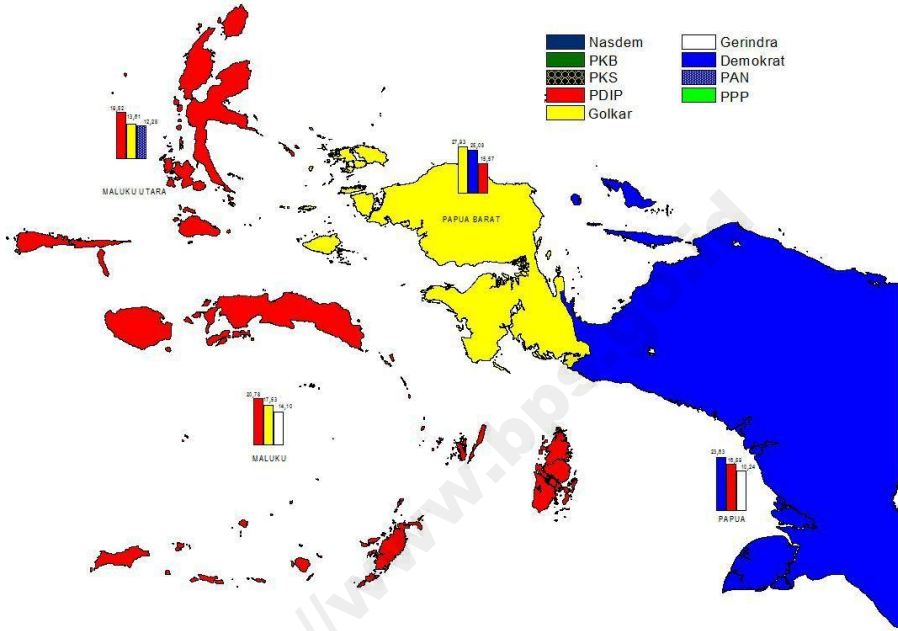
Gambar 5.5 Pemenang Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Pulau Kalimantan



Gambar 5.6 Pemenang Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Pulau Sulawesi



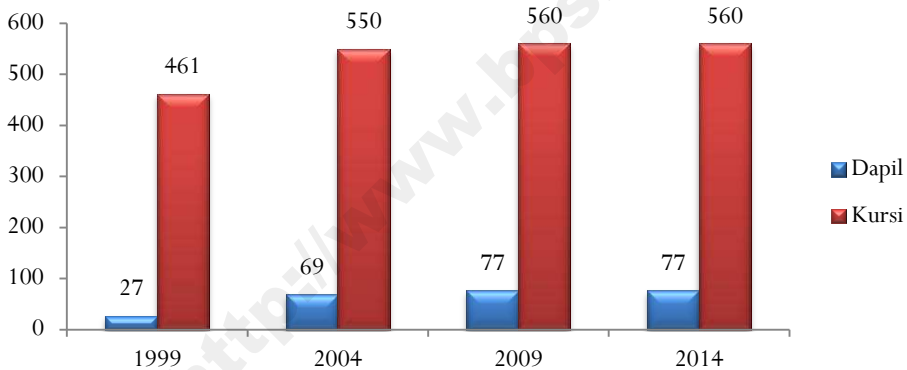
Gambar 5.7 Pemenang Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kepulauan Maluku dan Papua



5.3 Sistem dan Peserta Pemilu

Secara umum dikenal tiga model sistem Pemilu yaitu; *pertama*, sistem mayoritas-pluralitas atau yang dikenal dengan sistem distrik; *kedua*, sistem Pemilu perwakilan berimbang; *ketiga*, sistem Pemilu campuran yang terdiri dari banyak model, dan salah satu diantaranya yang menonjol adalah sistem Pemilu semi-proporsional (Surbakti, 2008:28). Pada Pemilu 2004, Indonesia menggunakan sistem Pemilu semi-proporsional, sedangkan pada 2009 dan 2014 menggunakan proporsional terbuka murni. Alokasi kursi DPR untuk Pemilu 2014 tetap berjumlah 560 kursi yang berasal dari 77 Dapil, tidak berubah dari Pemilu tahun 2009 (Grafik 5.2).

Grafik 5.2 Jumlah Dapil dan Alokasi Kursi DPR RI pada Pemilu 1999 - 2014



Sumber: Diolah dari Komisi Pemilihan Umum (2014)

Daftar calon tetap (DCT) DPR RI yang mengikuti Pemilu 2014 sebanyak 6.397 calon yang tersebar pada seluruh Dapil di Indonesia. Jumlah paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah sebanyak 1.043 caleg dan yang paling sedikit dengan jumlah 36 Caleg, terdapat di Provinsi Sulbar, Kepulauan Riau, Gorontalo, dan Kepulauan Bangka Belitung (Tabel 5.6). Berdasarkan jenis kelamin persentase Caleg laki-laki sebanyak 63,15% sementara perempuan sebanyak 36,76% (Tabel 5.7). Berdasarkan partai politik, jumlah perempuan

paling banyak terdapat di partai Nasdem dengan jumlah 219 Caleg, sementara paling sedikit terdapat di PKS dengan 180 Caleg (Tabel 5.8). Berdasarkan Usia, paling banyak Caleg memiliki usia dalam rentang 41-50 tahun dengan jumlah 2.361 Caleg. Jumlah Caleg muda (<30 tahun) paling banyak terdapat di PPP dengan jumlah 53 Caleg. Namun PPP bersama partai Demokrat juga merupakan partai politik dengan jumlah Caleg tertua (>60) paling banyak dengan jumlah masing-masing 12 Caleg (Tabel 5.9 dan 5.10).

Berdasarkan data profil Caleg yang bersedia dipublikasikan, Sarjana merupakan jumlah tingkat pendidikan terbanyak dengan 3.170 Caleg, sementara paling sedikit berpendidikan SMP dengan jumlah 10 Caleg. Selain itu terdapat 26 profesor dan 311 caleg berpendidikan S3. Diantara jumlah tersebut, nasdem merupakan partai dengan jumlah profesor paling banyak dengan 5 Caleg, sementara PKB dan Partai Golkar sama sekali tidak memiliki Caleg dengan gelar Profesor (Tabel 5.11 dan 5.12).

Berdasarkan pengolahan data yang sama juga dilasifikasikan tempat lahir dan tempat tinggal Caleg. Sekalipun tidak dapat secara persis menyimpulkan tentang pola penempatan Caleg, namun tetap merupakan informasi yang menarik (Tabel 5.13 – 5.14). Berdasarkan tempat lahir, 58,71% Caleg lahir pada provinsi yang sama dengan Dapil tempat pencalonannya, sementara 40,14% lainnya berasal dari luar. Berdasarkan alamat tempat tinggal sebanyak 51,27% Caleg memiliki alamat tempat tinggal di Provinsi yang sama dengan Dapil pencalonannya, sementara 47,63% berasal dari luar.

Berdasarkan partai politik, Partai Nasdem memiliki 364 Caleg yang lahir pada provinsi sama dengan Dapil pencalonannya. Jumlah ini juga paling tinggi persentasenya, yang mencapai 66,79% dari seluruh Caleg Partai Nasdem. Sementara jika dilihat dari alamat tempat tinggal, PKS memiliki jumlah Caleg terbanyak yang alamat tempat tinggal dan Dapil tempat pencalonannya sama dengan jumlah 351 orang. Berdasarkan persentase, jumlah ini juga merupakan yang

terbanyak mencapai 72,37% sementara urutan kedua berasal dari Partai Nasdem dengan persentase 62,57%.

Tabel 5.4 Daftar Calon Tetap DPR RI Untuk Pemilu 2014 Berdasarkan Provinsi (1/2)

Provinsi	Jumlah Daftar Calon Tetap (DCT)						
	Nas dem	PKB	PKS	PDIP	Golkar	Gerin dra	Demo krat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	13	13	13	13	13	13	13
Sumatera Utara	30	30	23	30	28	30	30
Sumatera Barat	14	14	14	14	14	14	14
Riau	11	11	11	11	11	11	11
Jambi	7	7	5	7	7	7	7
Sumatera Selatan	17	17	11	17	17	17	13
Bengkulu	4	4	4	4	4	4	4
Lampung	18	18	14	18	18	19	18
Bangka Belitung	3	3	3	3	3	3	3
Kepulauan Riau	3	3	3	3	3	3	3
DKI Jakarta	21	21	18	21	21	21	21
Jawa Barat	91	90	80	91	84	91	92
Jawa Tengah	77	76	72	77	77	77	77
DI Yogyakarta	8	8	8	8	8	8	8
Jawa Timur	81	81	69	81	81	81	81
Banten	23	22	19	22	21	22	22
Bali	9	9	6	9	9	9	9
Nusa Tenggara Barat	10	10	10	10	10	9	10
Nusa Tenggara Timur	13	13	7	13	13	13	13
Kalimantan Barat	10	10	10	10	10	10	10
Kalimantan Tengah	6	6	6	6	6	6	6
Kalimantan Selatan	11	10	11	11	11	11	11
Kalimantan Timur	8	8	8	8	8	8	8
Sulawesi Utara	6	6	6	6	6	6	7
Sulawesi Tengah	6	6	6	6	6	6	6
Sulawesi Selatan	16	16	16	16	16	16	16
Sulawesi Tenggara	5	5	5	5	5	5	5
Gorontalo	3	3	3	3	3	3	3
Sulawesi Barat	3	3	3	3	3	3	3
Maluku	4	4	4	4	4	4	4
Maluku Utara	3	3	3	3	3	3	3
Papua	10	10	5	10	10	10	10
Papua Barat	3	3	3	3	3	3	3
T o t a l	547	543	479	546	536	546	544

Sumber: Diolah dari Komisi Pemilihan Umum (2014)

**Tabel 5.4 Daftar Calon Tetap DPR RI Untuk Pemilu 2014
Berdasarkan Provinsi (2/2)**

Provinsi	Jumlah Daftar Calon Tetap (DCT)					Total
	PAN	PPP	Hanura	PBB	PKPI	
(1)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Aceh	13	13	13	13	13	156
Sumatera Utara	30	29	30	30	30	350
Sumatera Barat	14	13	14	14	13	166
Riau	11	11	11	11	11	132
Jambi	7	6	7	7	7	81
Sumatera Selatan	17	17	17	17	17	194
Bengkulu	4	4	4	3	4	47
Lampung	18	18	18	17	18	212
Bangka Belitung	3	3	3	3	3	36
Kepulauan Riau	3	3	3	3	3	36
DKI Jakarta	21	22	21	21	21	250
Jawa Barat	91	80	81	90	82	1043
Jawa Tengah	77	75	77	77	74	913
DI Yogyakarta	8	8	8	8	8	96
Jawa Timur	81	80	81	74	69	940
Banten	22	22	22	22	22	261
Bali	9	5	9	9	9	101
Nusa Tenggara Barat	10	10	10	10	10	119
Nusa Tenggara Timur	13	8	13	13	13	145
Kalimantan Barat	10	10	10	10	9	119
Kalimantan Tengah	6	6	6	6	6	72
Kalimantan Selatan	11	11	11	11	10	130
Kalimantan Timur	8	8	8	8	8	96
Sulawesi Utara	6	6	6	6	6	73
Sulawesi Tengah	6	6	6	6	6	72
Sulawesi Selatan	16	16	16	16	16	192
Sulawesi Tenggara	5	5	5	5	5	60
Gorontalo	3	3	3	3	3	36
Sulawesi Barat	3	3	3	3	3	36
Maluku	4	4	4	3	4	47
Maluku Utara	3	3	3	3	3	36
Papua	10	9	10	10	10	114
Papua Barat	3	3	3	3	3	36
Total	546	520	536	535	519	6.397

Sumber: Diolah dari Komisi Pemilihan Umum (2014)

Tabel 5.5 Jumlah Caleg DPR RI pada Pemilu 2014 menurut Provinsi dan Jenis Kelamin

Provinsi	Jenis Kelamin		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	95	61	156
Sumatera Utara	239	111	350
Sumatera Barat	108	58	166
Riau	83	49	132
Jambi	47	34	81
Sumatera Selatan	120	74	194
Bengkulu	24	23	47
Lampung	138	74	212
Kep. Bangka Belitung	24	12	36
Kepulauan Riau	21	15	36
Dki Jakarta	153	97	250
Jawa Barat	687	356	1.043
Jawa Tengah	552	361	913
D I Yogyakarta	57	39	96
Jawa Timur	588	352	940
Banten	173	88	261
Bali	65	36	101
Nusa Tenggara Barat	85	34	119
Nusa Tenggara Timur	89	56	145
Kalimantan Barat	81	38	119
Kalimantan Tengah	48	24	72
Kalimantan Selatan	82	48	130
Kalimantan Timur	59	37	96
Sulawesi Utara	44	29	73
Sulawesi Tengah	48	24	72
Sulawesi Selatan	119	73	192
Sulawesi Tenggara	35	25	60
Gorontalo	21	15	36
Sulawesi Barat	25	11	36
Maluku	24	23	47
Maluku Utara	22	14	36
Papua Barat	79	35	114
Papua	22	14	36
Total	4.057	2.340	6.397

Sumber: Diolah dari Komisi Pemilihan Umum (2014)

Tabel 5.6 Jumlah Caleg DPR RI pada Pemilu 2014 menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin

Partai Politik	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(5)
Nasdem	327	220	547
PKB	340	203	543
PKS	301	178	479
PDI-P	354	192	546
Golkar	343	193	536
Gerindra	359	187	546
Demokrat	350	194	544
PAN	345	201	546
PPP	323	197	520
PBB	345	191	536
Gerindra	341	194	535
PKPI	329	190	519
Total	4.057	2.340	6.397

Sumber: Diolah dari Komisi Pemilihan Umum (2014)

Tabel 5.7 Jumlah Caleg DPR RI pada Pemilu 2014 menurut Partai Politik dan Kelompok Umur

Partai	Umur					Tidak Ada data	Total
	<30	31-40	41-50	51-60	>60		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Nasdem	20	95	204	151	76	1	547
PKB	74	128	193	108	31	9	543
PKS	11	111	260	68	23	6	479
PDI-P	28	87	227	129	66	9	546
Golkar	26	79	178	173	78	2	536
Gerindra	22	88	220	156	57	3	546
Demokrat	23	104	179	139	87	12	544
PAN	36	133	194	135	47	1	546
PPP	53	105	184	104	62	12	520
PBB	21	92	176	164	76	7	536
Gerindra	52	92	185	125	73	8	535
PKPI	48	95	161	144	68	3	519
Total	414	1.209	2.361	1.596	744	73	6.397

Sumber: Diolah dari Komisi Pemilihan Umum (2014)

Tabel 5.8 Jumlah Caleg DPR RI pada Pemilu 2014 menurut Provinsi dan Kelompok Umur

Provinsi	Umur					Tdk Ada Data	Total
	<30	31-40	41-50	51-60	>60		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	12	27	48	45	22	2	156
Sumatera Utara	18	55	127	92	51	7	350
Sumatera Barat	3	16	49	56	41	1	166
Riau	7	23	56	28	18	0	132
Jambi	4	19	20	21	17	0	81
Sumatera Selatan	20	33	60	50	27	4	194
Bengkulu	1	7	21	15	3	0	47
Lampung	6	37	72	66	29	2	212
Kep. Bangka Belitung	2	10	8	13	3	0	36
Kepulauan Riau	0	5	8	18	4	1	36
Dki Jakarta	15	39	77	68	49	2	250
Jawa Barat	55	177	415	263	121	12	1.043
Jawa Tengah	71	194	362	205	69	12	913
D I Yogyakarta	3	17	36	20	17	3	96
Jawa Timur	73	222	364	200	69	12	940
Banten	16	38	104	79	24	0	261
Bali	6	23	31	31	10	0	101
Nusa Tenggara Barat	10	22	42	28	17	0	119
Nusa Tenggara Timur	7	26	46	44	21	1	145
Kalimantan Barat	7	19	51	26	16	0	119
Kalimantan Tengah	4	12	23	22	9	2	72
Kalimantan Selatan	14	33	50	15	14	4	130
Kalimantan Timur	10	19	29	28	9	1	96
Sulawesi Utara	6	13	22	19	13	0	73
Sulawesi Tengah	9	21	21	11	10	0	72
Sulawesi Selatan	11	25	87	45	23	1	192
Sulawesi Tenggara	6	10	27	11	4	2	60
Gorontalo	2	7	14	8	5	0	36
Sulawesi Barat	4	6	14	8	4	0	36
Maluku	3	9	16	15	3	1	47
Maluku Utara	2	8	10	13	2	1	36
Papua Barat	4	31	36	26	15	2	114
Papua	3	6	15	7	5	0	36
Total	414	1.209	2.361	1.596	744	73	6.397

Sumber: Diolah dari Komisi Pemilihan Umum (2014)

Tabel 5.9 Jumlah Caleg DPR RI pada Pemilu 2014 menurut Provinsi dan Pendidikan

Provinsi	Pendidikan dan Gelar								Total
	SMP	SMA	Dip loma	S1	S2	S3	Pro-fesor	Tidak Ada Data	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	0	30	3	80	35	2	1	5	156
Sumut	0	35	7	197	86	17	0	8	350
Sumbar	0	23	3	83	37	13	0	7	166
Riau	0	17	2	63	36	8	0	6	132
Jambi	0	11	2	38	21	3	0	6	81
Sumsel	1	24	6	90	56	7	3	7	194
Bengkulu	1	2	0	21	22	1	0	0	47
Lampung	1	25	12	117	41	11	1	4	212
Babel	0	5	4	15	9	0	0	3	36
Kepri	0	4	1	15	12	2	0	2	36
Jakarta	0	28	7	115	77	15	4	4	250
Jabar	1	132	23	508	293	71	2	13	1.043
Jateng	2	122	25	437	238	57	1	31	913
DIY	0	11	5	44	30	3	2	1	96
Jatim	2	143	32	432	281	31	3	16	940
Banten	0	33	9	132	74	8	3	2	261
Bali	1	10	4	53	25	5	1	2	101
NTB	0	5	5	81	24	3	0	1	119
NTT	0	12	5	86	28	8	1	5	145
Kalbar	0	17	5	60	31	4	1	1	119
Kalteng	0	9	4	37	18	3	0	1	72
Kalsel	1	23	3	65	27	3	1	7	130
Kaltim	0	13	4	44	24	4	1	6	96
Sulut	0	7	1	40	21	2	0	2	73
Sulteng	0	12	3	35	19	1	0	2	72
Sulsel	0	14	1	97	64	15	1	0	192
Sultra	0	9	1	29	13	4	0	4	60
Gorontalo	0	4	1	20	9	2	0	0	36
Sulbar	0	9	1	20	4	1	0	1	36
Maluku	0	8	1	28	7	1	0	2	47
Malut	0	6	1	16	10	3	0	0	36
Papua Brt	0	22	5	51	31	2	0	3	114
Papua	0	8	0	21	5	1	0	1	36
Total	10	833	186	3.170	1.708	311	26	153	6.397

Sumber: Diolah dari Komisi Pemilihan Umum (2014)

Tabel 5.10 Jumlah Caleg DPR RI pada Pemilu 2014 menurut Partai Politik dan Pendidikan

Partai	Pendidikan								Total
	SMP	SMA	Diploma	S1	S2	S3	S3 & Profesor	Tidak Ada Data	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Nasdem	2	67	26	247	165	31	5	4	547
PKB	1	120	16	264	102	19	0	21	543
PKS	1	71	13	254	102	28	1	9	479
PDI-P	0	63	9	272	155	31	2	14	546
Golkar	1	30	12	277	181	33	0	2	536
Gerindra	1	61	5	275	162	34	2	6	546
Demokrat	1	40	16	264	174	44	3	2	544
PAN	0	60	8	269	175	21	5	8	546
PPP	1	75	25	249	141	13	2	14	520
PBB	0	61	18	270	145	33	3	6	536
Gerindra	2	94	19	267	106	13	2	32	535
PKPI	0	91	19	262	100	11	1	35	519
Total	10	833	186	3.170	1.708	311	26	153	6.397

Sumber: Diolah dari Komisi Pemilihan Umum (2014)

Tabel 5.11 Jumlah Caleg DPR RI pada Pemilu 2014 menurut Partai Politik, Tempat Lahir dan Tempat Tinggal

Partai	Tempat Lahir				Total	Tempat Tinggal			
	Asal Provinsi Dapil	Luar Provinsi Dapil	Tidak Bersedia Dipublikasikan	Total		Asal Provinsi Dapil	Luar Provinsi Dapil	Tidak Bersedia Dipublikasikan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
Nasdem	366	179	2	547	343	204	0	547	
PKB	343	184	16	543	322	214	7	543	
PKS	291	185	3	479	347	130	2	479	
PDIP	309	230	7	546	258	285	3	546	
Golkar	305	231	0	536	223	312	1	536	
Gerindra	332	213	1	546	284	260	2	546	
Demokrat	294	242	8	544	228	313	3	544	
PAN	317	227	2	546	272	271	3	546	
PPP	337	170	13	520	294	213	13	520	
Hanura	293	236	7	536	212	322	2	536	
PBB	286	241	8	535	268	262	5	535	
PKPI	283	230	6	519	229	262	28	519	
Total	3.756	2.568	73	6.397	3.280	3.048	69	6.397	

Sumber: Diolah dari Komisi Pemilihan Umum (2014)

**Tabel 5.12 Jumlah Caleg pada Pemilu 2014
menurut Provinsi, Tempat Lahir dan Tempat Tinggal**

Provinsi	Tempat Lahir			Tempat Tinggal		
	Sama Dengan Provinsi Dapil	Luar Provinsi Dapil	Tidak Bersedia Dipublikasikan	Asal Provinsi Dapil	Luar Provinsi Dapil	Tidak Bersedia Dipublikasikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	122	32	2	93	60	3
Sumut	263	79	8	131	213	6
Sumbar	124	41	1	59	105	2
Riau	59	72	1	64	67	1
Jambi	48	33	-	45	35	1
Sumsel	129	63	2	84	105	5
Bengkulu	28	19	-	20	26	1
Lampung	113	97	2	91	118	3
Babel	21	15	-	14	22	-
Kepri	16	19	1	16	19	1
DKI Jakarta	99	149	2	206	42	2
Jabar	514	518	11	630	407	6
Jateng	538	362	13	343	558	12
DIY	41	55	-	53	43	-
Jatim	636	296	8	499	431	10
Banten	73	188	-	162	99	-
Bali	54	46	1	59	42	-
NTB	84	34	1	60	58	1
NTT	105	38	2	50	94	1
Kalbar	82	35	2	72	46	1
Kalteng	34	36	2	37	34	1
Kalsel	74	53	3	78	51	1
Kaltim	31	62	3	66	28	2
Sulut	37	35	1	29	43	1
Sulteng	39	33	-	34	37	1
Sulsel	162	30	-	102	88	2
Sultra	44	14	2	31	27	2
Gorontalo	24	12	-	13	23	-
Sulbar	14	21	1	14	22	-
Maluku	30	16	1	19	27	1
Malut	28	7	1	22	14	-
Papua Brt	72	40	2	65	47	2
Papua	18	18	-	19	17	-
Total	3.756	2.568	73	3.280	3.048	69

Sumber: Diolah dari Komisi Pemilihan Umum (2014)

5.4. Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden

Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan. Undang-Undang Dasar juga menyatakan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden.

Calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan dalam satu pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR. Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia. Jumlah suara sah dan suara tidak sah pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden disajikan pada Tabel 5.15.

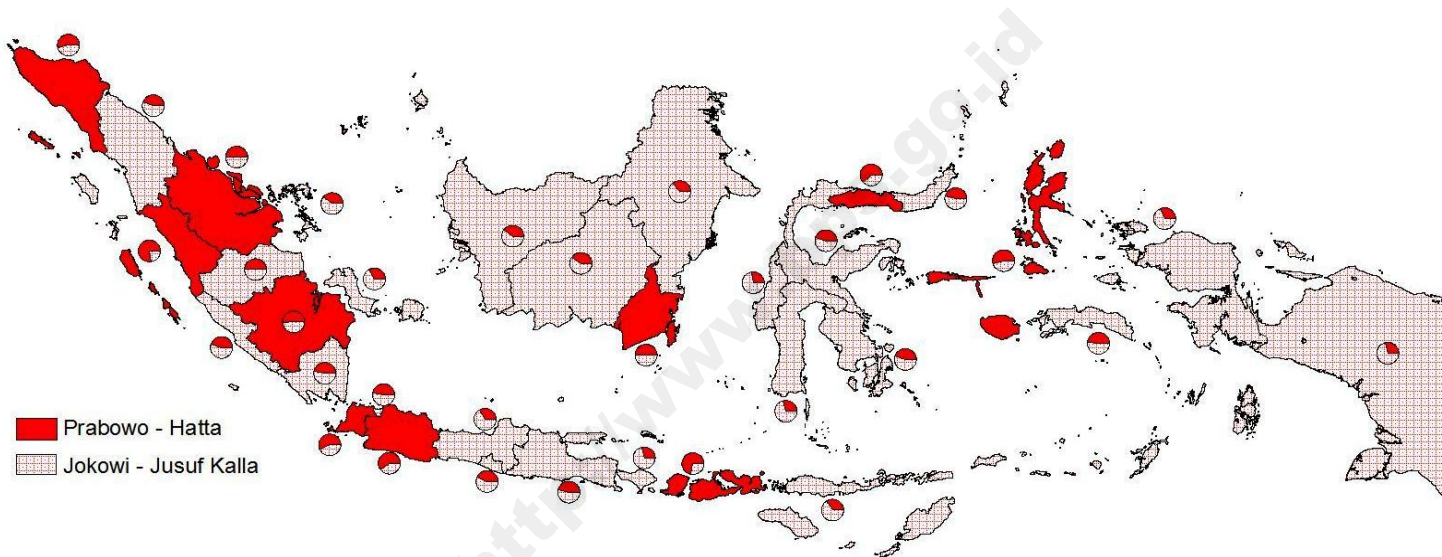
Apabila tidak ada pasangan calon terpilih, maka pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Apabila perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 (tiga) Pasangan Calon atau lebih, maka penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendominasi perolehan berdasarkan Provinsi pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dapat dilihat pada Gambar 5.8.

Tabel 5.13 Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Provinsi	Prabowo- Hatta	%	Jokowi- JK	%	Suara Sah
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
Aceh	1,089,290	54.39	913,309	45.61	2.002.599
Sumatera Utara	2,831,514	44.76	3,494,835	55.24	6.326.349
Sumatera Barat	1,797,505	76.92	539,308	23.08	2.336.813
Riau	1,349,338	50.12	1,342,817	49.88	2.692.155
Jambi	871,316	49.25	897,787	50.75	1.769.103
Sumatera Selatan	2,132,163	51.26	2,027,049	48.74	4.159.212
Bengkulu	433,173	45.27	523,669	54.73	956.842
Lampung	2,033,924	46.93	2,299,889	53.07	4.333.813
Bangka Belitung	200,706	32.74	412,359	67.26	613.065
Kepulauan Riau	332,908	40.37	491,819	59.63	824.727
DKI Jakarta	2,528,064	46.92	2,859,894	53.08	5.387.958
Jawa Barat	14,167,381	59.78	9,530,315	40.22	23.697.696
Jawa Tengah	6,485,720	33.35	12,959,540	66.65	19.445.260
DI Yogyakarta	977,342	44.19	1,234,249	55.81	2.211.591
Jawa Timur	10,277,088	46.83	11,669,313	53.17	21.946.401
Banten	3,192,671	57.10	2,398,631	42.90	5.591.302
Bali	614,241	28.58	1,535,110	71.42	2.149.351
Nusa Tenggara Barat	1,844,178	72.45	701,238	27.55	2.545.416
Nusa Tenggara Timur	769,391	34.08	1,488,076	65.92	2.257.467
Kalimantan Barat	1,032,354	39.62	1,573,046	60.38	2.605.400
Kalimantan Tengah	468,277	40.21	696,199	59.79	1.164.476
Kalimantan Selatan	941,809	50.05	939,748	49.95	1.881.557
Kalimantan Timur	687,734	36.62	1,190,156	63.38	1.877.890
Sulawesi Utara	620,095	46.12	724,553	53.88	1.344.648
Sulawesi Tengah	632,009	45.17	767,151	54.83	1.399.160
Sulawesi Selatan	1,214,857	28.57	3,037,026	71.43	4.251.883
Sulawesi Tenggara	511,134	45.10	622,217	54.90	1.133.351
Gorontalo	378,735	63.10	221,497	36.90	600.232
Sulawesi Barat	165,494	26.63	456,021	73.37	621.515
Maluku	433,981	49.48	443,04	50.52	877.021
Maluku Utara	306,792	54.45	256,601	45.55	563.393
Papua	769,132	27.51	2,026,735	72.49	2.795.867
Papua Barat	172,528	32.37	360,379	67.63	532.907
Luar Negeri	313,6	46.26	364,257	53.74	677.857
Jumlah	62,576,444	46.85	70,997,833	53.15	133.574.277

Sumber: Diolah dari Komisi Pemilihan Umum (2014)

Gambar 5.8 Suara Terbanyak Setiap Provinsi Pada Pilpres Tahun 2014



5.5 Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

Undang-Undang No 32/2004 menyebutkan bahwa DPRD sebagai bagian dari pemerintah daerah. Pada Pemilu DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, tidak dikenal *parliamentary threshold* sehingga banyak partai-partai yang tidak memiliki kursi di DPR RI tetapi memiliki kursi di DPRD. Khusus di Provinsi Aceh, jumlah kontestan sebanyak 44 Parpol, 38 Parpol nasional ditambah 6 Parpol lokal. Provinsi DKI Jakarta hanya menyelenggarakan Pemilu Legislatif tingkat Provinsi. Pemerintahan Kota di Jakarta hanya bersifat administratif sehingga tidak memiliki DPRD.

Jumlah Dapil DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota ditentukan berdasarkan jumlah penduduk di masing-masing wilayah. Dengan demikian, jumlah Dapil paling banyak di pulau Jawa karena memiliki jumlah penduduknya paling banyak. Hanya Sumatera Utara daerah di luar Jawa yang memiliki 12 Dapil, sama dengan jumlah yang dimiliki Jawa Barat. Jumlah tersebut sekaligus merupakan yang terbanyak di Indonesia. Sementara untuk tingkat kabupaten/Kota, Dapil paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Timur dengan 195 Dapil dan Provinsi Jawa Barat dengan 185 Dapil. Secara lengkap Dapil untuk Pemilu tahun 2014 ditampilkan pada Tabel 5.16.

Berdasarkan hasil Pemilu 2009, jumlah perempuan yang terpilih pada DPRD Provinsi masih terbilang rendah. Hingga tahun 2013, persentase perempuan di DPRD Provinsi yang tertinggi terdapat di Provinsi Maluku dengan 31,11%. Untuk persentase terendah terdapat di Provinsi Aceh dengan persentase 5,80% (Tabel 5.17). Pada tingkat Kabupaten/Kota, persentase perempuan terpilih terbesar pada Provinsi Sulawesi Utara sebesar 22,56 persen sementara paling rendah terdapat pada Provinsi Bali dengan 5,07 persen (Tabel 5.18).

Tabel 5.14 Daerah Pemilihan Pemilu 2014

Provinsi	Dapil Pemilihan Legislatif			Alokasi Kursi		
	Pusat	Provinsi	Kota/ Kabupaten	Pusat	Provinsi	Kota/ Kabupaten
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	2	10	92	13	81	650
Sumut	3	12	140	30	100	1.100
Sumbar	2	8	71	14	65	585
Riau	2	8	56	11	65	480
Jambi	1	6	46	7	55	375
Sumsel	2	10	69	17	75	590
Bengkulu	1	7	36	4	45	275
Lampung	2	8	74	18	85	590
Babel	1	6	26	3	45	190
Kepri	1	7	23	3	45	195
DKI Jakarta	3	10	-	21	106	-
Jabar	11	12	142	91	100	1.225
Jateng	10	10	185	77	100	1.570
DIY	1	7	27	8	55	220
Jatim	11	11	195	87	100	1.675
Banten	3	10	44	22	85	380
Bali	1	9	42	9	55	350
NTB	1	8	43	10	65	385
NTT	2	8	86	13	65	635
Kalbar	1	8	63	10	65	495
Kalteng	1	5	48	6	45	380
Kalsel	2	7	51	11	55	430
Kaltim	1	6	53	8	55	425
Sulut	1	6	53	6	45	390
Sulteng	1	6	44	6	45	335
Sulsel	3	11	98	24	85	815
Sultra	1	6	49	5	45	345
Gorontalo	1	6	25	3	45	160
Sulbar	1	7	20	3	45	170
Maluku	1	7	38	4	45	290
Malut	1	5	28	3	45	220
Papua Brt	1	5	38	10	45	245
Papua	1	7	97	3	55	725
Jumlah	77	259	2.102	560	2.112	16.895

Sumber: Diolah dari Komisi Pemilihan Umum (2014)

**Tabel 5.15 Komposisi DPRD Provinsi Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2011**

Provinsi	Laki-Laki	Perempuan	Total	Persentase Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	65	4	69	5,80
Sumatera Utara	83	16	99	16,16
Sumatera Barat	48	7	55	12,73
Riau	46	9	55	16,36
Jambi	40	5	45	11,11
Sumatera Selatan	64	11	75	14,67
Bengkulu	37	8	45	17,78
Lampung	60	15	75	20,00
Kep. Bangka Belitung	40	5	45	11,11
Kepulauan Riau	38	7	45	15,56
DKI Jakarta	72	22	94	23,40
Jawa Barat	77	23	100	23,00
Jawa Tengah	79	21	100	21,00
D.I.Yogyakarta	43	12	55	21,82
Jawa Timur	82	17	99	17,17
Banten	69	16	85	18,82
Bali	51	4	55	7,27
Nusa Tenggara Barat	49	6	55	10,91
Nusa Tenggara Timur	51	4	55	7,27
Kalimantan Barat	51	4	55	7,27
Kalimantan Tengah	37	8	45	17,78
Kalimantan Selatan	47	8	55	14,55
Kalimantan Timur	44	11	55	20,00
Sulawesi Utara	33	12	45	26,67
Sulawesi Tengah	37	8	45	17,78
Sulawesi Selatan	63	12	75	16,00
Sulawesi Tenggara	38	7	45	15,56
Gorontalo	36	9	45	20,00
Sulawesi Barat	40	5	45	11,11
Maluku	31	14	45	31,11
Maluku Utara	41	4	45	8,89
Papua Barat	37	7	44	15,91
Papua	51	5	56	8,93
Total	1.680	326	2.006	16.25

Sumber: BPS Provinsi

**Tabel 5.16 Komposisi DPRD Provinsi Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2012**

Provinsi	Laki-Laki	Perempuan	Total	Persentase Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	65	4	69	5,80
Sumatera Utara	83	17	100	17,00
Sumatera Barat	48	7	55	12,73
Riau	43	12	55	21,82
Jambi	39	6	45	13,33
Sumatera Selatan	64	11	75	14,67
Bengkulu	35	10	45	22,22
Lampung	60	15	75	20,00
Kep. Bangka Belitung	40	5	45	11,11
Kepulauan Riau	40	5	45	11,11
DKI Jakarta	71	23	94	24,47
Jawa Barat	76	24	100	24,00
Jawa Tengah	79	21	100	21,00
D.I. Yogyakarta	43	12	55	21,82
Jawa Timur	81	19	100	19,00
Banten	69	16	85	18,82
Bali	51	4	55	7,27
Nusa Tenggara Barat	49	6	55	10,91
Nusa Tenggara Timur	51	4	55	7,27
Kalimantan Barat	51	4	55	7,27
Kalimantan Tengah	37	8	45	17,78
Kalimantan Selatan	46	9	55	16,36
Kalimantan Timur	44	11	55	20,00
Sulawesi Utara	32	13	45	28,89
Sulawesi Tengah	36	9	45	20,00
Sulawesi Selatan	63	12	75	16,00
Sulawesi Tenggara	38	7	45	15,56
Gorontalo	36	9	45	20,00
Sulawesi Barat	40	5	45	11,11
Maluku	30	14	44	31,82
Maluku Utara	41	4	45	8,89
Papua Barat	38	6	44	13,64
Papua	51	5	56	8,93
T o t a l	1.670	337	2.007	16,79

Sumber: BPS Provinsi

**Tabel 5.17 Komposisi DPRD Provinsi Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2013**

Provinsi	Laki-Laki	Perempuan	Total	Persentase Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	62	7	69	10,14
Sumatera Utara	83	17	100	17,00
Sumatera Barat	48	7	55	12,73
Riau	43	12	55	21,82
Jambi	37	8	45	17,78
Sumatera Selatan	63	12	75	16,00
Bengkulu	36	9	45	20,00
Lampung	61	13	74	17,57
Kep. Bangka Belitung	41	4	45	8,89
Kepulauan Riau	39	6	45	13,33
DKI Jakarta	72	22	94	23,40
Jawa Barat	75	25	100	25,00
Jawa Tengah	79	21	100	21,00
D.I.Yogyakarta	42	13	55	23,64
Jawa Timur	83	17	100	17,00
Banten	70	15	85	17,65
Bali	50	5	55	9,09
Nusa Tenggara Barat	49	6	55	10,91
Nusa Tenggara Timur	51	4	55	7,27
Kalimantan Barat	51	4	55	7,27
Kalimantan Tengah	38	7	45	15,56
Kalimantan Selatan	48	7	55	12,73
Kalimantan Timur	44	11	55	20,00
Sulawesi Utara	32	13	45	28,89
Sulawesi Tengah	36	9	45	20,00
Sulawesi Selatan	63	12	75	16,00
Sulawesi Tenggara	38	7	45	15,56
Gorontalo	37	8	45	17,78
Sulawesi Barat	40	5	45	11,11
Maluku	30	15	45	33,33
Maluku Utara	41	4	45	8,89
Papua Barat	36	8	44	18,18
Papua	50	6	56	10,71
T o t a l	1.668	339	2.007	16,89

Sumber: BPS Provinsi

Tabel. 5.18 Jumlah Anggota DPRD Kabupaten/Kota Perempuan Tahun 2013

Provinsi	2013			% Perempuan
	Laki	Perempuan	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	596	44	640	6,88
Sumatera Utara	962	112	1.074	10,43
Sumatera Barat	514	41	555	7,39
Riau	400	40	440	9,09
Jambi	308	31	339	9,14
Sumatera Selatan	508	66	574	11,50
Bengkulu	227	33	260	12,69
Lampung	467	75	542	13,84
Kep. Bangka Belitung	160	15	175	8,57
Kepulauan Riau	164	21	185	11,35
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	1.016	191	1.207	15,82
Jawa Tengah	1.379	201	1.580	12,72
D.I.Yogyakarta	189	31	220	14,09
Jawa Timur	1.426	252	1.678	15,02
Banten	327	48	375	12,80
Bali	318	17	335	5,07
Nusa Tenggara Barat	315	20	335	5,97
Nusa Tenggara Timur	572	48	620	7,74
Kalimantan Barat	442	37	479	7,72
Kalimantan Tengah	291	59	350	16,86
Kalimantan Selatan	346	64	410	15,61
Kalimantan Timur	348	57	405	14,07
Sulawesi Utara	302	88	390	22,56
Sulawesi Tengah	276	48	324	14,81
Sulawesi Selatan	677	113	790	14,30
Sulawesi Tenggara	280	40	320	12,50
Gorontalo	141	24	165	14,55
Sulawesi Barat	131	19	150	12,67
Maluku	255	15	270	5,56
Maluku Utara	187	23	210	10,95
Papua Barat	216	18	234	7,69
Papua	601	66	667	9,90

Sumber: BPS Provinsi

5.6 Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung merupakan capaian baru dalam demokrasi Indonesia. Melalui Pilkada secara langsung, aspirasi rakyat dalam menentukan sendiri para pemimpin eksekutif daerah tersampaikan secara langsung tanpa distorsi sebagaimana jika dipilih oleh DPRD. Format pilkada secara langsung dimulai pada Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Berkaitan dengan pencalonan, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh 20 persen kursi di DPRD atau 25 persen suara pada Pemilu legislatif. Tabel 5.21 menampilkan waktu pelaksanaan dan banyaknya calon pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Jumlah DPT dan suara sah ditampilkan pada Tabel 5.22, sementara perolehan suara ditampilkan pada Tabel 5.23. Pada Tabel 5.24 ditampilkan jenis kelamin, tahun pelantikan serta latar belakang Gubernur terpilih hingga tahun 2014.

Pada banyak Pilkada, hampir selalu ditemui calon perseorangan setelah dibuka peluangnya melalui UU No 12/2008. Sekalipun demikian, jumlah yang mampu terpilih masih belum banyak. Pada tingkat Kabupaten/Kota hanya 12 kepala daerah yang terpilih melalui jalur perseorangan. Pada tingkat provinsi, bahkan tidak satupun calon perseorangan mampu memenangkan Pilkada. Jumlah yang minim juga terlihat pada kepala daerah perempuan. Pada tingkat provinsi hanya terdapat Ratu Atut Choisyah yang menjabat sebagai Gubernur Provinsi Banten. Setelah digantikan oleh Rano Karno pada 2015, praktis tak satupun ada Gubernur Perempuan. Sementara untuk Bupati/Walikota tercatat terdapat 17 Bupati/Walikota dan 23 Wabup/Wawali berjenis kelamin perempuan di seluruh Indonesia hingga Tahun 2013 (Tabel 5.25).

Tabel 5.19 Waktu Pelaksanaan dan Banyaknya Pasangan Calon Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi	Pelaksanaan Pemilihan	Jumlah Pasangan Calon
(1)	(2)	(3)
Aceh	9 April 2012	5
Sumatera Utara	7 Maret 2013	5
Sumatera Barat	9 Desember 2015	2
Riau	4 September 2013	5
Jambi	9 Desember 2015	2
Sumatera Selatan	6 Juni 2013	4
Bengkulu	9 Desember 2015	2
Lampung	2 Juni 2014	4
Kepulauan Bangka Belitung	23 Februari 2012	4
Kepulauan Riau	9 Desember 2015	2
DKI Jakarta	20 September 2012	5
Jawa Barat	24 Februari 2013	5
Jawa Tengah	26 Mei 2013	3
DI Yogyakarta	Gubernur Diangkat	-
Jawa Timur	29 Agustus 2013	4
Banten	22 Oktober 2011	3
Bali	15 Mei 2013	2
Nusa Tenggara Barat	13 Mei 2013	4
Nusa Tenggara Timur	18 Maret 2013	5
Kalimantan Barat	20 September 2012	4
Kalimantan Tengah	9 Desember 2015	3
Kalimantan Selatan	9 Desember 2015	3
Kalimantan Utara	9 Desember 2015	2
Kalimantan Timur	10 September 2013	3
Sulawesi Utara	9 Desember 2015	3
Sulawesi Tengah	6 April 2011	5
Sulawesi Selatan	22 Januari 2013	3
Sulawesi Tenggara	4 November 2012	3
Gorontalo	16 November 2011	3
Sulawesi Barat	10 Oktober 2011	3
Maluku	11 Juni 2013	5
Maluku Utara	1 Juli 2013	6
Papua Barat	9 November 2011	4
Papua	29 Januari 2013	6

Sumber: Diolah dari pemberitaan media

Tabel 5.20 Jumlah Pemilih Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Tingkat Provinsi

Provinsi	Terdaftar di DPT	Suara Sah	% suara sah terhadap DPT
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	3.244.729	2.381.183	73,39
Sumatera Utara	10.295.013	4.861.467	47,22
Sumatera Barat	3.496.836	2.005.989	57,36%
Riau	4.000.459	2.220.154	55,49
Jambi	1.607.572	2.439.501	65,89
Sumatera Selatan	5.825.765	3.759.738	64,53
Bengkulu	1.423.523	901.529	63,33
Lampung	5.868.304	4.054.128	69,08
Kepulauan Bangka Belitung	872.102	510.360	58,52
Kepulauan Riau	1.186.950	653.203	55,03
DKI Jakarta	6.996.951	4.952.945	70,79
Jawa Barat	32.536.980	20.115.423	61,82
Jawa Tengah	27.385.985	14.259.945	52,07
DI Yogyakarta ¹⁾	-	-	-
Jawa Timur	30.019.300	17.343.832	57,77
Banten	7.118.587	4.302.424	60,44
Bali	2.925.679	2.126.472	72,68
Nusa Tenggara Barat	3.478.892	2.341.492	67,30
Nusa Tenggara Timur	3.027.094	2.081.942	68,77
Kalimantan Barat	3.377.997	2.350.026	70,70
Kalimantan Tengah	1.955.961	1.024.819	52,39
Kalimantan Selatan	2.848.478	1.799.885	63,18
Kalimantan Timur	2.795.821	1.499.097	53,61
Kalimantan Utara	433.623	270.776	62,44
Sulawesi Utara	1.939.132	1.258.948	64,92
Sulawesi Tengah	1.785.763	1.275.507	75,87
Sulawesi Selatan	6.283.811	4.294.960	68,34
Sulawesi Tenggara	1.701.698	1.060.398	62,31
Gorontalo	756.758	600.323	79,33
Sulawesi Barat	819.848	612.087	74,66
Maluku	773.589	1.186.631	65,19
Maluku Utara	527.115	832.135	63,34
Papua Barat	629.032	425.076	67,58
Papua	2.705.775	2.320.791	51,69

Sumber: Diolah dari pemberitaan media

Catatan: 1) Gubernur diangkat

Tabel 5.21 Perolehan Suara dan Partai Pendukung Kepala Daerah Terpilih

Provinsi	Perolehan Suara		Partai Pendukung
	Jumlah	%	
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	1.327.695	55,75	Partai Aceh
Sumatera Utara	1.604.337	33,00	PKS, Hanura, PBR, Patriot, PKNU
Sumatera Barat	1.175.858	58,62	PKS, Gerindra
Riau	1.322.327	59,56	Golkar
Jambi	968.497	60,25	Golkar, PAN, Nasdem, PKB, Hanura, PBB
Sumatera Selatan	1.405.510	37,38	Golkar, PBB, PNBK, PAN, PD, PBR
Bengkulu	517.190	57,37	PKB, PKPI, Hanura, Nasdem, Gerindra, Golkar, PPP dan PAN
Lampung	1.816.533	44,80	PD, PKS, PKPB, PDK, Partai Buruh, PMB, PDS
Kep. Bangka Belitung	169.790	33,20	Golkar, PKS
Kepulauan Riau	347.515	53,20	Demokrat, Nasdem, Partai Gerindra, PKB dan PPP
DKI Jakarta	2.472.130	53,82	PDI-P, Gerindra
Jawa Barat	6.515.313	32,38	PKS, PPP, Hanura, PBB
Jawa Tengah	6.962.417	48,82	PDI-P
DI Yogyakarta	-	-	Gubernur Diangkat
Jawa Timur	8.195.816	47,25	Demokrat, PKS, PAN, Golkar, PKNU, Hanura, Gerindra, PPP
Banten	2.136.035	49,65	Golkar, PDIP, Hanura, Gerindra, PBB, PKB, PAN, PPNUI, PKPB, PPD, PDS
Bali	1.063.734	50,02	Golkar, PD, P. Hanura, PKP, PAN, PKPI, PNBK, PKPB, P. Gerindra
Nusa Tenggara Barat	1.038.638	44,35	Demokrat, P. Golkar, PDI-P, PPP, PAN, PKB, P. Gerindra
Nusa Tenggara Timur	1.067.054	51,25	PDI-P, PKB, PPP, P. Hanura, PKS
Kalimantan Barat	1.225.185	52,13	PDI-P, Demokrat
Kalimantan Tengah	518.154	51,50	Gerindra, Golkar, Demokrat, PKB, PAN, dan PPP
Kalimantan Selatan	739.588	41,09	PDIP, Hanura, Gerindra, PKS, dan PAN
Kalimantan Timur	644.887	43,02	Golkar, Demokrat, PAN, PKS, PBB, Partai Patriot, PDK, PDS, PKB, Hanura
Kalimantan Utara	143.592	53,03	Demokrat, PKS, PDIP, PAN, PBB, Golkar, Gerindra
Sulawesi Utara	647.252	51,41	PDIP
Sulawesi Tengah	411.113	36,15	PBB, PAN, PKB, PKPI
Sulawesi Selatan	2.251.407	52,41	Golkar, PAN, PDIP, PDK, PKNU, PDS
Sulawesi Tenggara	522.807	49,30	PKS, PD, PAN
Gorontalo	264.011	43,98	Golkar, PPP
Sulawesi Barat	296.633	48,46	Golkar, PDI-P, Demokrat, Hanura, PKS, PKPB.
Maluku	389.884	50,39	Golkar, PKS, PPP, PAN, PNI Marhaenisme, Patriot, PDS
Maluku Utara	268.661	50,96	Golkar, Partai Hanura, PPP, PDS, PKPB
Papua Barat	186.040	43,77	Golkar, Demokrat, Hanura, Gerindra, PPP, PBB, PPI, PKPB, Patriot
Papua	1.199.657	44,21	PD, PKS, PKPB, PNIM, PNBKI, Patriot, PKPI

Sumber: Diolah dari pemberitaan media

Tabel 5.22 Kepala Daerah Hasil Pilkada menurut Jenis Kelamin, Tahun Pelantikan dan Jabatan Sebelum Menjadi Gubernur Terpilih

Provinsi	Jenis Kelamin		Pelantikan (Tahun)	Jabatan/Pekerjaan sebelum menjadi Gubernur Terpilih
	Guber nur	Wakil Gubernur		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	L	L	2012	Dokter
Sumatera Utara	L	L	2013	Wakil Gubernur Sumut
Sumatera Barat	L	L	2016	Gubernur Sumatera Barat
Riau	L	L	2013	Bupati Rokan Hilir
Jambi	L	L	2016	Bupati Tanjung Jabung Timur
Sumatera Selatan	L	L	2013	Gubernur Sumsel
Bengkulu	L	L	2016	Bupati Musi Rawas
Lampung	L	L	2014	Ketua Partai Demokrat Provinsi Lampung
Kepulauan Bangka Belitung	L	L	2013	Gubernur Kep. Babel
Kepulauan Riau	L	L	2016	Gubernur Kepri
DKI Jakarta	L	L	2012	Walikota Surakarta
Jawa Barat	L	L	2013	Gubernur Jawa Barat
Jawa Tengah	L	L	2013	Anggota DPR RI
D I Yogyakarta	L	L	2012	Gubernur DIY
Jawa Timur	L	L	2013	Gubernur Jawa Timur
Banten	P	L	2012	Gubernur Banten
Bali	L	L	2013	Gubernur Bali
Nusa Tenggara Barat	L	L	2013	Gubernur NTB
Nusa Tenggara Timur	L	L	2013	Gubernur NTT
Kalimantan Barat	L	L	2013	Gubernur Kalbar
Kalimantan Tengah	L	L	2016	Anggota DPR-RI
Kalimantan Selatan	L	L	2016	Pengusaha
Kalimantan Timur	L	L	2013	Gubernur Kaltim
Kalimantan Utara	L	L	2016	PNS (Sekda Kaltara)
Sulawesi Utara	L	L	2016	Anggota DPR-RI
Sulawesi Tengah	L	L	2011	Bupati Parigi Moutong
Sulawesi Selatan	L	L	2013	Gubernur Sulsel
Sulawesi Tenggara	L	L	2013	Gubernur Sultra
Gorontalo	L	L	2012	Bupati Gorontalo Utara
Sulawesi Barat	L	L	2011	Gubernur Sulawesi Barat
Maluku	L	L	2013	Wakil Gubernur Maluku
Maluku Utara	L	L	2013	Bupati Kep.Sula
Papua Barat	L	L	2013	Gubernur Papua Barat
Papua	L	L	2012	Bupati Puncak Jaya

Sumber: Diolah dari pemberitaan media

Tabel 5.23 Jenis Kelamin Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Kota dan Kepala Daerah Terpilih Melalui Jalur Perseorangan

Provinsi	Jenis Kelamin				Perseorangan
	Bupati/Walikota		Wabup/Wawali		
	Laki	Perempuan	Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	23	0	22	1	1
Sumatera Utara*	33	0	29	1	1
Sumatera Barat*	19	0	18	0	0
Riau	12	0	12	0	0
Jambi	11	0	11	0	0
Sumatera Selatan*	15	1	14	1	0
Bengkulu*	10	0	8	1	1
Lampung*	15	0	12	0	1
Kep. Bangka Belitung*	7	0	6	0	0
Kepulauan Riau	7	0	7	0	0
DKI Jakarta	6	0	6	0	0
Jawa Barat*	24	3	24	0	1
Jawa Tengah*	33	2	28	3	0
D I Yogyakarta	3	2	4	1	0
Jawa Timur*	35	3	34	3	1
Banten	7	1	6	2	0
Bali	8	1	9	0	0
Nusa Tenggara Barat	10	0	10	0	1
Nusa Tenggara Timur	22	0	22	0	2
Kalimantan Barat	13	1	14	0	1
Kalimantan Tengah	14	0	12	2	1
Kalimantan Selatan*	13	0	12	0	0
Kalimantan Timur*	9	1	9	0	0
Kalimantan Utara	5	0	5	0	0
Sulawesi Utara*	13	2	13	1	0
Sulawesi Tengah*	12	0	11	0	0
Sulawesi Selatan*	24	0	22	1	0
Sulawesi Tenggara*	13	0	10	2	0
Gorontalo*	6	0	4	0	1
Sulawesi Barat*	6	0	5	0	0
Maluku	8	0	6	2	0
Maluku Utara	9	0	8	1	0
Papua Barat*	13	0	10	1	0
Papua*	29	0	27	0	0
Total	487	17	450	23	12

Sumber: Diolah dari Kementerian dalam Negeri (November 2013)

Catatan : Jumlah wabup/wawali tidak sama dengan jumlah bupati/walikota karena adanya wilayah kabupaten/kota yang wabup/wawali berhalangan tetap

<http://www.bps.go.id>

**DEMOKRASI DAN
KERAGAMAN INDONESIA**

6

<http://www.bps.go.id>

6.1 Demokrasi

Demokrasi merupakan sistem politik yang memberikan ruang bagi keadilan dan persamaan bagi semua warga negara. Sistem ini menjadi pilihan paling populer yang digunakan negara-negara di dunia. Sekalipun demikian, pada prakteknya negara-negara yang mengaku demokratis tidak otomatis melakukan pengelolaan negara dan kekuasaan dengan norma-norma demokrasi. Assiddiqie (2005: 242-245) mengidentifikasi tiga persoalan yang muncul dalam kesenjangan antara gagasan dan pelaksanaan demokrasi. *Pertama*, hal yang paling nyata, meskipun 97 persen negara yang ada di zaman modern ini mengklaim menganut sistem demokrasi atau kedaulatan rakyat, tetapi praktek penerapannya di lapangan berbeda antara satu negara dengan yang lain, mulai dari Amerika Serikat sampai ke RRC, Kuba, bahkan eks-Uni Sovyet semua mengklaim menganut demokrasi. Perbedaan ini antara lain karena adanya jarak konseptual antara kaum individualis dengan kaum kolektivis. Kaum liberalis-individualis menganggap rakyat yang berdaulat adalah individu yang otonom sedangkan kaum kolektivis-komunis menganggap rakyat yang berdaulat dalam pengertian kolektif dan totaliter (*totalitarian*). *Kedua*, demokrasi juga mendapat tantangan dari kaum agamawan yang lebih meyakini kekuasaan tertinggi itu berasal dari Tuhan, dan bukan berasal dari rakyat. *Ketiga*, gagasan demokrasi itu sebagaimana terlihat dalam kenyataan beragamnya cara orang mempraktekan, seringkali dipraktekan secara sepihak oleh para penguasa. Bahkan di sepanjang sejarah, corak penerapannya juga terus berkembang dari waktu ke waktu.

Dengan konsepsi tersebut, tidak ada jaminan jika demokrasi menjadi defisit sebagai jargon penguasa. Diperlukan instrumen universal yang dapat mengukur pelaksanaan demokrasi dan perkembangannya di berbagai negara. Beberapa lembaga internasional menawarkan sistem yang memungkinkan untuk melakukan kuantifikasi terhadap demokrasi. Freedom House misalnya, sejak tahun 1972 melakukan pengukuran demokrasi dengan klasifikasi *free countries*, *partly free*

countries, dan *not free countries*. Indonesia yang sebelumnya digolongkan sebagai negara dengan status *partly free*, sejak tahun 2008 telah digolongkan sebagai *free countries*. Dalam tren global yang dibuat *Freedom House*, terlihat bahwa jumlah negara dengan status *free countries* persentasenya menurun pada tahun 2016 (Tabel 6.1). Selain *Freedom House*, *The Economist* juga membuat pengukuran serupa tentang demokrasi dengan kategori *full democracies*, *flawed democracies*, *hybrid regimes*, serta *authoritarian regimes* (Tabel 6.2). *The economist* juga mencantumkan ranking dari semua negara yang diukur. Pada Tahun 2007 Indonesia menempati ranking 65, turun menjadi peringkat 69 pada tahun 2008 dan naik menjadi peringkat 60 pada tahun 2010 dan menempati posisi 58 pada Tahun 2012 (Tabel 6.3). Indonesia, sejak tahun 2010 telah mengembangkan pengukuran demokrasi berbasis provinsi yang disebut Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang disusun oleh BPS dan Bappenas. Metode penelitian menggunakan pendekatan triangulasi, yang merupakan kombinasi antara pendekatan kuantitatif dengan kualitatif. Pendekatan kuantitatif diperoleh melalui koding koran dan dokumen, sedangkan kualitatif melalui *focus group discussion* (FGD) dan wawancara mendalam.

Indeks ini juga menghasilkan angka nasional, yang merupakan rata-rata dari indeks provinsi. Aspek yang diukur dalam IDI di antaranya; kebebasan sipil, hak-hak politik, serta lembaga demokrasi. Pada Tabel 6.5 dapat dilihat perbandingan IDI antar provinsi pada tahun 2009 – 2015. Pada Tabel 6.6 - 6.11 ditampilkan peringkat pengukuran IDI selama periode tahun 2009 – 2015. Aspek-aspek dalam pengukuran IDI di provinsi tersebut bisa saja memiliki ranking yang berbeda karena IDI merupakan indeks komposit dengan bobot masing-masing aspek berbeda. Skor tertinggi untuk tiap aspek pada IDI tahun 2009 – 2015 ditampilkan pada Tabel 6.11 - 6.15.

Tabel 6.1. Status Demokrasi Negara-Negara Dunia Tahun 1984 – 2016

Tahun	Jumlah Negara	Free Countries		Partly Free Countries		Not Free Countries	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2016	195	86	44	59	30	50	26
2015	168	89	53	28	17	51	30
2014	195	88	45	59	30	48	25
2013	195	89	46	59	30	47	24
2012	195	87	45	60	31	48	25
2011	195	88	45	60	31	48	24
2010	194	87	45	60	31	47	24
2009	194	89	46	58	30	47	24
2008	193	89	46	62	32	42	22
2007	193	90	47	60	31	43	22
2006	193	90	47	58	30	45	23
2005	192	89	46	58	30	45	24
2004	192	89	46	58	28	49	26
2003	192	88	46	55	29	49	25
2002	192	89	46	55	29	48	25
2001	192	85	44	59	31	48	25
2000	192	86	45	58	30	48	25
1999	192	85	44	60	31	47	25
1998	191	88	46	53	28	50	26
1997	191	81	42	57	30	53	28
1996	191	79	41	59	31	53	28
1995	191	76	40	62	32	53	28
1994	191	76	40	61	32	54	28
1993	190	72	38	63	33	55	29
1992	186	75	40	73	39	38	21
1991	183	76	42	65	35	42	23
1990	165	65	40	50	30	50	30
1989	167	61	37	44	26	62	37
1988	167	60	36	39	23	68	41
1987	167	58	35	58	35	51	30
1986	167	57	34	57	34	53	32
1985	167	56	34	46	34	55	33
1984	167	53	32	59	35	55	33

Sumber: *Freedom In The World 2016*, Freedom House

Tabel 6.2 Indeks Demokrasi Dunia Berdasarkan Tipe Rezim

Status	Jumlah Negara	% Negara	% Dari Populasi Dunia
(1)	(2)	(3)	(4)
Full democracies	20	12,0	8,9
Flawed democracies	59	35,3	39,5
Hybrid regimes	37	22,2	17,5
Authoritarian regimes	51	30,5	34,1

Sumber: Democracy index 2015, The Economist (2016)

Tabel 6.3 Peringkat Demokrasi Indonesia Tahun 2007-2014
Versi *The Economist*

Tahun	Rang king	Total Skor	Skor Kategori					Status
			Proses Pemilu dan Pluralisme	Fungsi Pemerintah	Partisipasi Politik	Budaya Politik	Kebebasan Sipil	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2015	49	7,03	7,75	7,14	6,67	6,25	7,35	Flawed Democracies
2014	49	6,95	7,33	7,14	6,67	6,25	7,35	Flawed Democracies
2013	54	6,82	6,92	7,50	6,67	6,25	6,76	Flawed Democracies
2012	53	6,76	6,92	7,50	6,11	5,63	7,65	Flawed Democracies
2011	60	6,53	6,92	7,50	5,56	5,63	7,06	Flawed Democracies
2010	60	6,53	6,92	7,00	5,00	5,63	7,06	Flawed Democracies
2008	69	6,34	6,92	6,76	5,00	6,25	6,76	Flawed Democracies
2007	65	6,41	6,92	7,14	5,00	6,25	6,76	Flawed Democracies

Sumber: Democracy index, The Economist (2016)

Tabel 6.4 IDI Menurut Provinsi Tahun 2009 – 2015

Provinsi	Skor						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	66,29	65,36	55,54	54,02	63,56	72,29	67,78
Sumatera Utara	60,20	63,45	66,15	58,51	58,80	68,02	69,01
Sumatera Barat	60,29	63,04	65,02	60,82	54,11	63,99	67,46
Riau	75,85	71,45	70,65	67,00	68,37	68,40	65,83
Jambi	71,00	65,88	70,46	68,81	64,41	71,15	70,68
Sumatera Selatan	72,52	73,65	67,92	73,17	67,12	74,82	79,81
Bengkulu	64,76	70,78	71,36	61,70	59,17	71,70	73,60
Lampung	67,47	67,80	74,08	72,26	63,13	71,62	65,95
Kep. Bangka Belitung	67,01	65,94	67,13	69,37	68,79	75,32	72,31
Kepulauan Riau	73,61	62,89	70,78	65,61	66,50	68,39	70,26
DKI Jakarta	73,91	77,44	77,81	77,72	71,18	84,70	85,32
Jawa Barat	71,07	59,41	66,18	57,05	65,18	71,52	73,04
Jawa Tengah	66,45	63,42	65,59	63,79	60,84	77,44	69,75
DI Yogyakarta	67,55	74,33	71,67	72,96	72,36	82,71	83,19
Jawa Timur	62,49	55,12	55,98	54,99	59,32	70,36	76,90
Banten	67,98	60,60	67,37	65,29	69,79	75,50	68,46
Bali	70,35	72,44	74,20	71,75	72,22	76,13	79,83
Nusa Tenggara Barat	58,12	58,13	54,49	57,97	57,22	62,62	65,08
Nusa Tenggara Timur	71,64	72,05	72,34	72,67	73,29	68,81	78,47
Kalimantan Barat	72,38	69,32	74,86	65,38	67,52	80,58	76,40
Kalimantan Tengah	77,63	71,10	76,28	65,78	64,15	79,00	73,46
Kalimantan Selatan	66,63	70,94	66,47	61,13	63,71	70,84	74,76
Kalimantan Timur	72,31	73,04	66,37	71,23	68,13	77,77	81,24
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	80,16
Sulawesi Utara	70,94	65,94	71,19	76,50	73,11	83,94	79,40
Sulawesi Tengah	66,02	66,63	64,00	64,97	64,50	74,36	76,67
Sulawesi Selatan	61,48	56,67	65,31	68,55	65,20	75,30	67,90
Sulawesi Tenggara	64,29	54,79	57,56	57,26	52,61	70,13	69,44
Gorontalo	73,50	64,97	62,77	59,37	67,21	73,82	76,77
Sulawesi Barat	67,99	68,82	66,36	63,65	64,02	76,69	68,25
Maluku	69,07	69,51	68,38	59,68	66,23	72,72	65,90
Maluku Utara	67,21	59,92	59,17	66,83	64,06	67,90	61,52
Papua Barat	63,06	67,75	61,78	65,70	60,70	65,65	59,97
Papua	63,80	60,26	59,05	60,71	60,92	62,15	57,55
Indonesia	67,30	63,17	65,48	62,63	63,72	73,04	72,82

Sumber: BPS (2016)

Tabel 6.5 Indeks Demokrasi Indonesia menurut Peringkat dan Aspek, Tahun 2009

Peringkat	Provinsi	Aspek			Indeks Demokrasi
		Kebebasan Sipil	Hak-hak Politik	Lembaga Demokrasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Kalimantan Tengah	98,45	60,50	78,69	77,63
2	Riau	93,14	65,40	70,68	75,85
3	DKI Jakarta	91,65	52,20	86,09	73,91
4	Kepulauan Riau	96,22	59,47	67,62	73,61
5	Gorontalo	96,05	56,39	72,32	73,50
6	Sumatera Selatan	95,42	56,07	69,83	72,52
7	Kalimantan Barat	98,29	53,46	69,85	72,38
8	Kalimantan Timur	98,22	54,78	67,57	72,31
9	Nusa Tenggara Timur	95,55	51,46	73,63	71,64
10	Jawa Barat	85,84	68,48	56,61	71,07
11	Jambi	95,86	50,41	72,43	71,00
12	Sulawesi Utara	92,23	58,50	63,91	70,94
13	Bali	93,97	49,82	73,24	70,35
14	Maluku	92,77	52,05	66,30	69,07
15	Sulawesi Barat	93,82	53,09	59,15	67,99
16	Banten	95,46	49,47	62,83	67,98
17	DI Yogyakarta	92,15	52,52	60,48	67,55
18	Lampung	90,57	51,81	63,27	67,47
19	Maluku Utara	93,61	46,30	67,23	67,21
20	Bangka Belitung	96,51	48,29	59,65	67,01
21	Kalimantan Selatan	68,24	62,63	70,95	66,63
22	Jawa Tengah	86,48	51,85	64,43	66,45
23	Aceh	64,42	70,39	62,13	66,29
24	Sulawesi Tengah	98,51	45,90	57,14	66,02
25	Bengkulu	94,26	54,03	44,70	64,76
26	Sulawesi Tenggara	94,66	43,97	58,37	64,29
27	Papua	92,83	43,84	58,97	63,80
28	Papua Barat	93,14	37,09	66,48	63,06
29	Jawa Timur	83,30	50,96	54,64	62,49
30	Sulawesi Selatan	82,94	42,36	64,88	61,48
31	Sumatera Barat	63,06	53,57	67,48	60,29
32	Sumatera Utara	84,16	41,26	60,14	60,20
33	Nusa Tenggara Barat	68,05	47,50	62,48	58,12
	Indonesia	86,97	54,60	62,72	67,30

Sumber: BPS (2010)

Tabel 6.6 Indeks Demokrasi Indonesia menurut Peringkat dan Aspek, Tahun 2010

Peringkat	Provinsi	Aspek			Indeks Demokrasi
		Kebebasan Sipil	Hak-hak Politik	Lembaga Demokrasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	DKI Jakarta	92,46	56,19	92,30	77,44
2	DI Yogyakarta	91,24	55,96	82,25	74,33
3	Sumatera Selatan	100,00	55,17	69,85	73,65
4	Kalimantan Timur	97,79	53,89	72,34	73,04
5	Bali	94,10	51,52	78,43	72,44
6	Nusa Tenggara Timur	95,55	55,89	68,15	72,05
7	Riau	91,02	47,19	85,39	71,45
8	Kalimantan Tengah	94,51	56,05	65,57	71,10
9	Kalimantan Selatan	67,74	72,66	72,25	70,94
10	Bengkulu	94,40	64,35	51,29	70,78
11	Maluku	96,22	48,12	69,89	69,51
12	Kalimantan Barat	99,17	45,19	70,11	69,32
13	Sulawesi Barat	94,48	47,22	66,06	68,82
14	Lampung	94,39	53,90	56,44	67,80
15	Papua Barat	99,84	44,24	64,73	67,75
16	Sulawesi Tengah	92,19	51,82	58,01	66,63
17	Bangka Belitung	85,95	48,44	68,57	65,94
18	Sulawesi Utara	92,98	44,90	65,34	65,94
19	Jambi	85,15	48,14	69,81	65,88
20	Aceh	69,98	62,63	63,87	65,36
21	Gorontalo	82,55	51,72	63,90	64,97
22	Sumatera Utara	76,64	57,42	56,45	63,45
23	Jawa Tengah	84,83	46,29	63,70	63,42
24	Sumatera Barat	58,34	63,90	67,59	63,04
25	Kepulauan Riau	87,04	39,80	69,20	62,89
26	Banten	83,17	38,70	66,99	60,60
27	Papua	90,72	31,76	67,22	60,26
28	Maluku Utara	92,59	30,82	65,06	59,92
29	Jawa barat	74,41	46,74	60,67	59,41
30	Nusa Tenggara Barat	67,22	46,48	65,19	58,13
31	Sulawesi Selatan	78,19	32,40	68,17	56,67
32	Jawa Timur	78,48	42,06	46,47	55,12
33	Sulawesi Tenggara	83,71	30,46	57,06	54,79
	Indonesia	82,53	47,87	63,11	63,17

Sumber: BPS (2011)

Tabel 6.7 Indeks Demokrasi Indonesia menurut Peringkat dan Aspek, Tahun 2011

Peringkat	Provinsi	Aspek			Indeks Demokrasi
		Kebebasan Sipil	Hak-hak Politik	Lembaga Demokrasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	DKI Jakarta	89,94	58,32	93,50	77,81
2	Kalimantan Tengah	92,56	54,73	90,04	76,28
3	Kalimantan Barat	97,15	49,34	87,38	74,86
4	Bali	95,44	50,08	85,79	74,20
5	Lampung	93,14	61,15	70,64	74,08
6	Nusa Tenggara Timur	96,79	47,56	80,97	72,34
7	D.I. Yogyakarta	87,22	52,35	82,81	71,67
8	Bengkulu	94,10	59,47	61,63	71,36
9	Sulawesi Utara	98,44	52,86	66,03	71,19
10	Kepulauan Riau	87,15	56,00	73,66	70,78
11	Riau	83,12	52,90	83,18	70,65
12	Jambi	91,62	46,27	82,27	70,46
13	Maluku	90,70	46,14	75,61	68,38
14	Sumatera Selatan	84,05	49,41	77,05	67,92
15	Banten	80,41	44,57	87,18	67,37
16	Kep. Bangka Belitung	88,27	47,11	72,33	67,13
17	Kalimantan Selatan	56,33	64,25	82,76	66,47
18	Kalimantan Timur	91,84	45,12	68,10	66,37
19	Sulawesi Barat	94,80	42,65	68,26	66,36
20	Jawa Barat	78,92	46,42	81,55	66,18
21	Sumatera Utara	79,23	59,47	60,31	66,15
22	Jawa Tengah	84,05	46,29	73,04	65,59
23	Sulawesi Selatan	80,97	39,33	86,87	65,31
24	Sumatera Barat	60,57	59,21	79,83	65,02
25	Sulawesi Tengah	92,23	37,01	71,36	64,00
26	Gorontalo	81,80	44,36	68,08	62,77
27	Papua Barat	93,59	43,99	50,03	61,78
28	Maluku Utara	90,04	32,61	62,56	59,17
29	Papua	87,73	29,43	70,04	59,05
30	Sulawesi Tenggara	85,81	29,18	67,11	57,56
31	Jawa Timur	71,58	40,32	61,23	55,98
32	Aceh	58,65	47,90	63,77	55,54
33	Nusa Tenggara Barat	55,45	49,60	61,06	54,49
Indonesia		80,79	47,54	74,72	65,48

Sumber: BPS (2012)

Tabel 6.8 Indeks Demokrasi Indonesia menurut Peringkat dan Aspek, Tahun 2012

Peringkat	Provinsi	Aspek			Indeks Demokrasi
		Kebebasan Sipil	Hak-hak Politik	Lembaga Demokrasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	DKI Jakarta	88,11	62,52	88,81	77,72
2	Sulawesi Utara	95,64	58,65	80,77	76,50
3	Sumatera Selatan	93,26	55,21	76,42	73,17
4	DI Yogyakarta	87,39	55,52	82,52	72,96
5	Nusa Tenggara Timur	91,06	50,89	84,15	72,67
6	Lampung	94,14	50,60	79,16	72,26
7	Bali	94,18	45,00	86,01	71,75
8	Kaltim	97,16	51,69	69,68	71,23
9	Bangka Belitung	83,09	51,21	80,97	69,37
10	Jambi	86,23	46,60	82,18	68,81
11	Sulawesi Selatan	87,07	43,74	84,66	68,55
12	Riau	80,21	47,16	81,89	67,00
13	Maluku Utara	88,15	50,13	66,55	66,83
14	Kalimantan Tengah	68,44	51,05	85,82	65,78
15	Papua Barat	94,42	45,74	61,27	65,70
16	Kepulauan Riau	82,68	49,98	68,95	65,61
17	Kalimantan Barat	92,37	37,18	76,23	65,38
18	Banten	79,20	51,03	70,42	65,29
19	Sulawesi Tengah	93,43	37,65	72,55	64,97
20	Jawa Tengah	75,03	46,29	77,46	63,79
21	Sulawesi Barat	88,67	35,92	76,22	63,65
22	Bengkulu	77,76	48,93	61,79	61,70
23	Kalimantan Selatan	49,51	52,59	89,33	61,13
24	Sumatera Barat	57,10	50,85	81,32	60,82
25	Papua	91,11	32,99	66,50	60,71
26	Maluku	76,05	45,08	62,27	59,68
27	Gorontalo	73,25	50,76	55,59	59,37
28	Sumatera Utara	73,85	49,82	53,01	58,51
29	Nusa Tenggara Barat	58,31	49,60	70,85	57,97
30	Sulawesi Tenggara	91,39	29,50	58,44	57,26
31	Jawa Barat	65,93	46,58	62,51	57,05
32	Jawa Timur	80,97	36,17	52,22	54,99
33	Aceh	60,16	47,16	57,21	54,02
	Indonesia	77,94	46,33	69,28	62,63

Sumber: BPS (2013)

Tabel 6.9 Indeks Demokrasi Indonesia menurut Peringkat dan Aspek, Tahun 2013

Peringkat	Provinsi	Aspek			Indeks Demokrasi
		Kebebasan Sipil	Hak-hak Politik	Lembaga Demokrasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nusa Tenggara Timur	95,59	58,83	68,23	73,29
2	Sulawesi Utara	92,44	62,55	65,56	73,11
3	D.I.Yogyakarta	90,78	50,65	83,69	72,36
4	Bali	92,55	52,87	77,38	72,22
5	DKI Jakarta	88,72	55,08	74,69	71,18
6	Banten	81,39	51,03	85,00	69,79
7	Kep. Bangka Belitung	85,16	50,60	77,09	68,79
8	Riau	77,71	52,19	82,32	68,37
9	Kalimantan Timur	92,14	55,36	58,20	68,13
10	Kalimantan Barat	97,54	49,36	58,61	67,52
11	Gorontalo	79,31	58,26	66,22	67,21
12	Sumatera Selatan	91,45	50,32	63,22	67,12
13	Kepulauan Riau	80,08	49,63	76,21	66,50
14	Maluku	81,52	50,53	71,95	66,23
15	Sulawesi Selatan	81,30	50,62	68,10	65,20
16	Jawa Barat	79,84	46,74	76,05	65,18
17	Sulawesi Tengah	90,03	36,78	76,44	64,50
18	Jambi	84,95	41,91	74,34	64,41
19	Kalimantan Tengah	81,89	50,69	63,21	64,15
20	Maluku Utara	83,67	48,94	63,40	64,06
21	Sulawesi Barat	88,51	44,05	64,94	64,02
22	Kalimantan Selatan	58,03	56,35	82,54	63,71
23	Aceh	71,78	48,59	76,97	63,56
24	Lampung	70,75	45,47	81,58	63,13
25	Papua	90,21	31,37	71,01	60,92
26	Jawa Tengah	79,18	46,29	60,89	60,84
27	Papua Barat	92,33	35,93	60,26	60,70
28	Jawa Timur	71,37	35,43	82,10	59,32
29	Bengkulu	71,57	49,28	59,28	59,17
30	Sumatera Utara	73,65	49,50	54,90	58,80
31	Nusa Tenggara Barat	59,68	49,60	66,24	57,22
32	Sumatera Barat	54,88	38,97	77,17	54,11
33	Sulawesi Tenggara	84,32	28,95	50,32	52,61
	Indonesia	79,00	46,25	72,24	63,72

Sumber: BPS (2014)

Tabel 6.10 Indeks Demokrasi Indonesia menurut Peringkat dan Aspek, Tahun 2014

Peringkat	Provinsi	Aspek			Indeks Demokrasi
		Kebebasan Sipil	Hak-hak Politik	Lembaga Demokrasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	DKI Jakarta	91,72	73,94	92,97	84,70
2	Sulawesi Utara	93,56	80,89	76,68	83,94
3	D.I.Yogyakarta	86,25	76,07	88,82	82,71
4	Kalimantan Barat	98,44	63,12	85,84	80,58
5	Kalimantan Tengah	92,93	66,42	81,48	79,00
6	Kalimantan Timur	93,28	70,42	69,94	77,77
7	Jawa Tengah	87,87	67,08	80,77	77,44
8	Sulawesi Barat	90,22	63,64	80,39	76,69
9	Bali	92,16	61,27	79,56	76,13
10	Banten	81,10	63,68	87,22	75,50
11	Kep. Bangka Belitung	89,80	56,48	87,01	75,32
12	Sulawesi Selatan	86,27	73,99	63,58	75,30
13	Sumatera Selatan	86,09	63,57	78,53	74,82
14	Sulawesi Tengah	86,56	59,01	83,42	74,36
15	Gorontalo	82,19	63,67	79,41	73,82
16	Maluku	90,85	60,03	70,09	72,72
17	Aceh	69,76	63,94	88,73	72,29
18	Bengkulu	79,49	63,98	74,16	71,70
19	Lampung	72,06	63,69	83,66	71,62
20	Jawa Barat	83,95	65,22	65,89	71,52
21	Jambi	78,23	54,01	89,48	71,15
22	Kalimantan Selatan	58,43	76,45	77,53	70,84
23	Jawa Timur	81,62	56,29	78,54	70,36
24	Sulawesi Tenggara	90,89	53,20	70,92	70,13
25	Nusa Tenggara Timur	85,92	65,13	53,12	68,81
26	Riau	74,35	59,74	74,69	68,40
27	Kepulauan Riau	82,47	58,35	66,61	68,39
28	Sumatera Utara	79,86	61,97	62,75	68,02
29	Maluku Utara	76,90	60,61	68,16	67,90
30	Papua Barat	97,93	39,29	66,93	65,65
31	Sumatera Barat	47,21	61,82	88,56	63,99
32	Nusa Tenggara Barat	58,73	62,08	68,38	62,62
33	Papua	85,69	42,51	63,75	62,15
	Indonesia	82,62	63,72	75,81	73,04

Sumber: BPS (2015)

Tabel 6.11 Indeks Demokrasi Indonesia menurut Peringkat dan Aspek, Tahun 2015

Peringkat	Provinsi	Aspek			Indeks Demokrasi
		Kebebasan Sipil	Hak-hak Politik	Lembaga Demokrasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	DKI Jakarta	89,64	83,19	83,26	85,32
2	Sulawesi Utara	90,41	77,98	82,38	83,19
3	D.I.Yogyakarta	93,07	82,74	63,99	81,24
4	Kalimantan Barat	98,10	83,65	52,05	80,16
5	Kalimantan Tengah	94,42	77,42	65,31	79,83
6	Kalimantan Timur	96,06	78,79	61,00	79,81
7	Jawa Tengah	86,71	77,92	72,53	79,40
8	Sulawesi Barat	93,19	71,69	70,73	78,47
9	Bali	85,26	67,44	81,39	76,90
10	Banten	81,35	69,97	81,81	76,77
11	Kep. Bangka Belitung	94,60	68,85	66,53	76,67
12	Sulawesi Selatan	96,81	65,57	67,95	76,40
13	Sumatera Selatan	54,15	85,77	83,17	74,76
14	Sulawesi Tengah	78,50	68,45	75,61	73,60
15	Gorontalo	85,07	68,31	67,05	73,46
16	Maluku	79,10	81,89	51,37	73,04
17	Aceh	81,25	66,95	69,60	72,31
18	Bengkulu	75,89	62,12	77,72	70,68
19	Lampung	80,16	65,01	66,13	70,26
20	Jawa Barat	79,44	67,28	61,48	69,75
21	Jambi	91,14	56,95	61,99	69,44
22	Kalimantan Selatan	82,02	62,17	63,52	69,01
23	Jawa Timur	74,28	63,72	68,66	68,46
24	Sulawesi Tenggara	81,88	61,16	62,37	68,25
25	Nusa Tenggara Timur	69,38	64,25	71,84	67,90
26	Riau	74,81	63,98	64,97	67,78
27	Kepulauan Riau	52,99	69,77	82,01	67,46
28	Sumatera Utara	71,99	63,19	62,74	65,95
29	Maluku Utara	76,04	63,20	57,43	65,90
30	Papua Barat	66,46	66,61	63,80	65,83
31	Sumatera Barat	51,59	61,11	88,36	65,08
32	Nusa Tenggara Barat	73,53	61,00	47,25	61,52
33	Papua	92,33	39,48	51,81	59,97
34	DKI Jakarta	82,72	41,81	50,87	57,55
	Indonesia	72,82	80,30	70,63	66,87

Sumber: BPS (2016)

Tabel 6.12 Indeks Aspek IDI Provinsi menurut Peringkat Tahun 2009

Peringkat	Kebebasan Sipil		Peringkat	Hak-hak Politik		Peringkat	Lembaga Demokrasi	
	Provinsi	Nilai		Provinsi	Nilai		Provinsi	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sulteng	98,51	1	Aceh	70,39	1	DKI	86,09
2	Kalteng	98,45	2	Jabar	68,48	2	Kalteng	78,69
3	Kalbar	98,29	3	Riau	65,40	3	NTT	73,63
4	Kaltim	98,22	4	Kalsel	62,63	4	Bali	73,24
5	Babel	96,51	5	Kalteng	60,50	5	Jambi	72,43
6	Kepri	96,22	6	Kepri	59,47	6	Gorontalo	72,32
7	Gorontalo	96,05	7	Sulut	58,50	7	Kalsel	70,95
8	Jambi	95,86	8	Gorontalo	56,39	8	Riau	70,68
9	NTT	95,55	9	Sumsel	56,07	9	Kalbar	69,85
10	Banten	95,46	10	Kaltim	54,78	10	Sumsel	69,83
11	Sumsel	95,42	11	Bengkulu	54,03	11	Kepri	67,62
12	Sultra	94,66	12	Sumbar	53,57	12	Kaltim	67,57
13	Bengkulu	94,26	13	Kalbar	53,46	13	Sumbar	67,48
14	Bali	93,97	14	Sulbar	53,09	14	Malut	67,23
15	Sulbar	93,82	15	DIY	52,52	15	Papua Barat	66,48
16	Malut	93,61	16	DKI	52,20	16	Maluku	66,30
17	Riau	93,14	17	Maluku	52,05	17	Sulsel	64,88
18	Papua Barat	93,14	18	Jateng	51,85	18	Jateng	64,43
19	Papua	92,83	19	Lampung	51,81	19	Sulut	63,91
20	Maluku	92,77	20	NTT	51,46	20	Lampung	63,27
21	Sulut	92,23	21	Jatim	50,96	21	Banten	62,83
22	DIY	92,15	22	Jambi	50,41	22	NTB	62,48
23	DKI	91,65	23	Bali	49,82	23	Aceh	62,13
24	Lampung	90,57	24	Banten	49,47	24	DIY	60,48
25	Jateng	86,48	25	Babel	48,29	25	Sumut	60,14
26	Jabar	85,84	26	NTB	47,50	26	Babel	59,65
27	Sumut	84,16	27	Malut	46,30	27	Sulbar	59,15
28	Jatim	83,30	28	Sulteng	45,90	28	Papua	58,97
29	Sulsel	82,94	29	Sultra	43,97	29	Sultra	58,37
30	Kalsel	68,24	30	Papua	43,84	30	Sulteng	57,14
31	NTB	68,05	31	Sulsel	42,36	31	Jabar	56,61
32	Aceh	64,42	32	Sumut	41,26	32	Jatim	54,64
33	Sumbar	63,06	33	Papua Barat	37,09	33	Bengkulu	44,70
Indonesia		86,97	Indonesia		54,60	Indonesia		62,72

Sumber: BPS (2010)

Tabel 6.13 Indeks Aspek IDI Provinsi menurut Peringkat Tahun 2010

Peringkat	Kebebasan Sipil		Peringkat	Hak-hak Politik		Peringkat	Lembaga Demokrasi	
	Provinsi	Nilai		Provinsi	Nilai		Provinsi	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sumsel	100,00	1	Kalsel	72,66	1	DKI	92,30
2	Papua Barat	99,84	2	Bengkulu	64,35	2	Riau	85,39
3	Kalbar	99,17	3	Sumbar	63,90	3	DIY	82,25
4	Kaltim	97,79	4	Aceh	62,63	4	Bali	78,43
5	Maluku	96,22	5	Sumut	57,42	5	Kaltim	72,34
6	NTT	95,55	6	DKI	56,19	6	Kalsel	72,25
7	Kalteng	94,51	7	Kalteng	56,05	7	Kalbar	70,11
8	Sulbar	94,48	8	DIY	55,96	8	Maluku	69,89
9	Bengkulu	94,40	9	NTT	55,89	9	Sumsel	69,85
10	Lampung	94,39	10	Sumsel	55,17	10	Jambi	69,81
11	Bali	94,10	11	Lampung	53,90	11	Kepri	69,20
12	Sulut	92,98	12	Kaltim	53,89	12	Babel	68,57
13	Malut	92,59	13	Sulteng	51,82	13	Sulsel	68,17
14	DKI	92,46	14	Gorontalo	51,72	14	NTT	68,15
15	Sulteng	92,19	15	Bali	51,52	15	Sumbar	67,59
16	DIY	91,24	16	Babel	48,44	16	Papua	67,22
17	Riau	91,02	17	Jambi	48,14	17	Banten	66,99
18	Papua	90,72	18	Maluku	48,12	18	Sulbar	66,06
19	Kepri	87,04	19	Sulbar	47,22	19	Kalteng	65,57
20	Babel	85,95	20	Riau	47,19	20	Sulut	65,34
21	Jambi	85,15	21	Jabar	46,74	21	NTB	65,19
22	Jateng	84,83	22	NTB	46,48	22	Malut	65,06
23	Sultra	83,71	23	Jateng	46,29	23	Papua Barat	64,73
24	Banten	83,17	24	Kalbar	45,19	24	Gorontalo	63,90
25	Gorontalo	82,55	25	Sulut	44,90	25	Aceh	63,87
26	Jatim	78,48	26	Papua Barat	44,24	26	Jateng	63,70
27	Sulsel	78,19	27	Jatim	42,06	27	Jabar	60,67
28	Sumut	76,64	28	Kepri	39,80	28	Sulteng	58,01
29	Jabar	74,41	29	Banten	38,70	29	Sultra	57,06
30	Aceh	69,98	30	Sulsel	32,40	30	Sumut	56,45
31	Kalsel	67,74	31	Papua	31,76	31	Lampung	56,44
32	NTB	67,22	32	Malut	30,82	32	Bengkulu	51,29
33	Sumbar	58,34	33	Sultra	30,46	33	Jatim	46,47
Indonesia		82,53	Indonesia		47,87	Indonesia		63,11

Sumber: BPS (2011)

Tabel 6.14 Indeks Aspek IDI Provinsi menurut Peringkat Tahun 2011

Peringkat	Kebebasan Sipil		Peringkat	Hak-hak Politik		Peringkat	Lembaga Demokrasi	
	Provinsi	Nilai		Provinsi	Nilai		Provinsi	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Sultra	98,44	1	Kalsel	64,25	1	DKI	93,50
2	Kalbar	97,15	2	Lampung	61,15	2	Kalteng	90,04
3	NTT	96,79	3	Bengkulu	59,47	3	Kalbar	87,38
4	Bali	95,44	4	Sumut	59,47	4	Banten	87,18
5	Sulbar	94,80	5	Sumbar	59,21	5	Sulsel	86,87
6	Bengkulu	94,10	6	DKI	58,32	6	Bali	85,79
7	Papua Barat	93,59	7	Kepri	56,00	7	Riau	83,18
8	Lampung	93,14	8	Kalteng	54,73	8	D.I.Y	82,81
9	Kalteng	92,56	9	Riau	52,90	9	Kalsel	82,76
10	Sulteng	92,23	10	Sulut	52,86	10	Jambi	82,27
11	Kaltim	91,84	11	D.I.Y	52,35	11	Jabar	81,55
12	Jambi	91,62	12	Bali	50,08	12	NTT	80,97
13	Maluku	90,70	13	NTB	49,60	13	Sumbar	79,83
14	Malut	90,04	14	Sumsel	49,41	14	Sumsel	77,05
15	DKI	89,94	15	Kalbar	49,34	15	Maluku	75,61
16	Kep Babel	88,27	16	Aceh	47,90	16	Kepri	73,66
17	Papua	87,73	17	NTT	47,56	17	Jateng	73,04
18	D.I.Y	87,22	18	Kep. Babel	47,11	18	Kep. Babel	72,33
19	Kepri	87,15	19	Jabar	46,42	19	Sulteng	71,36
20	Sultra	85,81	20	Jateng	46,29	20	Lampung	70,64
21	Sumsel	84,05	21	Jambi	46,27	21	Papua	70,04
22	Jateng	84,05	22	Maluku	46,14	22	Sulbar	68,26
23	Riau	83,12	23	Kaltim	45,12	23	Kaltim	68,10
24	Gorontalo	81,80	24	Banten	44,57	24	Gorontalo	68,08
25	Sulses	80,97	25	Gorontalo	44,36	25	Sultra	67,11
26	Banten	80,41	26	Papua Barat	43,99	26	Sulut	66,03
27	Sumut	79,23	27	Sulbar	42,65	27	Aceh	63,77
28	Jabar	78,92	28	Jatim	40,32	28	Malut	62,56
29	Jatim	71,58	29	Sulsel	39,33	29	Bengkulu	61,63
30	Sumbar	60,57	30	Sulteng	37,01	30	Jatim	61,23
31	Aceh	58,65	31	Malut	32,61	31	NTB	61,06
32	Kalsel	56,33	32	Papua	29,43	32	Sumut	60,31
33	NTB	55,45	33	Sultra	29,18	33	Papua Barat	50,03
Indonesia		80,79	Indonesia		47,54	Indonesia		74,72

Sumber: BPS (2012)

Tabel 6.15 Indeks Aspek IDI Provinsi menurut Peringkat Tahun 2012

Peringkat	Kebebasan Sipil		Peringkat	Hak-hak Politik		Peringkat	Lembaga Demokrasi	
	Provinsi	Nilai		Provinsi	Nilai		Provinsi	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kaltim	97,16	1	DKI Jakarta	62,52	1	Kalsel	89,33
2	Sulut	95,64	2	Sulut	58,65	2	DKI Jakarta	88,81
3	Papua Barat	94,42	3	DIY	55,52	3	Bali	86,01
4	Bali	94,18	4	Sumsel	55,21	4	Kalteng	85,82
5	Lampung	94,14	5	Kalsel	52,59	5	Sulsel	84,66
6	Sulteng	93,43	6	Kaltim	51,69	6	NTT	84,15
7	Sumsel	93,26	7	Babel	51,21	7	DIY	82,52
8	Kalbar	92,37	8	Kalteng	51,05	8	Jambi	82,18
9	Sultra	91,39	9	Banten	51,03	9	Riau	81,89
10	Papua	91,11	10	NTT	50,89	10	Sumbar	81,32
11	NTT	91,06	11	Sumbar	50,85	11	Babel	80,97
12	Sulbar	88,67	12	Gorontalo	50,76	12	Sulut	80,77
13	Malut	88,15	13	Lampung	50,60	13	Lampung	79,16
14	DKI Jakarta	88,11	14	Malut	50,13	14	Jateng	77,46
15	DIY	87,39	15	Kepri	49,98	15	Sumsel	76,42
16	Sulsel	87,07	16	Sumut	49,82	16	Kalbar	76,23
17	Jambi	86,23	17	NTB	49,60	17	Sulbar	76,22
18	Babel	83,09	18	Bengkulu	48,93	18	Sulteng	72,55
19	Kepri	82,68	19	Aceh	47,16	19	NTB	70,85
20	Jatim	80,97	20	Riau	47,16	20	Banten	70,42
21	Riau	80,21	21	Jambi	46,60	21	Kaltim	69,68
22	Banten	79,20	22	Jabar	46,58	22	Kepri	68,95
23	Bengkulu	77,76	23	Jateng	46,29	23	Malut	66,55
24	Maluku	76,05	24	Papua Barat	45,74	24	Papua	66,50
25	Jateng	75,03	25	Maluku	45,08	25	Jabar	62,51
26	Sumut	73,85	26	Bali	45,00	26	Maluku	62,27
27	Gorontalo	73,25	27	Sulsel	43,74	27	Bengkulu	61,79
28	Kalteng	68,44	28	Sulteng	37,65	28	Papua Barat	61,27
29	Jabar	65,93	29	Kalbar	37,18	29	Sultra	58,44
30	Aceh	60,16	30	Jatim	36,17	30	Aceh	57,21
31	NTB	58,31	31	Sulbar	35,92	31	Gorontalo	55,59
32	Sumbar	57,10	32	Papua	32,99	32	Sumut	53,01
33	Kalsel	49,51	33	Sultra	29,50	33	Jatim	52,22
Indonesia		77,94	Indonesia		46,33	Indonesia		69,28

Sumber: BPS (2013)

Tabel 6.16 Indeks Aspek IDI Provinsi menurut Peringkat Tahun 2013

Peringkat	Kebebasan Sipil		Peringkat	Hak-hak Politik		Peringkat	Lembaga Demokrasi	
	Provinsi	Nilai		Provinsi	Nilai		Provinsi	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kalbar	97.54	1	Sulut	62.55	1	Banten	85.00
2	NTT	95.59	2	NTT	58.83	2	D.I.Y	83.69
3	Bali	92.55	3	Gorontalo	58.26	3	Kalsel	82.54
4	Sulut	92.44	4	Kalsel	56.35	4	Riau	82.32
5	Papua Barat	92.33	5	Kaltim	55.36	5	Jatim	82.10
6	Kaltim	92.14	6	DKI	55.08	6	Lampung	81.58
7	Sumsel	91.45	7	Bali	52.87	7	Bali	77.38
8	D.I.Y	90.78	8	Riau	52.19	8	Sumbar	77.17
9	Papua	90.21	9	Banten	51.03	9	Babel	77.09
10	Sulteng	90.03	10	Kalteng	50.69	10	Aceh	76.97
11	DKI	88.72	11	D.I.Y	50.65	11	Sulteng	76.44
12	Sulbar	88.51	12	Sulsel	50.62	12	Kepri	76.21
13	Babel	85.16	13	Babel	50.60	13	Jabar	76.05
14	Jambi	84.95	14	Maluku	50.53	14	DKI	74.69
15	Sultra	84.32	15	Sumsel	50.32	15	Jambi	74.34
16	Malut	83.67	16	Kepri	49.63	16	Maluku	71.95
17	Kalteng	81.89	17	NTB	49.60	17	Papua	71.01
18	Maluku	81.52	18	Sumut	49.50	18	NTT	68.23
19	Banten	81.39	19	Kalbar	49.36	19	Sulsel	68.10
20	Sulsel	81.30	20	Bengkulu	49.28	20	NTB	66.24
21	Kepri	80.08	21	Malut	48.94	21	Gorontalo	66.22
22	Jabar	79.84	22	Aceh	48.59	22	Sulut	65.56
23	Gorontalo	79.31	23	Jabar	46.74	23	Sulbar	64.94
24	Jateng	79.18	24	Jateng	46.29	24	Malut	63.40
25	Riau	77.71	25	Lampung	45.47	25	Sumsel	63.22
26	Sumut	73.65	26	Sulbar	44.05	26	Kalteng	63.21
27	Aceh	71.78	27	Jambi	41.91	27	Jateng	60.89
28	Bengkulu	71.57	28	Sumbar	38.97	28	Papua Barat	60.26
29	Jatim	71.37	29	Sulteng	36.78	29	Bengkulu	59.28
30	Lampung	70.75	30	Papua Barat	35.93	30	Kalbar	58.61
31	NTB	59.68	31	Jatim	35.43	31	Kaltim	58.20
32	Kalsel	58.03	32	Papua	31.37	32	Sumut	54.90
33	Sumbar	54.88	33	Sultra	28.95	33	Sultra	50.32
Indonesia		79,00	Indonesia		46,25	Indonesia		63,72

Sumber: BPS (2014)

Tabel 6.17 Indeks Aspek IDI Provinsi menurut Peringkat Tahun 2014

Peringkat	Kebebasan Sipil		Peringkat	Hak-hak Politik		Peringkat	Lembaga Demokrasi	
	Provinsi	Nilai		Provinsi	Nilai		Provinsi	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kalbar	98.44	1	Sulut	80.89	1	DKI Jakarta	92.97
2	Papua Barat	97.93	2	Kalsel	76.45	2	Jambi	89.48
3	Sulut	93.56	3	D I Y	76.07	3	D I Y	88.82
4	Kaltim	93.28	4	Sulsel	73.99	4	Aceh	88.73
5	Kalteng	92.93	5	DKI Jakarta	73.94	5	Sumbar	88.56
6	Bali	92.16	6	Kaltim	70.42	6	Banten	87.22
7	DKI Jakarta	91.72	7	Jateng	67.08	7	Kep. Babel	87.01
8	Sultra	90.89	8	Kalteng	66.42	8	Kalbar	85.84
9	Maluku	90.85	9	Jabar	65.22	9	Lampung	83.66
10	Sulbar	90.22	10	N T T	65.13	10	Sulteng	83.42
11	Kep. Babel	89.80	11	Bengkulu	63.98	11	Kalteng	81.48
12	Jateng	87.87	12	Aceh	63.94	12	Jateng	80.77
13	Sulteng	86.56	13	Lampung	63.69	13	Sulbar	80.39
14	Sulsel	86.27	14	Banten	63.68	14	Bali	79.56
15	D I Y	86.25	15	Gorontalo	63.67	15	Gorontalo	79.41
16	Sumsel	86.09	16	Sulbar	63.64	16	Jatim	78.54
17	N T T	85.92	17	Sumsel	63.57	17	Sumsel	78.53
18	Papua	85.69	18	Kalbar	63.12	18	Kalsel	77.53
19	Jabar	83.95	19	N T B	62.08	19	Sulut	76.68
20	Kepri	82.47	20	Sumut	61.97	20	Riau	74.69
21	Gorontalo	82.19	21	Sumbar	61.82	21	Bengkulu	74.16
22	Jatim	81.62	22	Bali	61.27	22	Sultra	70.92
23	Banten	81.10	23	Malut	60.61	23	Maluku	70.09
24	Sumut	79.86	24	Maluku	60.03	24	Kaltim	69.94
25	Bengkulu	79.49	25	Riau	59.74	25	N T B	68.38
26	Jambi	78.23	26	Sulteng	59.01	26	Malut	68.16
27	Malut	76.90	27	Kepri	58.35	27	Papua Barat	66.93
28	Riau	74.35	28	Kep. Babel	56.48	28	Kepri	66.61
29	Lampung	72.06	29	Jatim	56.29	29	Jabar	65.89
30	Aceh	69.76	30	Jambi	54.01	30	Papua	63.75
31	N T B	58.73	31	Sultra	53.20	31	Sulsel	63.58
32	Kalsel	58.43	32	Papua	42.51	32	Sumut	62.75
33	Sumbar	47.21	33	Papua Barat	39.29	33	N T T	53.12
Indonesia		82,62	Indonesia		63,72	Indonesia		73,04

Sumber: BPS (2015)

Tabel 6.18 Indeks Aspek IDI Provinsi menurut Peringkat Tahun 2015

Peringkat	Kebebasan Sipil		Peringkat	Hak-hak Politik		Peringkat	Lembaga Demokrasi	
	Provinsi	Nilai		Provinsi	Nilai		Provinsi	Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kaltara	98,10	1	Kalsel	85,77	1	NTB	88,36
2	Kalbar	96,81	2	Kaltara	83,65	2	DKI	83,26
3	Sumsel	96,06	3	DKI	83,19	3	Kasel	83,17
4	Sulteng	94,60	4	Kaltim	82,74	4	DIY	82,38
5	Bali	94,42	5	Jabar	81,89	5	Sumbar	82,01
6	NTT	93,19	6	Sumsel	78,79	6	Gorontalo	81,81
7	Kaltim	93,07	7	DIY	77,98	7	Jatim	81,39
8	Papua Barat	92,33	8	Sulut	77,92	8	Jambi	77,72
9	Sultra	91,14	9	Bali	77,42	9	Bengkulu	75,61
10	DIY	90,41	10	NTT	71,69	10	Sulut	72,53
11	DKI	89,64	11	Gorontalo	69,97	11	Sulsel	71,84
12	Sulut	86,71	12	Sumbar	69,77	12	NTT	70,73
13	Jatim	85,26	13	Sulteng	68,85	13	Kep. Babel	69,60
14	Kalteng	85,07	14	Bengkulu	68,45	14	Banten	68,66
15	Papua	82,72	15	Kalteng	68,31	15	Kalbar	67,95
16	Sumut	82,02	16	Jatim	67,44	16	Kalteng	67,05
17	Sulbar	81,88	17	Jateng	67,28	17	Sulteng	66,53
18	Gorontalo	81,35	18	Kep. Babel	66,95	18	Kepri	66,13
19	Kep. Babel	81,25	19	Riau	66,61	19	Bali	65,31
20	Kepri	80,16	20	Kalbar	65,57	20	Aceh	64,97
21	Jateng	79,44	21	Kepri	65,01	21	Kaltim	63,99
22	Jabar	79,10	22	Sulsel	64,25	22	Riau	63,80
23	Bengkulu	78,50	23	Aceh	63,98	23	Sumut	63,52
24	Maluku	76,04	24	Banten	63,72	24	Lampung	62,74
25	Jambi	75,89	25	Maluku	63,20	25	Sulbar	62,37
26	Aceh	74,81	26	Lampung	63,19	26	Sultra	61,99
27	Banten	74,28	27	Sumut	62,17	27	Jateng	61,48
28	Malut	73,53	28	Jambi	62,12	28	Sulsel	61,00
29	Lampung	71,99	29	Sulbar	61,16	29	Maluku	57,43
30	Sulsel	69,38	30	NTB	61,11	30	Kaltara	52,05
31	Riau	66,46	31	Malut	61,00	31	Papua Barat	51,81
32	Kalsel	54,15	32	Sultra	56,95	32	Jabar	51,37
33	Sumbar	52,99	33	Papua	41,81	33	Papua	50,87
34	NTB	51,59	34	Papua Barat	39,48	34	Malut	47,25
Indonesia		80,30	Indonesia		70,63	Indonesia		66,87

Sumber: BPS (2016)

6.2 Keragaman Indonesia

Keanekaragaman suku bangsa atau kebudayaan merupakan ciri utama yang menjadi ciri masyarakat majemuk (Suparlan, 2002:99). Beberapa negara secara alami terdiri dari masyarakat yang majemuk, namun sebagian lainnya menjadi semakin majemuk karena adanya migrasi. Indonesia merupakan bangsa dan negaradengan tingkat kemajemukan yang paling tinggi di dunia. Kemajemukan bangsadan masyarakat Indonesia setidaknya-tidaknya meliputi hal-hal sebagai berikut: Secara geografis, terdiri atas 13.667 pulau baik yang dihuni maupun yang tidak. Secara etnik, di Indonesia terdapat 358 suku bangsa dan 200 sub suku bangsa, serta beragam agama dan kepercayaan yang dianut (Zubair, 2003:113). Hasil Sensus Penduduk (SP) 2010, suku bangsa di Indonesia berjumlah 1.340 suku bangsa.

Kemajemukan memiliki peran besar dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Gelombang kesadaran akan persamaan perasaan nasib tertindas, mendorong berbagai kelompok berbasis etnis melakukan perlawanan di banyak daerah. Pada tahun 1928 pemuda-pemudayang berasal dari organisasi pemuda benuansa kedaerahan dan kesukuan, atau keagamaan seperti; *Jong Java*, *Jong Borneo*, *Jong Sumatranen Bond*, *Jong Celebes*, *Jong Islamiten Bond* berkumpul, bersatu dan bersumpah untuk membangun satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa: Indonesia (Zubair, 2003:112). Karena itu dalam sidang BPUPKI tahun 1945, pidato Soekarno menyerukan "...marilah kita mengambil dasar Negara jang pertama: Kebangsaan Indonesia. Kebangsaan Indonesia jang bulat! Bukan kebangsaan Djawa, bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Bali, atau lain-lain, tetapi kebangsaan Indonesia, jang bersama-sama mendjadi dasar satu nationale staat.."

Fakta tersebut menjelaskan bahwa negara ini dibangun dan diikat dengan komitmen persatuan bangsa yang memberi ruang setara bagi seluruh kelompok suku bangsa dan agama. Berdasarkan SP 2010 pada tingkat nasional penduduk

Indonesia paling banyak suku Jawa dengan jumlah 95,2 juta jiwa, kemudian Sunda 36,7 juta jiwa, dan suku Batak dengan 8,5 juta jiwa (Tabel 6.17). Jumlah penduduk berdasarkan suku dan jenis kelamin ditampilkan pada Tabel 6.18, sedangkan jumlah desa menurut banyaknya suku ditampilkan pada Tabel 6.19. Berdasarkan penganut agama, mayoritas penduduk Indonesia penganut Agama Islam dengan jumlah 207,2 juta penganut, selanjutnya Kristen dengan 16,5 juta penganut, dan Katolik dengan 6,9 juta penganut. Informasi tentang penganut agama berdasarkan wilayah dan kelompok umur ditampilkan pada Tabel 6.20 dan 6.21.

<http://www.bps.go.id>

Tabel 6.19 Jumlah Penduduk menurut Suku Bangsa

Pulau/ Kawasan	Kelompok Suku	Jumlah	Persentase	Peringkat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sumatera	Suku-suku Asal Aceh	4.091.451	1,73	14
	Batak	8.466.969	3,58	3
	Nias	1.041.925	0,44	30
	Melayu	5.365.399	2,27	9
	Minangkabau	6.462.713	2,73	7
	Suku-suku asal Jambi	1.415.547	0,60	25
	Suku-suku asal Sumatera Selatan	5.119.581	2,16	10
	Suku-suku asal Lampung	1.381.660	0,58	26
	Suku asal Sumatera Lainnya	2.204.472	0,93	21
Jawa dan Bali	Betawi	6.807.968	2,88	6
	Suku-suku asal Banten	4.657.784	1,97	11
	Sunda	36.701.670	15,5	2
	Jawa	95.217.022	40,22	1
	Cirebon	1.877.514	0,79	24
	Madura	7.179.356	3,03	5
	Bali	3.946.416	1,67	15
Nusa Tenggara	Sasak	3.173.127	1,34	16
	Suku-suku asal Nusa Tenggara Barat	1.280.094	0,54	27
	Suku-suku asal Nusa Tenggara Timur	4.184.923	1,77	12
Kalimantan	Dayak	3.009.494	1,27	17
	Banjar	4.127.124	1,74	13
	Suku-suku asal Kalimantan lainnya	1.968.620	0,83	23
Sulawesi	Makassar	2.672.590	1,13	20
	Bugis	6.359.700	2,69	8
	Minahasa	1.237.177	0,52	29
	Gorontalo	1.251.494	0,53	28
	Suku-suku asal Sulawesi Lainnya	7.634.262	3,22	4
Maluku	Suku-Suku asal Maluku	2.203.415	0,93	22
Papua	Suku-suku asal Papua	2.693.630	1,14	19
	Cina	2.832.510	1,20	18
	Asing/ Luar Negeri	162.772	0,07	31
Total		236.728.379	100,00	

Sumber: Sensus Penduduk 2010 – BPS

Catatan : Cina dan Asing/ Luar Negeri adalah penduduk yang berkewarganegaraan Indonesia

Tabel 6.20 Jumlah Penduduk menurut Suku dan Jenis Kelamin

Nama Kelompok Suku	Jenis Kelamin				Total
	Laki-laki	%	Perempuan	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Suku-suku Asal Aceh	2.046.592	50,02	2.044.859	49,98	4.091.451
Batak	4.268.074	50,41	4.198.895	49,59	8.466.969
Nias	526.723	50,55	515.202	49,45	1.041.925
Melayu	2.696.036	50,25	2.669.363	49,75	5.365.399
Minangkabau	3.228.346	49,95	3.234.367	50,05	6.462.713
Suku-suku asal Jambi	707.707	50,00	707.840	50,00	1.415.547
Suku-suku asal Sumatera Selatan	2.574.509	50,29	2.545.072	49,71	5.119.581
Suku-suku asal Lampung	693.375	50,18	688.285	49,82	1.381.660
Suku asal Sumatera Lainnya	1.111.821	50,43	1.092.651	49,57	2.204.472
Betawi	3.441.848	50,56	3.366.120	49,44	6.807.968
Suku-suku asal Banten	2.378.474	51,06	2.279.310	48,94	4.657.784
Sunda	18.601.602	50,68	18.100.068	49,32	36.701.670
Jawa	47.827.027	50,23	47.389.995	49,77	95.217.022
Cirebon	961.406	51,21	916.108	48,79	1.877.514
Madura	3.518.361	49,01	3.660.995	50,99	7.179.356
Bali	1.983.212	50,25	1.963.204	49,75	3.946.416
Sasak	1.521.664	47,95	1.651.463	52,05	3.173.127
Suku-suku asal Nusa Tenggara Barat	648.666	50,67	631.428	49,33	1.280.094
Suku-suku asal Nusa Tenggara Timur	2.094.812	50,06	2.090.111	49,94	4.184.923
Dayak	1.518.879	50,47	1.490.615	49,53	3.009.494
Banjar	2.063.769	50,01	2.063.355	49,99	4.127.124
Suku-suku Asal Kalimantan	1.006.260	51,11	962.360	48,89	1.968.620
Makassar	1.325.342	49,59	1.347.248	50,41	2.672.590
Bugis	3.177.757	49,97	3.181.943	50,03	6.359.700
Minahasa	625.128	50,53	612.049	49,47	1.237.177
Gorontalo	631.715	50,48	619.779	49,52	1.251.494
Suku-suku Asal Sulawesi	3.832.710	50,20	3.801.552	49,80	7.634.262
Suku-suku Asal Maluku	1.124.441	51,03	1.078.974	48,97	2.203.415
Suku-suku Asal Papua	1.410.595	52,37	1.283.035	47,63	2.693.630
Cina	1.425.236	50,32	1.407.274	49,68	2.832.510
Asing/Luar Negeri	81.974	50,36	80.798	49,64	162.772
Total	119.054.061	50,29	117.674.318	49,71	236.728.379

Sumber: Sensus Penduduk 2010 – BPS

Tabel 6.21 Banyaknya Desa menurut Keragaman Agama dan Suku

Provinsi	Satu Agama	Multi Agama	Satu Etnis	Multi Etnis	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	6.020	492	2.735	3.777	6.512
Sumatera Utara	1.568	4.536	1.383	4.721	6.104
Sumatera Barat	726	419	313	832	1.145
Riau	561	1.274	102	1.733	1.835
Jambi	832	719	234	1.317	1.551
Sumatera Selatan	1.890	1.347	445	2.792	3.237
Bengkulu	828	704	234	1.298	1.532
Lampung	740	1.892	55	2.577	2.632
Bangka Belitung	99	282	12	369	381
Kepulauan Riau	93	322	15	400	415
DKI Jakarta	5	262	-	267	267
Jawa Barat	3.481	2.481	867	5.095	5.962
Jawa Tengah	2.875	5.703	4.624	3.954	8.578
DI Yogyakarta	13	425	236	202	438
Jawa Timur	3.475	5.027	3.498	5.004	8.502
Banten	938	613	308	1.243	1.551
Bali	155	561	172	544	716
NTB	724	417	121	1.020	1.141
NTT	1.036	2.234	1.332	1.938	3.270
Kalimantan Barat	253	1.856	277	1.832	2.109
Kalimantan Tengah	166	1.403	73	1.496	1.569
Kalimantan Selatan	1.314	694	322	1.686	2.008
Kalimantan Timur	148	878	26	1.000	1.026
Kalimantan Utara	135	344	131	348	479
Sulawesi Utara	436	1.400	363	1.473	1.836
Sulawesi Tengah	505	1.481	136	1.850	1.986
Sulawesi Selatan	1.599	1.431	654	2.376	3.030
Sulawesi Tenggara	1.419	853	157	2.115	2.272
Gorontalo	374	362	158	578	736
Sulawesi Barat	301	347	89	559	648
Maluku	555	533	274	814	1.088
Maluku Utara	710	486	151	1.045	1.196
Papua Barat	809	758	603	964	1.567
Papua	3.394	1.477	3.098	1.773	4.871
Indonesia	38.177	44.013	23.198	58.992	82.190

Sumber: Potensi Desa 2014, BPS

Tabel 6.22 Penduduk menurut Wilayah dan Agama yang Dianut

Provinsi	Agama								Jumlah
	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Khong Hu Chu	Lain-lain	Tak jawab/ditanya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	4.413.244	50.309	3.315	136	7.062	36	277	20.031	4.494.410
Sumut	8.579.830	3.509.700	516.037	14.644	303.548	984	5.088	52.373	12.982.204
Sumbar	4.721.924	69.253	40.428	234	3.419	70	493	11.088	4.846.909
Riau	4.872.873	484.895	44.183	1.076	114.332	3.755	2.088	15.165	5.538.367
Jambi	2.950.195	82.311	13.250	582	30.014	1.491	303	14.119	3.092.265
Sumsel	7.218.951	72.235	42.436	39.206	59.655	663	164	17.084	7.450.394
Bengkulu	1.669.081	28.724	6.364	3.727	2.173	41	130	5.278	1.715.518
Lampung	7.264.783	115.255	69.014	113.512	24.122	596	664	20.459	7.608.405
Babel	1.088.791	22.053	14.738	1.040	51.882	39.790	323	4.679	1.223.296
Kepri	1.332.201	187.576	38.252	1.541	111.730	3.389	198	4.276	1.679.163
Jakarta	8.200.796	724.232	303.295	20.364	317.527	5.334	2.410	33.829	9.607.787
Jabar	41.763.592	779.272	250.875	19.481	93.551	14.723	5.657	126.581	43.053.732
Jateng	31.328.341	572.517	317.919	17.448	53.009	2.995	5.657	84.771	32.382.657
DIY	3.179.129	94.268	165.749	5.257	3.542	159	506	8.881	3.457.491
Jatim	36.113.396	638.467	234.204	112.177	60.760	6.166	2.042	309.545	37.476.757
Banten	10.065.783	268.890	115.865	8.189	131.222	3.232	11.722	27.263	10.632.166
Bali	520.244	64.454	31.397	3.247.283	21.156	427	282	5.514	3.890.757
NTB	4.341.284	13.862	8.894	118.083	14.625	139	40	3.285	4.500.212
NTT	423.925	1.627.157	2.535.937	5.210	318	91	81.129	10.060	4.683.827
Kalbar	2.603.318	500.254	1.008.368	2.708	237.741	29.737	2.907	10.950	4.395.983
Kalteng	1.643.715	353.353	58.279	11.149	2.301	414	138.419	4.459	2.212.089
Kalsel	3.505.846	47.974	16.045	16.064	11.675	236	16.465	12.311	3.626.616
Kaltim	3.033.705	337.380	138.629	7.657	16.356	1.080	849	17.487	3.553.143
Sulut	701.699	1.444.141	99.980	13.133	3.076	511	1.363	6.693	2.270.596
Sulteng	2.047.959	447.475	21.638	99.579	3.951	141	2.575	11.691	2.635.009
Sulsel	7.200.938	612.751	124.255	58.393	19.867	367	4.731	13.474	8.034.776
Sultra	2.126.126	41.131	12.880	45.441	978	48	8	5.974	2.232.586
Gorontalo	1.017.396	16.559	761	3.612	934	11	18	873	1.040.164
Sulbar	957.735	164.667	11.871	16.042	326	35	6.535	1.440	1.158.651
Maluku	776.130	634.841	103.629	5.669	259	117	6.278	6.583	1.533.506
Malut	771.110	258.471	5.378	200	90	212	122	2.504	1.038.087
Papua Brt	292.026	408.841	53.463	859	601	25	0	4.607	760.422
Papua	450.096	1.855.245	500.545	2.420	1.452	76	174	23.373	2.833.381
Jumlah	207.176.162	16.528.513	6.907.873	4.012.116	1.703.254	117.091	299.617	896.700	237.641.326

Sumber: Sensus Penduduk 2010, BPS

Tabel 6.23 Penduduk menurut Kelompok Umur dan Agama yang Dianut

Kelompok Umur	Agama								Jumlah
	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha	Khong Hu Chu	Lain-lain	Tak jawab/ditanya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0-4	19.701.622	1.730.941	731.201	340.030	117.323	7.349	33.818	16.418	22.678.702
15-18	20.076.013	1.830.056	788.072	364.129	132.162	8.000	36.687	18.361	23.253.480
20-23	19.570.144	1.716.328	738.669	351.300	129.950	7.939	29.180	127.571	22.671.081
15-19	18.047.190	1.490.013	614.571	302.277	135.442	8.402	24.663	258.176	20.880.734
20-24	17.356.491	1.368.715	545.779	275.403	143.362	8.970	23.152	169.761	19.891.633
25-29	18.751.271	1.405.502	552.770	316.382	153.338	9.375	23.360	98.445	21.310.443
30-34	17.394.118	1.356.633	531.404	331.215	131.651	7.563	20.664	57.437	19.830.685
35-39	16.216.251	1.254.291	494.365	356.120	115.180	6.568	19.530	42.826	18.505.131
40-44	14.501.505	1.096.115	448.778	310.958	109.682	6.728	18.042	33.044	16.524.852
45-49	12.333.954	906.890	382.055	258.209	112.479	7.889	16.258	23.248	14.040.982
50-54	10.128.813	741.151	320.824	214.235	114.915	9.161	14.557	17.665	11.561.321
55-59	7.351.878	550.988	246.793	168.424	100.220	8.620	10.690	10.957	8.448.570
60-64	5.249.024	388.405	185.779	136.828	74.438	6.741	9.709	7.837	6.058.761
65-69	4.098.516	277.214	134.964	112.302	53.429	4.709	7.303	5.594	4.694.031
70-74	3.037.243	197.096	90.945	79.280	38.114	3.972	5.626	4.055	3.456.331
75-79	1.729.706	115.960	52.701	48.752	22.741	2.591	3.151	2.303	1.977.905
80-84	1.006.474	63.192	29.007	28.066	11.745	1.503	1.848	1.335	1.143.170
85-89	380.819	26.189	12.410	11.440	4.941	702	787	673	437.961
90-94	150.870	8.611	4.439	4.414	1.617	226	352	370	170.899
95+	94.260	4.223	2.347	2.352	525	83	240	624	104.654
Jumlah	207.176.162	16.528.513	6.907.873	4.012.116	1.703.254	117.091	299.617	896.700	237.641.326

Sumber: Sensus Penduduk 2010, BPS

Daftar Pustaka

Aribowo & Muhammad Asfar, dkk. (2002), "*Model-Model Sistem Pemilihan di Indonesia*" Surabaya: Pusdeham.

ASEAN (2015) "Asean Annual Report 2014 – 2015", Jakarta: ASEAN

Asshidiqqie, Jimly (2005), "Hukum Tata Negara Dan Demokrasi" Jakarta: Konpress.

Badan Pusat Statistik (2010) "*Indeks Demokrasi 2009*." Jakarta: BPS.

_____ (2011) "*Indeks Demokrasi 2010*." Jakarta: BPS.

_____ (2012) "*Indeks Demokrasi 2011*." Jakarta: BPS.

_____ (2013) "*Indeks Demokrasi 2012*." Jakarta: BPS.

_____ (2014) "*Indeks Demokrasi 2013*." Jakarta: BPS.

_____ (2015) "*Indeks Demokrasi 2014*." Jakarta: BPS.

_____ (2010) "*Sensus Penduduk 2010*." Jakarta: BPS.

_____ (2010) "*Statistik Indonesia 2010*." Jakarta: BPS.

_____ (2015) "*Statistik Keuangan Daerah 2008-2014*." Jakarta: BPS.

_____ (2011) "*Statistik Potensi Desa Indonesia 2011*." Jakarta: BPS.

Budiardjo, Miriam (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Dewan Pers (2011) "*Data Pers nasional 2011*" Jakarta: Dewan Pers.

Dewan Pers (2012) "*Data Pers nasional 2012*" Jakarta: Dewan Pers.

Dewan Pers (2013) "*Data Pers nasional 2013*" Jakarta: Dewan Pers.

Dewan Pers (2014) "*Data Pers nasional 2014*" Jakarta: Dewan Pers.

Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri (2013) “Postur APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2012.” Jakarta: Tidak Diterbitkan.

_____ (2014) “Postur APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2013.” Jakarta: Tidak Diterbitkan.

_____ (2015) “Postur APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2014.” Jakarta: Tidak Diterbitkan.

Freedom House (2011), “*Freedom In The Press 2011*” Tidak Diterbitkan.

_____ (2012), “*Freedom In The Press 2012*” Tidak Diterbitkan.

_____ (2013), “*Freedom In The Press 2013*” Tidak Diterbitkan.

_____ (2014), “*Freedom In The Press 2014*” Tidak Diterbitkan.

_____ (2015), “*Freedom In The Press 2015*” Tidak Diterbitkan.

_____ (2011), “*Freedom In The World 2011*” Tidak Diterbitkan.

_____ (2012), “*Freedom In The World 2012*” Tidak Diterbitkan.

_____ (2013), “*Freedom In The World 2013*” Tidak Diterbitkan.

_____ (2014), “*Freedom In The World 2014*” Tidak Diterbitkan.

_____ (2015), “*Freedom In The World 2015*” Tidak Diterbitkan.

Hardiman, F. Budi (2009), “*Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Habermas.*” Jogjakarta: Kanisius.

Haris, Syamsuddin (2008), “*Format Baru Relasi Presiden-DPR dalam Demokrasi Presidensial di Indonesia Pasca-Amendemen, Konstitusi (2004-2008)*”, disertasi, Jakarta: Universitas Indonesia.

Hendrayana “*Menegakkan Kemerdekaan Pers dan Pelaksanaan Asas Praduga Tak Bersalah.*” *Jurnal Dewan Pers* Edisi No 2 November 2010.

Ibrahim, Anis (2008), *“Legislasi dan Demokrasi: Interaksi dan Konfigurasi Politik Hukum Dalam Pembentukan Hukum di Daerah.”* Malang: In-Trans Publishing.

Kejaksaan Agung (2012) *“Laporan Tahunan”* Jakarta: Kejaksaan.

_____ (2011) *“Laporan Tahunan”* Jakarta: Kejaksaan.

Kemenpan & RB (2010), *“Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Aparat Negara dan Reformasi Birokrasi 2010 – 2014.”*

Kementerian Luar Negeri (2012) *“Diplomasi Indonesia 2012”* Jakarta: Kemenlu.

_____ (2011) *“Diplomasi Indonesia 2011”* Jakarta: Kemenlu.

_____ (2010) *“Diplomasi Indonesia 2010”* Jakarta: Kemenlu.

Komisi Pemilihan Umum (2010) *“Pemilu 2009 Dalam Angka.”* Jakarta: KPU.

Luwarso, Lukas Dkk. (2008), *“Mengelola Kebebasan Pers.”* Jakarta: Dewan Pers.

Mahkamah Agung (2010) *“Laporan Tahunan 2010.”* Jakarta: MA.

_____ (2011) *“Laporan Tahunan 2011.”* Jakarta: MA.

_____ (2012) *“Laporan Tahunan 2012.”* Jakarta: MA.

Mahkamah Konstitusi (2010) *“Laporan Tahunan 2010.”* Jakarta: MK.

_____ (2011) *“Laporan Tahunan 2011.”* Jakarta: MK.

_____ (2012) *“Laporan Tahunan 2012.”* Jakarta: MK.

Mas’oed, Mohtar & Colin McAndrews (2008), *“Perbandingan Sistem Politik.”* Jogjakarta: Gajah Mada University Press.

McQuail, Denis (2005), *“Mass Communication Theory, Fifth Edition.”* London: Sage Publications.

Mujani, Saiful (2007), *“Muslim Demokrat: Islam, Budaya Demokrasi, dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca-Orde Baru”* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Rais, M. Amin (2008), "*Selamatkan Indonesia!*" Yogyakarta: PPSK Press.
- Rauf, Maswadi dkk. (2011), "*Menakar Demokrasi di Indonesia: Indeks Demokrasi Indonesia 2009.*" Jakarta: UNDP.
- Safa'at, Ali (2011), "*Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik*" Jakarta: Rajagrafindo.
- Schein, Edgar H (2004). "*Organizational Culture and Leadership*" USA: Jossey-Bass.
- Sekretariat Jenderal ASEAN (2010) "*Asean Selayang Pandang: Edisi 19 Tahun 2010.*" Jakarta: ASEAN.
- Sekretariat Jendral DPR RI (2010), "*Rencana Strategis DPR RI 2010 – 2014.*"
- Sekretariat Negara Republik Indonesia (1980), "*30 Tahun Indonesia Merdeka, Cetakan Ketiga*" Jakarta: Tira Pustaka.
- Sudarmanto (2009). "*Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*" Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudibyo, Agus Dkk. (2010), "*Media dan Politik Lokal*" Jakarta: Jurnal Dewan Pers No 3, Desember 2010.
- Sisk, Timothy D (2002), "*Demokrasi Di Tingkat Lokal*" Jakarta: AMEEMPRO.
- Suparlan, Parsudi (2002), "*Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural.*" Makalah, tidak diterbitkan.
- Surbakti, Ramlan dkk (2008), "*Perekayaan Sistem Pemilihan Umum: Untuk Pembangunan tata Politik Demokratis*" Jakarta: Kemitraan Bagi Tata Pemerintahan di Indonesia.
- Surbakti, Ramlan (2010), "*Memahami Ilmu Politik*" Jakarta: Grasindo.
- The Economist Intelligence Unit (2011), "*Democracy Index 2010*" Tidak Diterbitkan.
- _____ (2012), "*Democracy Index 2011*" Tidak Diterbitkan.

_____	(2013),” <i>Democracy Index 2012</i> ”	Tidak
Diterbitkan.		
_____	(2014),” <i>Democracy Index 2013</i> ”	Tidak
Diterbitkan.		
_____	(2015),” <i>Democracy Index 2014</i> ”	Tidak
Diterbitkan.		

Thoha, Miftah (2010), “*Birokrasi & Politik di Indonesia.*” Jakarta: Rajawali Grasindo.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Wibowo, I & Samsul Hadi (2009), “ *Merangkul Cina: Hubungan Indonesia-Cina Pasca Soeharto*” Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Zubair, Ahmad Charris (2003), ”Membangun Etika Kesadaran Multikulturalisme Di Indonesia.” Yogyakarta: Jurnal Filsafat, Agustus 2003, Jilid 34, Nomor 2.

Website

www.bkn.go.id

www.bps.go.id

www.depdagri.go.id

www.dpr.go.id

www.dewanpers.or.id

www.indonesia.go.id

www.freedomhouse.org

www.globalfirepower.com

www.kejaksaan.go.id

www.kpk.go.id

www.kpu.go.id

www.mahkamahagung.go.id

www.mahkamahkonstitusi.go.id

<http://www.bps.go.id>

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://www.bps.go.id>



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710
Telp. : (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax.: (021) 3857046
Homepage : <http://www.bps.go.id> E-mail : bpsdq@bps.go.id

ISSN 2303-2448

